



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

AUDITED

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Kesehatan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Kesehatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2019

Menteri Kesehatan,

Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K)





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2019

Menteri Kesehatan,



Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K)

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Diagram	viii
Daftar Grafik	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Pernyataan Tanggung Jawab	xii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	10
II. Neraca	11
III. Laporan Operasional	13
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	14
V. Catatan atas Laporan Keuangan	15
A. Penjelasan Umum	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	49
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	61
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	91
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	104
F. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya	110
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1	1
Tabel 2	1
Tabel 3	3
Tabel 4	5
Tabel 5	6
Tabel 6	6
Tabel 7	7
Tabel 8	7
Tabel 9	7
Tabel 10	8
Tabel 11	8
Tabel 12	9
Tabel 13	22
Tabel 14	30
Tabel 15	44
Tabel 16	47
Tabel 17	47
Tabel 18	49
Tabel 19	49
Tabel 20	50
Tabel 21	50
Tabel 22	50
Tabel 23	51
Tabel 24	52
Tabel 25	52
Tabel 26	53
Tabel 27	53

Tabel 28	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja TA 2018	54
Tabel 29	Anggaran Menurut Jenis Belanja TA 2018 dan 2017	55
Tabel 30	Realisasi Belanja (<i>Netto</i>) TA 2018 dan 2017	55
Tabel 31	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018	56
Tabel 32	Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017	56
Tabel 33	Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017	57
Tabel 34	Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017	58
Tabel 35	Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 dan 2017	58
Tabel 36	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017	59
Tabel 37	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 dan 2017	59
Tabel 38	Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan TA 2018 dan 2017	59
Tabel 39	Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan 2017	60
Tabel 40	Realisasi Belanja Modal BLU TA 2018 dan 2017	60
Tabel 41	Daftar Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017	61
Tabel 42	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017	62
Tabel 43	Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Unit Eselon 1	62
Tabel 44	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 2017	63
Tabel 45	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2018 dan 2017	63
Tabel 46	Kas lainnya dan Setara Kas Menurut Unit Eselon 1	64
Tabel 47	Rincian Kas pada BLU Per 31 Desember 2018 dan 2017	64
Tabel 48	Rincian Kas pada BLU Menurut Unit Eselon 1	64
Tabel 49	Rincian Investasi Jangka Pendek BLU Per 31 Desember 2018 dan 2017	65
Tabel 50	Investasi Jangka Pendek BLU per Eselon 1	65
Tabel 51	Rincian Belanja Dibayar di Muka Per 31 Desember 2018 dan 2017	65
Tabel 52	Belanja dibayar di Muka Menurut Unit Eselon 1	66
Tabel 53	Rincian Uang Muka Belanja Per 31 Desember 2018 dan 2017	66
Tabel 54	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Menurut Unit Eselon 1	66
Tabel 55	Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2018 dan 2017	67
Tabel 56	Piutang Bukan Pajak Menurut Unit Eselon 1	67
Tabel 57	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2018 dan 2017	67
Tabel 58	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak per	68

	Eselon 1	
Tabel 59	Rincian Bagian Lancar TP/TGR Per 31 Desember 2018 dan 2017	68
Tabel 60	Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon 1	68
Tabel 61	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 2017	69
Tabel 62	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR Menurut Unit Eselon 1	69
Tabel 63	Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2018 dan 2017	70
Tabel 64	Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Eselon I	70
Tabel 65	Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2018 dan 2017	70
Tabel 66	Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Menurut Unit Eselon I	71
Tabel 67	Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2018 dan 2017	71
Tabel 68	Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Menurut Unit Eselon 1	71
Tabel 69	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2018 dan 2017	72
Tabel 70	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU Menurut Unit Eselon 1	72
Tabel 71	Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017	73
Tabel 72	Persediaan Menurut Unit Eselon 1	73
Tabel 73	Persediaan Dalam Kondisi Usang dan Rusak Menurut Eselon 1	74
Tabel 74	Rincian Aset Tetap (BMN) 31 Desember 2018 dan 2017	75
Tabel 75	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Nilai Tanah	75
Tabel 76	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin	77
Tabel 77	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Gedung dan Bangunan	78
Tabel 78	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan	79
Tabel 79	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya	80
Tabel 80	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	81
Tabel 81	Daftar Piutang Jangka Panjang Tahun 2018 dan 2017	81
Tabel 82	Tagihan TP/TGR Tahun 2018 dan 2017 Menurut Unit Eselon 1	82
Tabel 83	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan TP/TGR Tahun 2018 dan 2017 Menurut Unit Eselon 1	82
Tabel 84	Tagihan TP/TGR (Netto) Tahun 2018 dan 2017 Menurut Unit Eselon 1	83

Tabel 85	Daftar Aset Lainnya Tahun 2018 dan 2017	84
Tabel 86	Rincian Aset Tak Berwujud ATB Tahun 2018 dan 2017	84
Tabel 87	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tak Berwujud	85
Tabel 88	Hasil Penelitian yang Mendapat HKI pada BPPSDM Kesehatan	85
Tabel 89	Rincian Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya TA 2018	86
Tabel 90	Daftar Aset Lain-Lain TA 2018 dan 2017	86
Tabel 91	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Lain-Lain	87
Tabel 92	Rincian Kewajiban Jangka Pendek TA 2018 dan 2017	88
Tabel 93	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2018 dan 2017	88
Tabel 94	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2018 dan 2017 Per Eselon 1	89
Tabel 95	Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2018 dan 2017	89
Tabel 96	Rincian Pendapatan Diterima Di muka TA 2018 dan 2017 Per Eselon 1	89
Tabel 97	Uang Muka dari KPPN TA 2018 dan 2017	90
Tabel 98	Pendapatan 31 Desember 2018 dan 2017	91
Tabel 99	Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017	91
Tabel 100	Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017	92
Tabel 101	Beban Persediaan Menurut Unit Eselon 1	92
Tabel 102	Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 2017	93
Tabel 103	Beban Barang dan Jasa Menurut Unit Eselon 1	94
Tabel 104	Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 2017	94
Tabel 105	Beban Pemeliharaan Menurut Unit Eselon 1	95
Tabel 106	Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan 2017	95
Tabel 107	Beban Perjalanan Dinas Menurut Unit Eselon 1	95
Tabel 108	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 2017	96
Tabel 109	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Menurut Unit Eselon	96
Tabel 110	Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan 2017	97
Tabel 111	Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut Unit Eselon 1	97
Tabel 112	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2018 dan 2017	98
Tabel 113	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Menurut Unit Eselon 1	99
Tabel 114	Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional per 31 Desember 2018 dan 2017	99
Tabel 115	Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Menurut Unit Eselon 1	99
Tabel 116	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Menurut Unit Eselon 1	100

Tabel 117	Beban Pelepasan Aset Non Lancar Menurut Unit Eselon 1	100
Tabel 118	Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Menurut Unit Eselon 1	101
Tabel 119	Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Menurut Unit Eselon 1	101
Tabel 120	Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2018 dan 2017	102
Tabel 121	Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Menurut Unit Eselon 1	102
Tabel 122	Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional 31 Desember 2018 dan 2017	103
Tabel 123	Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional Menurut Unit Eselon 1	103
Tabel 124	Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2018 dan 2017 Menurut Unit Eselon 1	104
Tabel 125	Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 Menurut Unit Eselon 1	105
Tabel 126	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2018 dan 2017 Menurut Unit Eselon 1	105
Tabel 127	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2018 dan 2017 Menurut Unit Eselon 1	106
Tabel 128	Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2018 dan 2017 Menurut Unit Eselon 1	107
Tabel 129	Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018 dan 2017	107
Tabel 130	Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018 dan 2017 Menurut Unit Eselon 1	108
Tabel 131	Penjelasan Perbedaan Saldo Transfer Masuk dan Transfer Keluar	108
Tabel 132	Rincian Kementerian Negara/Lembaga Penerima Aset dari Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018	109
Tabel 133	Perbedaan Penyajian Aset Tetap pada LK dan LBMN	110
Tabel 134	Indikator Program	119
Tabel 135	Pencapaian Indikator Program	120
Tabel 136	Progres Hibah BMN Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	122

DAFTAR DIAGRAM

	Hal
Diagram 1 Komposisi Anggaran TA 2018	54

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1 Anggaran dan Realisasi TA 2018	55

DAFTAR GAMBAR

	Hal	
Gambar 1	Visi dan Misi	18
Gambar 2	Program Indonesia Sehat	18
Gambar 3	Peta Strategi Kementerian Kesehatan 2015-2019	24
Gambar 4	Biaya Pembayaran Listrik dan sewa Gudang Penyimpanan	113

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018
- Lampiran 2 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018
- Lampiran 3 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018
- Lampiran 4 Rincian Kas pada BLU per 31 Desember 2018
- Lampiran 5 Rincian Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2018
- Lampiran 6 Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2018
- Lampiran 7 Pendapatan yang Masih Harus Diterima
- Lampiran 8 Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018
- Lampiran 9 Rincian Piutang Operasional BLU per 31 Desember 2018
- Lampiran 10 Rincian Persediaan per 31 Desember 2018
- Lampiran 11 Daftar Hasil Penelitian pada Balitbangkes yang Sudah Mendapat HKI
- Lampiran 12 Dana yang Dibatasi Penggunaannya dari Jamkesmas Rujukan
- Lampiran 13 Dana yang Dibatasi Penggunaannya dari Jamkesmas Dasar
- Lampiran 14 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018
- Lampiran 15 Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2018
- Lampiran 16 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per Satker
- Lampiran 17 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi
- Lampiran 18 Koreksi Lain-Lain
- Lampiran 19 Pengesahan Hibah Langsung
- Lampiran 20 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
- Lampiran 21 Pengesahan Hibah Langsung TAYL
- Lampiran 22 Data Tuntutan Hukum – Piutang yang Timbul dari Putusan Pengadilan
- Lampiran 23 Data Tuntutan Hukum - Kewajiban yang Timbul Berdasarkan Tuntutan Hukum

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran (TA) 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Disamping itu dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual ini, Kementerian Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Secara ringkas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA 2018 diuraikan sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp12.013.839.152.925,00 atau mencapai 99,78% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp12.040.594.688.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp57.348.657.406.677,00 atau 92,70% dari anggaran belanja sebesar Rp61.864.479.406.000,00. Ringkasan realisasi anggaran TA 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

Tabel 1
Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2018			TA 2017
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara	12.040.594.688.000	12.013.839.152.925	99,78	11.705.809.385.676
Belanja Negara	61.864.479.406.000	57.348.657.406.677	92,70	54.912.281.505.907

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp49.999.767.359.651,00 terdiri dari Aset Lancar (netto) sebesar Rp13.853.224.036.153,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp34.966.810.803.340,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp7.353.632.283,00 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp1.172.378.887.875,00. Sedangkan nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.364.709.364.608,00 dan Rp47.635.057.995.043,00

Tabel 2
Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	13.853.224.036.153	8.746.078.521.705	5.107.145.514.448	58,39
Aset Tetap	34.966.810.803.340	38.797.668.708.393	(3.830.857.905.053)	(9,87)
Piutang Jangka Panjang	7.353.632.283	7.390.847.640	(37.215.357)	(0,50)
Aset Lainnya	1.172.378.887.875	370.593.431.132	801.785.456.743	216,35
Jumlah Aset	49.999.767.359.651	47.921.731.508.870	2.078.035.850.781	4,34

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017	(Rp)	%
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	2.364.709.364.608	1.627.731.242.426	736.978.122.182	45,28
Ekuitas				
Ekuitas	47.635.057.995.043	46.294.000.266.444	1.341.057.728.599	2,90
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	49.999.767.359.651	47.921.731.508.870	2.078.035.850.781	4,34

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian secara wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp12.350.280.276.372,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp54.689.905.888.742,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp42.339.625.612.370,00. Sementara Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp266.413.058.984,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp42.606.038.671.354,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp46.294.000.266.444,00 ditambah kenaikan Ekuitas selama tahun 2018 sebesar Rp1.341.057.728.599,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp47.635.057.995.043,00.

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

5.1. Informasi penting Pelaksanaan anggaran

- Jumlah satuan kerja (Satker) Kementerian Kesehatan TA 2018 sesuai DIPA yang terbit sebanyak 418 Satker dengan pagu anggaran sebesar Rp61.864.479.406.000,00 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA 2018.

Tabel 3
Anggaran dan Jumlah Satker Kementerian Kesehatan TA 2018

No	Jenis Kewenangan	Jumlah Satker	Anggaran (Rp)
1	Kantor Pusat (KP)	48	39.409.083.726.000
2	Kantor Daerah (KD)	166	21.352.452.980.000
3	Dekonsentrasi (DK)	204	1.102.942.700.000
Total		418	61.864.479.406.000

Selain itu Kementerian Kesehatan juga memiliki Satker yang sudah tidak aktif/tidak memperoleh DIPA pada Tahun 2018 tetapi masih memiliki saldo yaitu Satker Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 1.263 sehingga jumlah keseluruhan Satker Kementerian Kesehatan baik aktif maupun inaktif berdasarkan e-Rekon & LK adalah 1.681 Satker.

- b. Dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah, telah dilakukan proses registrasi, persetujuan rekening, dan usulan dana hibah untuk masuk DIPA dan telah diterbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) atas realisasi belanja hibah.

5.2. Informasi penting terkait Penyusunan Laporan Keuangan TA 2018

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Satker seluruhnya telah dilakukan pelaporan secara berjenjang dengan uraian sebagai berikut :
- Kantor Daerah (KD)
 - Satker Kantor Daerah → Wilayah → Eselon I → Kementerian Kesehatan
 - Kantor Pusat (KP)
 - Satker Kantor Pusat → Eselon I → Kementerian Kesehatan
 - Dekonsentrasi (DK)
 - Satker Dekonsentrasi → Eselon I → Kementerian Kesehatan
- b. Unit Akuntansi Wilayah Vertikal dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/78/2016 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA/B-W) Vertikal Kementerian Kesehatan.
- c. Unit Akuntansi tingkat Eselon I, pembentukannya menjadi tanggungjawab yang melekat bagi Pejabat Eselon I terkait untuk setiap TA menetapkan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Eselon I (UAPPA/B-E1) dengan Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan didasarkan pada Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
- d. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan Triwulan IV Tahun 2018 telah dilakukan reuiu oleh Inspektorat Jenderal yang mencakup seluruh jenjang pelaporan.
- e. Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan, telah dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Perbendaharaan dan Pelayanan Negara (KPPN), Kanwil Perbendaharaan dan Ditjen Perbendaharaan melalui aplikasi e-Rekon-LK.

- f. Dalam proses pemutakhiran dan penatausahaan barang milik negara (BMN) di tingkat Satker, telah dilakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tata cara dan prosedur mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

5.3. Beberapa Peraturan yang mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA 2018.

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tanggal 27 April 2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara beserta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2018 tanggal 31 Mei 2018;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- h. Surat Direktur Barang Milik Negara Nomor S-504/KN/2017 tentang Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Barang Pengguna (LBP); dan
- i. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Nomor S-5445/PB/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Prosedur Pencatatan Pengembalian/Penyetoran Sisa Kas Hibah Langsung Uang (HLU) yang telah disahkan ke Kas Negara.

5.4. Kementerian Kesehatan telah Menerbitkan Peraturan dan Kebijakan untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA 2018

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/558/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/42/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- c. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.03.03/II/345/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Pelaksanaan Likuidasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- d. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.03.03/II/2037/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi BMN di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- e. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.03/III/2235/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

5.5. Rekonsiliasi Internal

Telah dilakukan Rekonsiliasi Internal Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) atas Aset Kementerian Kesehatan dengan cara membandingkan data Unit Akuntansi Barang dengan data yang disusun oleh Unit Akuntansi Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Rekonsiliasi Internal antara SAIBA dan SIMAK BMN

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	SAIBA	SIMAK-BMN	Selisih
117	Persediaan	8.848.474.789.132	8.924.465.161.028	(75.990.371.896)
131	Tanah	15.404.565.123.149	64.211.038.877.289	(48.806.473.754.140)
132	Peralatan Dan Mesin	19.931.915.819.977	19.931.915.819.977	-
133	Gedung Dan Bangunan	13.574.335.256.508	14.513.297.021.169	(938.961.764.661)
134	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	659.140.096.700	575.175.485.574	83.964.611.126
135	Aset Tetap Lainnya	180.330.322.376	172.501.223.804	7.829.098.572
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.148.494.656.000	3.148.494.656.000	-
137	Akumulasi Penyusutan	(17.931.970.471.370)	(15.985.664.130.207)	(1.946.306.341.163)
161	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	305.364.000	2.121.420.000	(1.816.056.000)
162	Aset Tidak Berwujud	271.946.991.563	271.946.991.563	-
166	Aset Lain-Lain	5.896.652.429.657	21.709.197.717.674	(15.812.545.288.017)
169	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(5.003.135.536.931)	(17.530.107.005.333)	12.526.971.468.402
Total Selisih		44.981.054.840.761	99.944.383.238.538	(54.963.328.397.777)

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui terdapat perbedaan total aset yaitu SAIBA lebih rendah dari SIMAK-BMN sebesar Rp54.963.328.397.777,00 yang merupakan:

1. *Dropping* barang persediaan pengadaan Satker Pusat yang sudah diusulkan pemindahtanganan sehingga dikeluarkan dari Neraca SAIBA;
2. Aset Satker DK/TP Pengadaan sebelum tahun 2011 yang sudah dikeluarkan dari Neraca SAIBA dan direklasifikasi ke Aset Lain-Lain dalam Aplikasi SIMAK-BMN;
3. Aset Finansial yang tidak dicatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN; dan
4. Hasil Revaluasi atas BMN pada tahun 2017-2018 tidak disajikan dalam Neraca SAIBA Tahun 2018 *Audited*.

5.6. Koreksi dan Tindak lanjut Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA 2018

Terdapat beberapa perubahan/koreksi, baik internal maupun Pemeriksaan Tim BPK yang berdampak pada adanya penambahan dan pengurangan pada LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018.

a. Langkah-langkah koreksi:

Koreksi Laporan Keuangan dilakukan setelah penelusuran/konfirmasi/klarifikasi kepada Satker terkait dan sudah dilakukan koreksi/penyesuaian pada tingkat Satker serta disampaikan secara berjenjang sampai dengan tingkat Kementerian.

b. Beberapa koreksi/penyesuaian yang dilakukan antara lain:

- 1) Realisasi PNBP mengalami koreksi penambahan pada Unit Eselon 1 Ditjen Pelayanan Kesehatan Seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 5
Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP TA 2018
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Unit Eselon I	Unaudited		Koreksi		Audited	
	Estimasi	Realisasi	Estimasi	Realisasi	Estimasi	Realisasi
Setjen	7.859.975.000	17.411.974.898			7.859.975.000	17.411.974.898
Itjen	-	370.542.842			-	370.542.842
Ditjen Kesmas	1.073.012.000	2.880.299.897			1.073.012.000	2.880.299.897
Ditjen Yankes	11.067.751.373.000	10.741.142.002.374		16.051.822.612	11.067.751.373.000	10.757.193.824.986
Ditjen P2P	197.006.228.000	330.664.368.505			197.006.228.000	330.664.368.505
Ditjen Farmalkes	26.887.000.000	54.528.514.481			26.887.000.000	54.528.514.481
Balitbangkes	3.141.749.000	4.262.475.508			3.141.749.000	4.262.475.508
BPPSDM Kes	736.875.351.000	846.527.151.808			736.875.351.000	846.527.151.808
Jumlah	12.040.594.688.000	11.997.787.330.313	-	16.051.822.612	12.040.594.688.000	12.013.839.152.925

- 2) Realisasi Belanja mengalami koreksi penambahan pada Unit Eselon 1 Ditjen Yankes seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 6
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Unit Eselon I	Unaudited		Koreksi		Audited	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Setjen	28.138.096.577.000	27.435.612.133.630			28.138.096.577.000	27.435.612.133.630
Itjen	119.983.200.000	113.594.977.605			119.983.200.000	113.594.977.605
Ditjen Kesmas	2.114.745.619.000	1.954.138.115.508			2.114.745.619.000	1.954.138.115.508
Ditjen Yankes	17.204.700.290.000	15.419.111.492.953		13.504.189.816	17.204.700.290.000	15.432.615.682.769
Ditjen P2P	3.378.571.989.000	3.072.479.106.449			3.378.571.989.000	3.072.479.106.449
Ditjen Farmalkes	5.086.359.848.000	4.187.147.365.583			5.086.359.848.000	4.187.147.365.583
Balitbangkes	930.898.816.000	828.488.248.709			930.898.816.000	828.488.248.709
BPPSDM Kes	4.891.123.067.000	4.324.581.776.424			4.891.123.067.000	4.324.581.776.424

Jumlah	61.864.479.406.000	57.335.153.216.861	-	13.504.189.816	61.864.479.406.000	57.348.657.406.677
--------	--------------------	--------------------	---	----------------	--------------------	--------------------

- 3) Neraca mengalami koreksi antara lain yaitu Aset Lancar bertambah, Aset Tetap bertambah, Piutang Jangka Panjang berkurang, Aset Lainnya berkurang, Kewajiban bertambah dan Ekuitas berkurang. Seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 7
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018
Hasil Koreksi/Penyesuaian *Audited*

(dalam rupiah)

Akun	31 Desember 2018		
	<i>Unaudited</i>	Koreksi	<i>Audited</i>
Aset	53.082.219.172.499	(3.082.451.812.848)	49.999.767.359.651
Aset Lancar	13.754.254.179.327	98.969.856.826	13.853.224.036.153
Aset Tetap	34.889.334.821.378	77.475.981.962	34.966.810.803.340
Piutang Jangka Panjang	7.643.081.283	(289.449.000)	7.353.632.283
Aset Lainnya	4.430.987.090.511	(3.258.608.202.636)	1.172.378.887.875
Jumlah Aset	53.082.219.172.499	(3.082.451.812.848)	49.999.767.359.651
Kewajiban ¹¹	2.182.646.307.145	182.063.057.463	2.364.709.364.608
Ekuitas ^a	50.899.572.865.354	(3.264.514.870.311)	47.635.057.995.043
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	53.082.219.172.499	(3.082.451.812.848)	49.999.767.359.651

i

1 koreksi Neraca per 31 Desember 2018 menurut Eselon 1, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Koreksi Neraca per 31 Desember 2018 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	<i>Unaudited</i>	Koreksi		<i>Audited</i>
		Debet	Kredit	
Setjen	4.799.960.195.467	10.420.643.390	16.765.559.956	4.793.615.278.901
Itjen	6.000.321.048	0	0	6.000.321.048
Ditjen Kesmas	1.559.511.867.887	34.372.198	175.494.876.427	1.384.051.363.658
Ditjen Yankes	64.993.905.133.282	736.170.478.809	229.298.183.012	65.500.777.429.079
Ditjen P2P	6.791.859.475.768	16.138.508.964	107.975.116.519	6.700.022.868.213
Ditjen Farmalkes	3.314.744.066.857	2.215.000	4.347.200.000	3.310.399.081.857
Balitbangkes	1.774.075.993.923	17.067.164.600	25.822.832.827	1.765.320.325.696
BPPSDM Kes	21.502.719.151.141	2.236.105.023	1.136.278.512	21.503.818.977.652
Konsolidasi	(51.660.557.032.874)	16.066.375.145.326	19.370.056.398.905	(54.964.238.286.453)
Jumlah	53.082.219.172.499	16.848.444.633.310	19.930.896.446.158	49.999.767.359.651

- 4) LO mengalami koreksi/penyesuaian hasil audit terjadi pada semua Eselon 1 kecuali pada Inspektorat Jenderal. Seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 9
Laporan Operasional TA 2018
Hasil Koreksi/Penyesuaian *Audited* Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	<i>Unaudited</i>	Koreksi		<i>Audited</i>
		Debet	Kredit	
Setjen	(27.383.174.826.247)	8.674.824.002	2.108.884.663	(27.389.740.765.586)
Itjen	(114.583.696.916)			(114.583.696.916)
Ditjen Kesmas	(1.090.889.613.449)	175.596.847.251	83.154.923	(1.266.403.305.777)
Ditjen Yankes	(6.972.873.788.724)	362.379.227.534	658.696.551.866	(6.676.556.464.392)
Ditjen P2P	(2.665.165.098.187)	112.088.742.139	12.096.548.507	(2.765.157.291.819)
Ditjen Farmalkes	(263.093.950.331)	2.173.600.000	0	(265.267.550.331)
Balitbangkes	(839.713.907.833)	8.780.877.827	25.209.600	(848.469.576.060)

BPPSDM Kes	(3.440.210.378.718)	193.582.167	4.493.017.196	(3.435.910.943.689)
Konsolidasi	64.739.009.749	68.619.012.884	159.930.926.351	156.050.923.216)
Jumlah	(42.704.966.250.656)	738.506.713.804	837.434.293.106	(42.606.038.671.354)

Ringkasan LO Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 hasil koreksi/penyesuaian audit seperti pada tabel berikut:

Tabel 10
Ringkasan LO per 31 Desember 2018
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited

(dalam rupiah)

Uraian	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
KEGIATAN OPERASIONAL				
- Jumlah Pendapatan Operasional	11.832.407.387.382	13.251.589.537	531.124.478.527	12.350.280.276.372
- Jumlah Beban Operasional	54.364.336.056.952	572.602.054.896	247.032.223.106	54.689.905.888.742
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(42.531.928.669.570)	(585.853.644.433)	778.156.701.633	(42.339.625.612.370)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
- Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(513.566.762.575)	32.948.027.877	3.649.295.181	(542.865.495.271)
- Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	340.529.181.489	119.705.041.494	55.628.296.292	276.452.436.287
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(173.037.581.086)	152.653.069.371	59.277.591.473	(266.413.058.984)
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(42.704.966.250.656)	738.506.713.804	837.434.293.106	(42.606.038.671.354)

5) Hasil koreksi LPE per 31 Desember 2018 menurut Unit Eselon 1, seperti pada tabel berikut:

Tabel 11
Laporan Perubahan Ekuitas TA 2018
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Unit Eselon 1	Unaudited	Koreksi		Audited
		Debet	Kredit	
Setjen	4.795.295.203.849	8.674.824.002	2.120.434.663	4.788.740.814.510
Itjen	6.000.321.048	-	-	6.000.321.048
Ditjen Kesmas	1.558.943.116.169	176.204.468.548	743.964.319	1.383.482.611.940
Ditjen Yankes	62.925.002.805.337	385.480.203.207	707.216.405.973	63.246.739.008.103
Ditjen P2P	6.790.294.488.037	112.139.460.575	20.292.246.555	6.698.447.274.017
Ditjen Farmalkes	3.313.649.128.192	4.347.200.000	2.215.000	3.309.304.143.192
Balitbangkes	1.772.311.685.210	8.780.877.827	25.209.600	1.763.556.016.983
BPPSDM Kes	21.398.633.150.386	1.202.996.092	5.595.937.409	21.403.026.091.703
Konsolidasi	(51.660.557.032.874)	5.300.080.252.536	1.996.398.998.957	(54.964.238.286.453)
Jumlah	50.899.572.865.354	5.996.910.282.787	2.732.395.412.476	47.635.057.995.043

Ringkasan LPE per 31 Desember 2018 hasil koreksi/penyesuaian audit seperti pada tabel berikut:

Tabel 12
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018
Hasil Koreksi/Penyesuaian *Audited*

(dalam rupiah)

URAIAN	Unaudited	KOREKSI		Audited
		Debet	Kredit	
EKUITAS AWAL (A)	46.294.000.266.444			46.294.000.266.444
SURPLUS/(DEFISIT) - LO (B)	(42.704.966.250.656)	738.506.713.804	837.434.293.106	(42.606.038.671.354)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS (C)	1.460.883.295.093	5.255.866.976.247	1.894.364.083.780	(1.900.619.597.374)
- Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0
- Koreksi Nilai Persediaan	77.723.022.974	75.990.371.939	5.128.200	1.737.779.235
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0
- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.424.299.480.021	5.156.770.691.164	1.887.869.431.334	(1.844.601.779.809)
- Lain – lain	(41.139.207.902)	23.105.913.144	6.489.524.246	(57.755.596.800)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (D)	45.849.655.554.473	2.536.592.736	597.035.590	45.847.715.997.327
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS (E = B + C + D)	4.605.572.598.910	5.996.910.282.787	2.732.395.412.476	1.341.057.728.599
EKUITAS AKHIR (F = A + E)	50.899.572.865.354	5.996.910.282.787	2.732.395.412.476	47.635.057.995.043

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref.	TA 2018		%	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
- Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	12.040.594.688.000	12.013.839.152.925	99,78	11.705.809.385.676
JUMLAH PENDAPATAN		12.040.594.688.000	12.013.839.152.925	99,78	11.705.809.385.676
BELANJA	B.2				
- Belanja Pegawai	B.2.1	5.948.221.629.000	5.016.492.763.916	84,34	4.801.082.279.310
- Belanja Barang	B.2.2	26.904.090.926.000	23.989.406.062.646	89,17	21.711.803.822.374
- Belanja Modal	B.2.3	3.509.766.851.000	2.850.715.434.115	81,22	2.981.598.351.223
- Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	25.502.400.000.000	25.492.043.146.000	99,96	25.417.797.053.000
JUMLAH BELANJA		61.864.479.406.000	57.348.657.406.677	92,70	54.912.281.505.907

II. NERACA

**KEMENTERIAN KESEHATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref.	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1.659.565.736	1.320.666.799	25,66
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	849.108.715	218.677.700	288,29
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	173.145.297.853	574.442.183.969	(69,86)
Kas pada Badan Layanan Umum	C.4	1.849.005.553.191	2.243.446.441.759	(17,58)
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	C.5	450.246.567.822	371.467.208.204	21,21
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.6	57.881.942.877	90.593.929.623	(36,11)
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.7	-	9.566.508.000	(100,00)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.8	514.275.732	627.111.298	(17,99)
Piutang Bukan Pajak	C.9	30.317.031.629	41.694.452.251	(27,29)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	(3.417.159.202)	(5.475.319.552)	(37,59)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		26.899.872.427	36.219.132.699	(25,73)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.11	542.781.764	1.394.732.983	(61,08)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.12	(3.055.728)	(18.834.387)	(83,78)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		539.726.036	1.375.898.596	(60,77)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.13	2.871.565.020.544	2.366.739.177.023	21,33
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.14	(433.986.407.112)	(400.120.822.790)	8,46
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Netto)		2.437.578.613.432	1.966.618.354.233	23,95
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.15	12.766.764.474	13.165.815.819	(3,03)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.16	(6.338.041.274)	(6.107.309.748)	3,78
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (Netto)		6.428.723.200	7.058.506.071	(8,92)
Persediaan	C.17	8.848.474.789.132	3.443.123.902.754	156,99
JUMLAH ASET LANCAR		13.853.224.036.153	8.746.078.521.705	58,39
ASET TETAP				
Tanah	C.18	15.404.565.123.149	15.781.343.836.355	(2,39)
Peralatan dan Mesin	C.19	19.931.915.819.977	30.298.593.008.907	(34,22)
Gedung dan Bangunan	C.20	13.574.335.256.508	14.264.231.925.068	(4,84)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.21	659.140.096.700	675.062.859.576	(2,36)
Aset Tetap Lainnya	C.22	180.330.322.376	253.351.060.234	(28,82)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.23	3.148.494.656.000	3.379.500.085.896	(6,84)
Akumulasi Penyusutan	C.24	(17.931.970.471.370)	(25.854.414.067.643)	(30,64)
JUMLAH ASET TETAP		34.966.810.803.340	38.797.668.708.393	(9,87)
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	C.25	7.253.197.678	7.228.460.378	0,34
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.26	(285.215.364)	(172.208.207)	65,62
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		6.967.982.314	7.056.252.171	(1,25)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	C.27	1.589.959.220	1.677.890.220	(5,24)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR BLU	C.28	(1.387.737.418)	(1.444.347.918)	(3,92)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU		202.221.802	233.542.302	(13,41)

URAIAN	Ref.	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
<i>(Netto)</i>				
Piutang <i>Jangka Panjang</i> lainnya	C.29	276.560.972	101.560.972	172,31
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang <i>Jangka Panjang</i> lainnya	C.30	(93.132.805)	(507.805)	18.240,27
<i>Piutang Jangka Panjang lainnya (Netto)</i>		183.428.167	101.053.167	81,52
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		7.353.632.283	7.390.847.640	(0,50)
ASET LAINNYA				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.31	305.364.000	-	100,00
Aset Tak Berwujud	C.32	271.946.991.563	230.678.798.039	17,89
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.33	6.609.639.586	6.680.396.861	(1,06)
Aset Lain-lain	C.34	5.896.652.429.657	1.861.374.860.857	216,79
<i>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya</i>	C.35	(5.003.135.536.931)	(1.728.140.624.625)	189,51
JUMLAH ASET LAINNYA		1.172.378.887.875	370.593.431.132	216,35
JUMLAH ASET		49.999.767.359.651	47.921.731.508.870	4,34
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.36	2.247.499.237.957	1.492.156.224.516	50,62
Hibah Yang Belum Disahkan	C.37	26.807.000	17.982.585.660	(99,85)
Pendapatan Diterima Dimuka	C.38	115.414.379.017	116.097.544.526	(0,59)
Uang Muka dari KPPN	C.39	1.659.565.736	1.320.666.799	25,66
Utang <i>Jangka Pendek Lainnya</i>	C.40	109.374.898	174.220.925	(37,22)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2.364.709.364.608	1.627.731.242.426	45,28
JUMLAH KEWAJIBAN		2.364.709.364.608	1.627.731.242.426	45,28
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	C.41	47.635.057.995.043	46.294.000.266.444	2,90
JUMLAH EKUITAS		47.635.057.995.043	46.294.000.266.444	2,90
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		49.999.767.359.651	47.921.731.508.870	4,34

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN KESEHATAN LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	REF.	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun)%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
Pendapatan PNBP Lainnya	D.1	12.350.280.276.372	11.855.069.212.514	4,18
JUMLAH PENDAPATAN		12.350.280.276.372	11.855.069.212.514	4,18
BEBAN	D.2			
Beban Pegawai	D.2.1	9.769.769.913.501	9.106.857.216.579	7,28
Beban Persediaan	D.2.2	4.409.064.403.292	4.149.399.232.164	6,26
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	6.663.450.485.948	5.533.431.492.495	20,42
Beban Pemeliharaan	D.2.4	1.162.567.451.992	1.304.455.423.423	(10,88)
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	2.951.492.342.177	2.631.640.957.184	12,15
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.2.6	541.115.253.881	4.377.754.001.316	(87,64)
Beban Bantuan Sosial	D.2.7	25.492.043.146.000	25.418.433.302.000	0,29
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.8	3.646.208.349.116	3.979.505.775.907	(8,38)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.9	54.194.542.835	52.656.215.103	2,92
Beban Lain-lain	D.2.10	-	-	-
JUMLAH BEBAN		54.689.905.888.742	56.554.133.616.171	(3,30)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.3	(42.339.625.612.370)	(44.699.064.403.657)	(5,28)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.4	(542.865.495.271)	(225.530.045.285)	140,71
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.4.1	12.163.772.889	5.920.820.287	105,44
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.4.2	555.029.268.160	231.450.865.572	139,80
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.5	276.452.436.287	261.425.548.065	5,75
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5.1	618.339.871.152	992.527.143.000	(37,70)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5.2	341.887.434.865	731.101.594.935	(53,24)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.6	(266.413.058.984)	35.895.502.780	(842,19)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	D.7	(42.606.038.671.354)	(44.663.168.900.877)	(4,61)
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa		-	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(42.606.038.671.354)	(44.663.168.900.877)	(4,61)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN KESEHATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	REF.	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Ekuitas Awal	E.1	46.294.000.266.444	46.710.647.659.719	(0,89)
Surplus/Defisit-LO	E.2	(42.606.038.671.354)	(44.663.168.900.877)	(4,61)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi				
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	(1.900.619.597.374)	307.676.167.991	(717,73)
Penyesuaian Nilai Aset		-	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	1.737.779.235	112.869.821.788	(98,46)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	(446.473.904.884)	111.403.404.640	(500,77)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	E.3.3	(1.398.127.874.925)	(15.791.754.043)	8.753,53
Lain-lain	E.3.4	(57.755.596.800)	99.194.695.606	(158,22)
Transaksi Antar Entitas	E.4	45.847.715.997.327	43.938.845.339.611	4,34
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		1.341.057.728.599	(416.647.393.275)	421,87
Ekuitas Akhir	E.5	47.635.057.995.043	46.294.000.266.444	2,90

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 28 April 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2011 tanggal 31 Desember 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat tanggal 2 Januari 2013;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2015 tanggal 22 Januari 2016 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pedoman Penerapan Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Operasi;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/489/2014 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Kesehatan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/42/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
22. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-211/PB/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Kesehatan

Rencana
Strategis

Dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, Kementerian Kesehatan menetapkan **Rencana Strategis** yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 - 2019 didasarkan pada visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

VISI MISI

Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong. Visi tersebut diwujudkan dengan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta;

Dalam pembangunan nasional 2015-2019, pemerintah akan mewujudkan TRISAKTI yang ditetapkan dalam 9 agenda prioritas (NAWACITA). Kementerian Kesehatan juga berperan serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui agenda prioritas Kabinet Kerja atau yang dikenal dengan Nawa Cita, sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Pada agenda ke-5 NAWACITA akan dicapai melalui program Indonesia pintar, program Indonesia sehat dan program Indonesia kerja serta program Indonesia sejahtera.

Gambar 1
Visi dan Misi



Program Indonesia Sehat adalah upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Program Indonesia Sehat terdiri atas 3 (tiga) pilar yaitu:

1. Paradigma Sehat;
2. Penguatan Yankes melalui Peningkatan AKSES dan MUTU Pelayanan kesehatan pada masyarakat dan Penguatan Sistem Rujukan; dan
3. Jaminan Kesehatan Nasional.

Gambar 2
Program Indonesia Sehat



Program JKN ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan

Iuran (PBI) ataupun Non-PBI. Dalam pengembangan JKN ini Kementerian Kesehatan fokus pada pengembangan benefit package, menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan.

Pilar 1. Paradigma Sehat

Paradigma sehat merupakan upaya Kementerian Kesehatan untuk merubah pola pikir stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan peningkatan upaya promotif – preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan keterlibatan lintas sektor dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Pilar 2. Penguatan Pelayanan Kesehatan

Penguatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) hal penting sebagai berikut:

1. Peningkatan akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Optimalisasi Sistem Rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
2. Penerapan pendekatan *continuum of care*; dan
3. Intervensi berbasis resiko kesehatan (*health risk*).

Pilar 3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program JKN ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun Non-PBI. Dalam pengembangan JKN ini Kementerian Kesehatan fokus pada pengembangan benefit package, menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan 2015-2019, secara keseluruhan maka diperlukan integrasi program dan kegiatan, dimana Program Prioritas difokuskan kepada 4 (empat) Program, yakni:

1. Penurunan AKI dan AKB (Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Imunisasi);
2. Perbaikan Gizi khususnya *stunting*;
3. Pengendalian Penyakit Menular (ATM: HIV/AIDS, Tuberkulosis dan Malaria); dan
4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Obesitas dan Kanker).

Adapun Program lainnya:

1. Prioritas kegiatan diutamakan ke Promotif & Preventif, termasuk kegiatan pro-aktif menjangkau sasaran ke luar gedung Puskesmas;
2. Fokus utama pada Pelayanan Kesehatan Dasar (*Primary Care*); dan
3. Menjangkau sasaran utamanya dgn pendekatan keluarga.

Ketiga program ini akan berintegrasi dan sinergis dalam mendukung pelaksanaan program prioritas tersebut.

NILAI-NILAI

Pro Rakyat

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kemenkes selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.

Inklusif

Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

Responsif

Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penangnganan yang berbeda pula.

Efektif

Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien.

Bersih

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.

TUGAS DAN FUNGSI

Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

TUJUAN

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu:

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat; dan
2. Meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (*impact* atau *outcome*). Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012);
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup;
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%;
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif; dan
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%; dan
2. Meningkatnya indeks *responsiveness* terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005-2025 adalah:

- Pembangunan nasional berwawasan kesehatan;
- Pemberdayaan masyarakat dan daerah;
- Pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan;
- Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan
- Penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 13
Sasaran Pembangunan Kesehatan pada RPJM 2015-2019

No	Indikator	Status Awal	Target 2019
1	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat		
	a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	346 (SP2010)	306
	b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012/2013)	24
	c. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	17
	d. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	32,9 (2013)	28
2	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		
	a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	297 (2013)	245
	b. Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2014)	<0,50
	c. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria	212 (2013)	300
	d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	23,4
	e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4 (2013)	15,4
	f. Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun	7,2 (2013)	5,4
3	Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan		
	a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0 (2014)	5.600
	b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	10 (2014)	481
	c. Presentase kabupaten/ kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	71,2 (2013)	95

No	Indikator	Status Awal	Target 2019
4	Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu		

Obat Serta Sumber Daya Kesehatan			
a.	Persentase kepesertaan SJSN Kes (%) (persenn)	51,8 (2014)	Min 95
b.	Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	1.015 (2013)	5.600
c.	Persentase RSUD kabupaten/ kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis	25 (2013)	60
d.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	75,5 (2014)	90
e.	Persentase obat yang memenuhi syarat	92 (2014)	94

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (*Primary Health Care*) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif.

Strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 meliputi:

- a. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas;
- b. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat;
- c. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- d. Meningkatkan Akses Yankes Dasar yang Berkualitas;
- e. Meningkatkan Akses Yankes Rujukan yang Berkualitas;
- f. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan;
- g. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- i. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Menguatkan Manajemen, Litbang dan Sistem Informasi;
- k. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan;
- l. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan; dan
- m. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan.

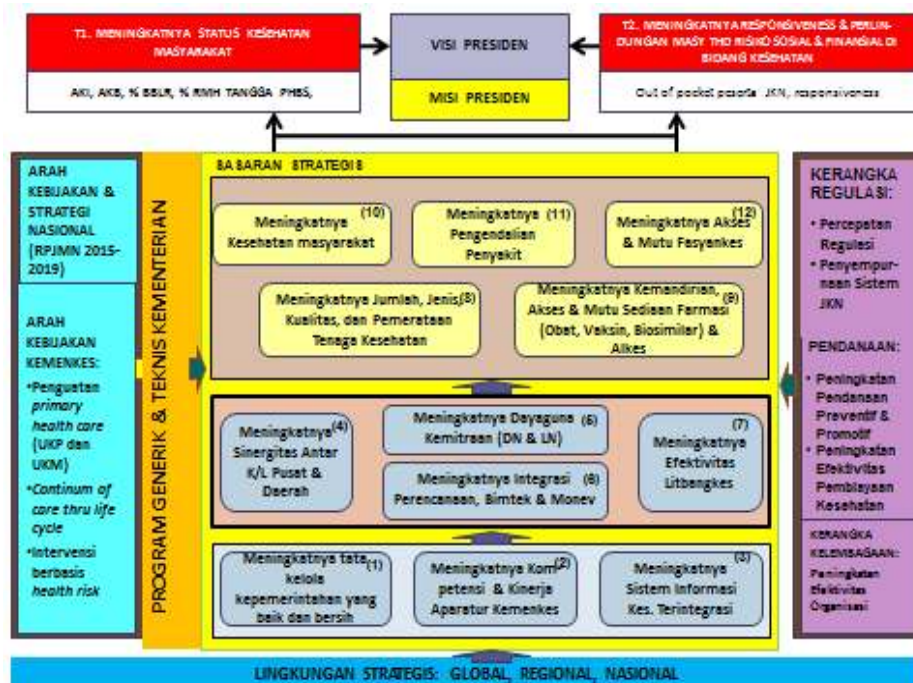
2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus dan fokus

kegiatan, kesehatan, pembangunan kesehatan.

Untuk mencapai tujuan Kementerian Kesehatan maka ditetapkan strategi Kementerian Kesehatan yang disusun seperti pada Peta Strategi Kementerian Kesehatan 2015-2019.

Gambar 3
Peta Strategi Kementerian Kesehatan 2015-2019



Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni:

a. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*)

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya yaitu:

- 1) Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat;
- 2) Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 3) Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan; dan
- 4) Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.

Untuk penguatan fungsi tersebut, perlu dilakukan Revitalisasi Puskesmas, dengan fokus pada 5 hal, yaitu:

- 1) Peningkatan SDM;
- 2) Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas;
- 3) Peningkatan pembiayaan;
- 4) Peningkatan Sistem Informasi Puskesmas (SIP); dan
- 5) Pelaksanaan akreditasi Puskesmas.

Peningkatan sumber daya manusia di Puskesmas diutamakan untuk

ketersediaan 5 jenis tenaga kesehatan yaitu: tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan. Upaya untuk mendorong tercapainya target pembangunan kesehatan nasional, terutama melalui penguatan layanan kesehatan primer, Kementerian Kesehatan mengembangkan program Nusantara Sehat. Program ini menempatkan tenaga kesehatan di tingkat layanan kesehatan primer dengan metode *team-based*.

Kemampuan manajemen Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan.

Pengembangan sistem informasi kesehatan di Puskesmas diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi masalah kesehatan dan capaian pembangunan kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat.

Pelaksanaan akreditasi Puskesmas dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan difokuskan pada daerah yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan.

Dalam penguatan Puskesmas, yang dimaksud dengan penguatan puskesmas adalah penyiapan tenaga kesehatan dan sistem kesehatan untuk memastikan health service readiness.

b. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (*Continuum Of Care*).

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.

c. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.

Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan. Strategi Kemenkes disusun sebagai jalinan strategi dan tahapan-tahapan pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan baik yang tertuang dalam tujuan 1 (T1) maupun tujuan 2 (T2). **Tujuan Kemenkes diarahkan dalam rangka pencapaian visi misi Presiden.** Untuk mewujudkan kedua tujuan tersebut Kementerian Kesehatan perlu memastikan bahwa terdapat dua belas sasaran strategis yang harus diwujudkan sebagai arah dan prioritas strategis dalam lima tahun mendatang. Ke dua belas sasaran strategis tersebut membentuk suatu hipotesis jalinan sebab-akibat untuk mewujudkan tercapainya T1 dan T2.

3. KERANGKA REGULASI

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional. Kerangka regulasi diarahkan untuk:

- a. Penyediaan regulasi dari turunan Undang-Undang yang terkait dengan kesehatan;
- b. Meningkatkan pemerataan sumber daya manusia kesehatan;
- c. Pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan;
- d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan;
- e. Penguatan kemandirian obat dan alkes;
- f. Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang lebih bermutu;
- g. Penguatan peran pemerintah di era desentralisasi; dan
- h. Peningkatan pembiayaan kesehatan.

Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang terkait, termasuk dalam rangka menciptakan sinkronisasi, integrasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah.

4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Desain organisasi yang dibentuk memperhatikan mandat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tantangan lingkungan strategis di bidang pembangunan kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, pergeseran dalam wacana pengelolaan pemerintahan (*governance issues*), kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan prinsip reformasi birokrasi (penataan kelembagaan yang efektif dan efisien). Fungsi pemerintahan yang paling mendasar adalah melayani kepentingan rakyat.

Kementerian Kesehatan akan membentuk pemerintahan yang efektif melalui desain organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*), menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi dengan adanya kejelasan peran, tanggung jawab dan mekanisme koordinasi (secara horisontal dan vertikal) dalam menjalankan program-program Renstra 2015-2019.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan rancangan awal RPJMN 2015-2019, visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan program-program 2015-2019. Program Kemenkes ada dua yaitu program generik dan program teknis.

Program generik meliputi:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
- b. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- c. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan;
- d. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Program teknis meliputi:

- a. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
- b. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan dan Lingkungan;
- c. Program Pembinaan Upaya Kesehatan;
- d. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- e. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Program Teknis Lainnya adalah Dukungan dan Program Teknis Kementerian Kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebanyak 92.

2. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sasaran Program adalah Menguatnya Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Indikator tercapainya sasaran adalah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 99,6 juta jiwa.

Sasaran kegiatan ini adalah dihasilkannya bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS). Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah pengembangan pembiayaan kesehatan JKN/KIS.

3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Sasaran program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas

aparatur adalah meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi. Indikator tercapainya sasaran adalah persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara $\leq 1\%$ sebesar 91%.

4. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Sasaran Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.

5. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta meningkatnya kesehatan jiwa.

6. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Sasaran program pembinaan pelayanan kesehatan adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat.

7. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan mutu dan alat kesehatan.

8. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sasaran program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan adalah kegiatan ini adalah meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

9. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Sasaran program penelitian dan pengembangan kesehatan adalah meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan.

KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan kesehatan dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan sehingga mencapai 5% dari APBN pada tahun 2019. Peningkatan pendanaan kesehatan juga melalui dukungan dana dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat serta sumber dari tarif/pajak maupun cukai. Guna meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan maka perlu mengaktifkan peran dan kewenangan Pusat-Daerah, sinergitas pelaksanaan pembangunan kesehatan Pusat-Daerah dan pengelolaan DAK yang lebih tepat sasaran.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan maka pendanaan kesehatan diutamakan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jaminan

Kesehatan Nasional, penguatan kesehatan pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan, penguatan sub-sub sistem dalam Sistem Kesehatan Nasional untuk mendukung upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, Balita, peningkatan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit dan serta penyehatan lingkungan.

Untuk mendukung upaya kesehatan di daerah, Kementerian Kesehatan memberikan porsi anggaran lebih besar bagi daerah melalui DAK, TP, Dekonsentrasi, Bansos dan kegiatan lain yang diperuntukkan bagi daerah.

Capaian Dua Tahun Kerja Nyata untuk Mewujudkan Indonesia Sehat

Pembangunan kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif, dengan mengacu pada visi misi Presiden. Visi Presiden adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong. Upaya untuk mewujudkan visi ini dilakukan melalui 7 misi pembangunan, dimana pada misi ke-4 adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

Dalam pembangunan nasional 2015-2019 juga dibangun kemandirian di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian dalam budaya yang dikenal dengan Trisakti. Untuk mewujudkannya, ditetapkan 9 agenda prioritas (Nawacita), dimana pada agenda ke-5 dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan dicapai melalui Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat dan Program Indonesia Sejahtera.

Program Indonesia sehat memiliki 3 komponen yaitu:

- a. Revolusi mental masyarakat agar memiliki paradigma sehat;
- b. Penguatan Pelayanan Kesehatan; dan
- c. Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia antara lain:
 - 1) Paradigma sehat meliputi:
 - 2) pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan;
 - 3) promotif - preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan;
 - 4) pemberdayaan masyarakat;
 - 5) Penguatan Pelayanan Kesehatan;
 - 6) Peningkatan Akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - 7) Optimalisasi Sistem Rujukan;
 - 8) Peningkatan Mutu;
 - 9) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - 10) Benefit;
 - 11) Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong;
 - 12) Kendali Mutu & Kendali Biaya;
 - 13) Sasaran: PBI & Non PBI.

Semangat membangun dari pinggiran tercermin dalam upaya penguatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), Kemenkes memiliki terobosan untuk menempatkan tenaga kesehatan secara tim yang kita namakan program Nusantara Sehat (NS). Sedangkan penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui pendekatan keluarga juga terus diupayakan, ini yang kita sebut program Keluarga Sehat.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan TA 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Kesehatan. Berdasarkan kebijakan Kementerian Kesehatan sejak tahun 2016 Satker Tugas Pembantuan (TP), secara penganggaran dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA 2018 tidak lagi menyajikan anggaran yang berasal dari Satker Tugas Pembantuan.

Kementerian Kesehatan tahun 2018 memperoleh APBN sebesar Rp61.864.479.406.000,00 didistribusikan kepada 418 Satker meliputi:

- Kantor Pusat (KP) 48 Satker, Rp39.409.083.726.000,00
- Kantor Daerah (KD) 166 Satker, Rp21.352.452.980.000,00
- Dekonsentrasi (DK) 204 Satker, Rp1.102.942.700.000,00

Rincian Satuan kerja Kementerian Kesehatan tahun 2018 yang memperoleh APBN menurut jenis kewenangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14
Rekapitulasi Satker Menurut Eselon I

Kode Eselon I	Uraian	Jenis-Jenis Kewenangan						Jumlah Satker
		KP		KD		DK		
		M	BM	M	BM	M	BM	
01	Sekretariat Jenderal	13		0		34		47
02	Inspektorat Jenderal	1		0		0		1
03	Ditjen Kesmas	6		3		34		43
04	Ditjen Yankes	6		49		34		89
05	Ditjen P2P	6		59		34		99
07	Ditjen Farmalkes	6		0		34		40
11	Badan Litbang Kes	5		11		0		16
12	Badan PPSDM Kes	5		44		34		83
TOTAL		48	0	166	0	204	0	418

Ket: M = Melapor, BM = Belum Melapor

Selain Satker tersebut di atas, Kementerian Kesehatan masih memiliki Satker tidak aktif bersaldo sebanyak 976 Satker dan 1 (satu) Satker Konsolidasi.

A.4. Basis Akuntansi

Basic Akuntansi

Kementerian Kesehatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran*Dasar**Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Kesehatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi*Kebijakan**Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan menggunakan aplikasi e-Rekon-LK. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Untuk mencapai Laporan Keuangan yang berkualitas, seluruh Unit Akuntansi Instansi Kementerian Kesehatan agar melakukan pencatatan, pembukuan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan barang dengan berpedoman:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

215/PMK.05/2016;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
9. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-4383/PB/2018 tanggal 22 Mei 2018 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat UAKPA dan KPPN bulan April dan Mei 2018;
10. Surat Direktur Barang Milik Negara a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-3689/KN/2018 tanggal 08 Juni 2018 hal Implementasi Aplikasi e-Rekon & LK dalam Penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018;
11. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-9861/PB/2018 tanggal 28 Desember 2018 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2018 Unaudited serta perlakuan Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2018; dan
12. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-5/PB/2019 tanggal 4 Januari 2019 hal Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2018.

Selain berpedoman pada ketentuan di atas, untuk beberapa transaksi keuangan dan barang pada Kementerian Kesehatan telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang bersifat khusus antara lain:

1. Dana Jamkesmas

Untuk sisa dana Jamkesmas TA 2013 yang belum disetor ke Kas Negara telah disajikan dalam Laporan Keuangan **Satker Setditjen Bina Upaya Kesehatan** selaku pengelola DIPA.

Informasi sisa dana Jamkesmas TA 2013 yang belum disetor ke Kas Negara berupa (nama Institusi pemberi pelayanan kesehatan dan nilainya) diperoleh dari data rincian saldo pada Laporan Keuangan TA 2016 (Audited) yang pada tahun 2018 belum disetorkan ke Kas Negara atau dokumen sumber SSBP (sebagai bahan input) belum diterima pada Satker Setditjen BUK.

Satker penyalur dana Jamkesmas pada Satker Setditjen BUK dengan Kode Satker 466080, dan menyampaikan bukti setor SSBP atau kode billing dari aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), atas bukti setor tersebut diserahkan kepada Unit Eselon I untuk dilakukan rekonsiliasi dengan data SPAN pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan. Terhadap perbedaan antara data SPAN dan SAI maka Unit Eselon I dapat menggunakan data hasil rekonsiliasi sebagai bahan penelusuran dokumen sumber kepada pihak penyeter atau KPPN setempat. Hasilnya agar di-entry oleh Satker terkait.

Pengembalian Dana Jamkesmas Tahun 2013 dicatat sebagai setoran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) yang akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sebagai pendapatan non operasional.

2. Dana Gaji dan Insentif PTT

Dengan memperhatikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor: Per-29/PB/2007 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Insentif Pegawai Tidak Tetap, maka terhadap Gaji dan Insentif PTT untuk bulan Desember tahun berjalan yang telah dicairkan dari KPPN tetapi per 31 Desember belum dibayarkan pada tahun berjalan, harus dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan pada neraca.

Dalam hal terdapat gaji dan Insentif PTT tahun berjalan yang belum dibayarkan per 31 Desember karena belum diterbitkan SPM/SP2Dnya sehingga belum ada realisasi dari Kas Negara, maka Satker Biro Umum harus mencatat sebagai Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca. Belanja Pegawai YMH dibayar tersebut dicatat sebesar nilai terutang yang besarnya ditetapkan dan ditandatangani oleh KPA (Kepala Biro Umum).

3. Tunjangan Kinerja Pegawai

Dengan memperhatikan Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka terhadap Tunjangan Kinerja Pegawai untuk bulan Desember tahun berjalan, yang dananya telah dicairkan dari KPPN tetapi per 31 Desember belum dibayarkan pada tahun berjalan, harus dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan pada neraca.

Dalam hal terdapat Tunjangan Kinerja Pegawai tahun berjalan yang belum dibayarkan per 31 Desember, maka **Satker Biro Umum Setjen, dan/atau Satker Unit Eselon I terkait** harus mencatat sebagai Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca.

Belanja Pegawai YMH dibayar tersebut dicatat sebesar nilai terutang yang besarnya ditetapkan dan ditandatangani oleh KPA.

4. **Setoran PNBP yang Dilakukan oleh Satker dan Pihak Ketiga**

Setoran PNBP yang dilakukan oleh Satker dan Pihak ketiga merupakan pendapatan yang masih menjadi hak Kementerian Kesehatan. PNBP tersebut didasarkan pada bukti setor SSBP yang telah mendapat nomor validasi dari Bank Persepsi dengan penerbitan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2015, sedangkan mulai 1 Januari 2016 setoran menggunakan kode biling dari aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).

5. **Setoran Jasa Giro dan Pengembalian Dana Jamkesmas**

Seluruh PNBP atas Setoran Jasa Giro dan Pengembalian Dana Jamkesmas Tahun 2013, termasuk setoran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) dan setoran-setoran lainnya harus dicatat dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sebagai pendapatan non operasional. Satker penyalur dana Jamkesmas pada Satker Setditjen BUK dengan Kode Satker 466080, dan menyampaikan bukti setor SSBP atau kode biling dari aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), atas bukti setor tersebut diserahkan kepada Unit Eselon I untuk dilakukan rekonsiliasi dengan data SAU pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan.

6. **Pengembalian Gaji PTT**

Setoran pengembalian dana gaji Dokter/Bidan PTT, yang berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) maupun pengembalian belanja TA berjalan yang disetorkan oleh Dinas Kab/Kota/Dokter/Bidan PTT terkait, disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan menggunakan Kode Satker Biro Umum (465930). Untuk pengembalian belanja atas Dokter/Bidan PTT tahun berjalan yang disetorkan oleh Dinas Kab/Kota/Dokter/Bidan disetorkan dengan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan menggunakan Kode Satker Biro Umum (465930).

Dokumen SSBP maupun SSPB dan menyampaikan bukti setor SSBP atau kode biling dari aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dan disampaikan ke Satker Biro Umum untuk dibukukan sebagai "**Pendapatan Lain-lain**" atau "**Pengembalian Belanja**" pada LRA dan "**Pendapatan Non Operasional**" pada Laporan Operasional pada Laporan Keuangan Satker Biro Umum.

7. Satker Vertikal Pemungut PNBP dan Penggunaan Akun PNBP

Melakukan langkah-langkah penyelesaian antara lain:

- a. Satker Vertikal pemungut dan pengguna PNBP agar mencantumkan Estimasi Pendapatannya dalam DIPA. Apabila masih terdapat Satker yang belum mencantumkan Estimasi PNBP, segera melakukan revisi DIPA sesuai ketentuan melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.
- b. Memperhatikan Perdirjen Nomor PER-80/PB/2011, pendapatan BLU hasil pemanfaatan dana seperti bunga/jasa giro atas dana PNBP BLU, agar dicatat sebagai “Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Lainnya” pada akun “494911” yaitu Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU;
- c. Estimasi dan realisasi PNBP Satker Non BLU menggunakan akun “423 Pendapatan PNBP Lainnya”. Akun PNBP secara rinci (6 digit) dapat dilihat pada Lampiran tentang BAS “LRA”. Apabila masih terdapat transaksi PNBP yang belum tertampung pada BAS sesuai pedoman ini, agar dilihat pada tabel referensi dalam aplikasi SAIBA. Jika belum ada tabel referensi agar berkonsultasi dengan KPPN/Dit. APK/Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan.

8. Penyajian Saldo Piutang dalam Neraca

Berdasarkan jenisnya, Piutang dibedakan menjadi:

- a. Piutang PNBP berdasarkan pungutan pendapatan negara yang didukung adanya **Surat Penagihan**, meliputi:
 - 1) Piutang hasil pendapatan jasa pelayanan rumah sakit dan kesehatan lainnya;
 - 2) Piutang hasil pelayanan pendidikan;
 - 3) Piutang pendapatan Lainnya.
- b. Piutang PNBP berdasarkan perikatan, dalam bentuk pemanfaatan fasilitas/jasa milik Kementerian Kesehatan yang didukung **naskah perjanjian sewa-menyewa**, berupa:
 - 1) Penyewaan Gedung Kantor;
 - 2) Penyewaan Rumah Dinas.
- c. Piutang PNBP karena Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, yang didukung dengan bukti, berupa:
 - 1) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), untuk TP/TGR yang penyelesaiannya dilakukan secara damai;
 - 2) Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, untuk TP/TGR yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur pengadilan.

Terhadap TP-TGR yang belum didukung SKTJM atau Surat

Ketetapan, tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

9. Penyajian Saldo Utang dalam Neraca

- a. **Utang kepada pihak ketiga** adalah utang yang timbul dari kegiatan operasional (pelayanan rumah sakit dan kesehatan lainnya dan pelayanan pendidikan) terdiri dari Belanja yang harus dibayar, honor, dll. Utang kepada pihak ketiga dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diterima dari pihak ketiga tetapi belum dilakukan pembayaran. Pencatatan di neraca dilakukan secara periodik pada akhir periode pelaporan.
- b. **Pendapatan diterima dimuka** adalah merupakan penerimaan dari pihak lain (mahasiswa, pasien, vendor, STR dokter/dokter gigi/apoteker/bidan dll) sebagai pembayaran jasa tetapi Satker belum memberikan pelayanan. Pendapatan diterima dimuka dicatat sebesar nilai kas yang diterima tetapi belum memberikan barang/jasa kepada pihak lain. Pencatatan di Neraca dilakukan secara periodik pada akhir periode pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku (sampai sekarang masih pada akhir tahun saja).

Pada akhir periode pelaporan dilakukan penyesuaian untuk mencatat Pendapatan yang telah menjadi hak selama periode pelaporan untuk menyesuaikan jumlah Pendapatan Diterima di Muka yang masih ada sampai dengan akhir periode pelaporan.

10. Penatausahaan dan Penyisihan Piutang PNBPN

- a. Penatausahaan Piutang PNBPN agar mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
- b. Penyisihan Piutang PNBPN dilakukan terhadap nilai piutang yang disajikan dalam Neraca. Penyisihan Piutang PNBPN mengacu pada PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.
- c. Penagihan, penyisihan dan penghapusan piutang Kementerian Kesehatan mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/X/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Kementerian Kesehatan.

11. Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa yang diperoleh dari

Pihak Ketiga

Untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan, Satker penerima hibah langsung agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Hibah Langsung Uang/Barang/Jasa Satker Non BLU mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.**Hibah Uang:**

- 1) Penggunaan hibah langsung bentuk Uang/Barang/Jasa yang diterima dari pihak ketiga pengesahannya agar mengikuti ketentuan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;
- 2) Berdasarkan BAST maka satker melakukan penginputan secara manual dalam aplikasi SAIBA;
- 3) Setelah Disahkan, berdasarkan dokumen SP2HL dan SPHL yang sudah dientry maka akan terbentuk jurnal secara otomatis pada aplikasi SAIBA;
- 4) Dalam hal sampai dengan akhir tahun masih terdapat saldo hibah yang telah disahkan namun belum dipakai seluruhnya untuk membiayai pengeluaran maka di Buku Besar Akrual/Neraca akan muncul dalam aplikasi SAIBA;
- 5) Untuk sisa dana hibah berupa mata uang selain rupiah agar dikonversi dengan nilai rupiah menggunakan kurs tengah BI per tanggal pelaporan.

Hibah Barang:

- 1) Berdasarkan BAST dan register dari DJPU maka hibah barang diinput dalam aplikasi SAIBA;
- 2) Berdasarkan BAST dan register dari DJPU maka hibah barang diinput dalam aplikasi Persediaan/SIMAK BMN;
- 3) Berdasarkan Persetujuan MPHL BJS maka hibah barang diinput dalam aplikasi SAIBA.

Hibah Jasa:

- 1) Berdasarkan BAST dan register dari DJPU maka hibah jasa diinput dalam aplikasi SAIBA;
- 2) Berdasarkan Persetujuan MPHL BJS maka hibah jasa diinput dalam aplikasi SAIBA.

b. Hibah Uang/Barang/Jasa Satker BLU mengikuti ketentuan dalam pengelolaan BLU

1) Hibah berbentuk uang

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk uang mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU bukan sebagai pendapatan BA 999.02 (Pengelola Hibah) sehingga tidak perlu melakukan registrasi hibah kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Dalam hal BLU menggunakan pendapatan hibah tersebut untuk mendanai pengeluaran belanja, Satker BLU melakukan revisi DIPA (jika pagu atas belanja terkait sudah terlampaui, tidak ada atau kurang). Selanjutnya pendapatan dan realisasi belanja yang di danai dari hibah di cantumkan dalam surat SP3B dan disampaikan kepada KPPN untuk mendapat pengesahan menjadi SP2B.

2) Hibah berbentuk barang

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk Barang mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU dan tidak perlu melakukan revisi DIPA sesuai Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-6332/PB/2015 tanggal 28 Juli 2015 dan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran melainkan hanya dilaporkan dalam Laporan Operasional.

3) Hibah berbentuk Jasa

Satker BLU yang menerima hibah berbentuk Jasa mencatat hibah tersebut sebagai pendapatan Satker BLU dan tidak perlu melakukan revisi DIPA sesuai Surat Ditjen Perbendaharaan No. S-6332/PB/2015 tanggal 28 Juli 2015 dan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran melainkan hanya dilaporkan dalam Laporan Operasional.

12. Pengakuan, Pencatatan dan Pelaporan Barang Persediaan

- a. Pembukuan Persediaan yang diperoleh dari APBN dilakukan pada Aplikasi Persediaan-Sub Sistem SIMAK – BMN oleh Satker yang mengadakan persediaan;
- b. Pengalihan/Hibah BMN (Aset tetap dan Persediaan) Kemenkes kepada SKPD/pihak lain tanpa memperoleh penggantian mengacu pada PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- c. Penyerahan Pengalihan/hibah BMN (pengadaan pusat diserahkan ke daerah) tersebut dibuktikan dengan penandatanganan BAST sementara antara kedua belah pihak. BMN tersebut masih dicatat dan dilaporkan oleh Satker yang mengadakan/mengirimkan sampai dengan diterbitkannya persetujuan hibah dari Pengelola/Pengguna Barang dan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang;
- d. Setiap perubahan/mutasi BMN dan koreksi nilai BMN harus didasarkan BAST, dokumen kepemilikan, memo penyesuaian dan dokumen lainnya yang sah;

- e. Satker RS BLU dapat membukukan barang Persediaan Farmasi menggunakan Aplikasi Persediaan Farmasi selain Aplikasi Persediaan-SIMAK-BMN yang dikeluarkan oleh Kemenkeu;
- f. Pelaporan barang persediaan Satker RS BLU pada setiap periode pelaporan wajib disajikan melalui Aplikasi Persediaan, Aplikasi Penghubung (Bridging) dan SIMAK-BMN sesuai dengan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Nomor S-6575/PB/2017 tentang Tanggapan atas Permohonan Rekomendasi Penggunaan Aplikasi Penghubung (Bridging); dan
- g. Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual, ditetapkan terhadap semua satker untuk menggunakan metode harga perolehan terakhir dalam penilaian semua jenis persediaan. Metode harga perolehan terakhir ini telah diakomodasi oleh aplikasi persediaan yang digunakan dalam menyusun Laporan Keuangan sesuai surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1311/PB.06/2016 tentang Metode Penilaian dalam Rangka Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

13. Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Jika Satker mempunyai KDP berbentuk fisik, penghapusan KDP tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Dalam hal KDP yang tidak berbentuk fisik seperti: dokumen perencanaan, honor, dll, penghapusan KDP tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Pengelola Barang, cukup dengan surat pernyataan KPA yang menginformasikan bahwa pembangunan fisik tidak dilanjutkan lagi.

14. BMN pada Satuan Kerja yang tidak menerima DIPA pada TA berjalan (Satker Non Aktif)

Satker Sekretariat Ditjen/Sekretariat Badan dan Biro Keuangan dan BMN selaku penanggungjawab Unit Eselon I Setjen bertanggungjawab untuk melaporkan BMN yang berada pada Satker Non Aktif di lingkungan Unit Eselon I masing-masing.

15. BMN (Aset Tetap) BLU yang Masih Harus Dibayar

Sesuai dengan karakteristik BLU, Satker BLU dapat memperoleh aset tetap melalui utang. Jika Satker BLU memperoleh aset definitif melalui utang, aset tersebut dicatat sebagai aset BLU dan mengakui adanya utang.

Aset tetap BLU yang diperoleh dari utang disusutkan sejak aset tetap tersebut dimiliki/dikuasai oleh Satker BLU. Untuk itu Satker BLU ketika memperoleh aset tetap dimaksud memasukkan ke dalam aplikasi SIMAK BMN melalui menu transaksi BMN “pembelian” dengan menggunakan tanggal dan nomor BAST. Pencatatan aset tetap tersebut menyebabkan terjadinya selisih antara penambahan aset tetap dengan realisasi belanja modal pada periode pencatatan aset tetap maupun pada periode pembayaran utang. Perbedaan tersebut dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada saat pembayaran hutang, SP3B/SP2B yang diterbitkan oleh Satker BLU tidak perlu dimasukkan lagi ke SIMAK BMN.

16. Kerjasama Operasi/Kemitraan Satker BLU dengan Pihak Ketiga

Kerjasama Operasi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut. Kerjasama operasi tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Operasi.

17. Pencatatan BMN yang berasal dari DK/TP dan Dropping

Kebijakan Penatausahaan BMN terkait Satuan Kerja DK/TP dan Dropping per tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kemenkes Nomor KN.02.06/4/1070/2019 tanggal 21 Januari 2019 hal Revisi Surat Penyajian BMN DK/TP pada Laporan Keuangan Tahunan TA 2018 di lingkungan Kemenkes yaitu sebagai berikut:

- a. Penyajian BMN DK/TP dan Dropping mengikuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI KN.02.06/4/1070/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Revisi Surat Penyajian Aset DK/TP pada Laporan Keuangan Tahunan TA 208 di Lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu:
 - 1) Seluruh BMN DK/TP direklas ke dalam aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan;
 - 2) Memasukkan kembali BMN DK/TP ke dalam Neraca SAIBA yang sudah dikeluarkan pada tahun sebelumnya agar Neraca menjadi balance;
 - 3) BMN Dropping yang menggunakan akun belanja 53 penyajiannya mengikuti BMN DK/TP sesuai point a dan b, selanjutnya untuk BMN Dropping yang menggunakan akun belanja 526 (untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah) maka penyajiannya mengikuti PMK 181 Tahun 2016 pasal 47 dan pasal 48;
 - 4) Memastikan nilai ADK SIMAK BMN dan SAIBA selalu sama sehingga SAIBA tidak perlu jurnal.
- b. BMN Dropping sebagaimana tercantum pada point di atas yang menggunakan akun belanja 526 dikeluarkan dari neraca SAIBA dan SIMAK BMN apabila sudah ada usulan pemindahtanganan dari Satuan Kerja;
- c. Penyajian aset persediaan dengan BAST Barang mulai tanggal 29 November 2016 dan seterusnya tetap dicatat sebagai persediaan

(tidak mengikuti pasal 47 PMK 181 Tahun 2016);

- d. Transaksi reklasifikasi (Penghentian Penggunaan BMN) pada aplikasi SIMAK BMN dibukukan dengan tanggal antara 27 Desember s.d. 31 Desember 2018, dengan dasar pencatatan berpedoman pada Surat Sekretaris Jenderal Kemenkes Nomor KN.02.06/4/2723/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Keputusan Hasil Rapat Penatausahaan BMN;
- e. Setelah aplikasi SAIBA menerima ADK SIMAK BMN, petugas SAIBA melakukan jurnal penyesuaian untuk menyamakan saldo-saldo pada neraca SAIBA dan neraca SIMAK BMN;
- f. Seluruh jurnal penyesuaian pada SAIBA diberi tanggal 27 Desember s.d. 31 Desember 2018 dan harus dibuat memo penyesuaian. Khusus untuk Satuan Kerja In Aktif, memo penyesuaian dapat dibuat secara kolektif oleh setiap Eselon I dengan melampirkan rincian jurnal per satker dalam bentuk hardcopy dan ditandatangani oleh minimal Pejabat Eselon II.

18. Kebijakan Akuntansi Penyusutan Aset tetap dalam Neraca Kementerian Kesehatan

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Untuk aset yang dibeli dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni disusutkan selama satu semester pada Laporan Keuangan Semesteran, sedangkan untuk aset yang dibeli dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember disusutkan selama satu semester pada Laporan Keuangan

Tahunan.

19. Klaim Biaya Pelayanan

Selisih klaim biaya pelayanan kepada BPJS, Jamkesda, Asuransi, dan selisih klaim pasien Non PBI yang berpotensi tidak terbayar menimbulkan beban yang harus ditanggung rumah sakit sehingga tidak disajikan sebagai pendapatan, namun dicatat sebagai beban operasional Rumah Sakit (beban biasa) yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan- LRA

*Pendapatan -
LRA*

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

*Pendapatan -
LO*

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - 2) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa; dan
 - 3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- c. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan;
- d. Dalam rangka penggabungan Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU yang telah diubah dengan PMK Nomor 42/PMK.05/2017, sesuai dengan lampiran IV Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8533/PB/2017 tanggal 29 September 2017 bahwa eliminasi terhadap akun-akun timbal balik

(reciprocal accounts) dilakukan terhadap:

- 1) Pendapatan dari Alokasi APBN yang tersaji di LO; dan
 - 2) Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara yang tersaji di LO;
- e. Pendapatan dari Pelayanan BLU yang berasal dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga yang secara organisatoris membawahnya.

3. Belanja

Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
- c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

Beban

- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
- b. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- 2) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur

dengan andal.

- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Untuk piutang yang berasal dari pelayanan atas pasien BPJS pada Satker BLU dicatat sebesar nilai yang belum dibayar atas tagihan yang telah selesai diverifikasi oleh BPJS. Adapun tagihan yang belum selesai diverifikasi informasinya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Kualitas Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- 6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- 7) Persediaan BLU Rumah Sakit

Dengan terbitnya surat Dirjen Perbendaharaan nomor S261/PB/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal Penyampaian Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2015, maka Satker BLU di lingkup Kementerian Kesehatan dalam menilai persediaan BLU dapat diukur dengan menggunakan metode FIFO, Rata-Rata atau Harga Pembelian Terakhir.

Pengukuran Saldo Persediaan dan Beban Persediaan dapat menggunakan Aplikasi Persediaan maupun Sistem yang dibangun sendiri oleh BLU yang dapat mendukung

pengukuran nilai dan beban persediaan BLU secara andal.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- 1) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah;
- 4) Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai

penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan;

- 5) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya;
- 6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD;
- 7) Mengidentifikasi BMN untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, selanjutnya agar tidak disajikan dalam neraca setelah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- 4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Kewajiban

- 5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

f. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban pada Kementerian Kesehatan berupa kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas***g. Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Kesehatan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Perubahan berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Perubahan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Setelah Revisi

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan BLU (424)	11.433.601.101.000	11.433.601.101.000
Pendapatan PNBP Lainnya (425)	606.993.587.000	606.993.587.000
Jumlah Pendapatan	12.040.594.688.000	12.040.594.688.000
Belanja		
Belanja Pegawai	5.917.725.874.000	5.948.221.629.000
Belanja Barang	24.463.255.271.000	26.904.090.926.000
Belanja Modal	3.021.681.363.000	3.509.766.851.000
Belanja Bantuan Sosial	25.502.400.000.000	25.502.400.000.000
Jumlah Belanja	58.905.062.508.000	61.864.479.406.000

Sedangkan apabila dilihat dari program Kementerian Kesehatan maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Perubahan Pagu Anggaran Menurut Program Setelah Revisi

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	28.165.890.422.000	28.138.096.577.000
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	119.983.200.000	119.983.200.000
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	902.747.774.000	930.898.816.000
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2.092.299.707.000	2.114.745.619.000
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	15.212.290.183.000	17.204.700.290.000
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.723.272.501.000	3.378.571.989.000
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	4.939.243.306.000	5.086.359.848.000
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.749.335.415.000	4.891.123.067.000
Jumlah Belanja	58.905.062.508.000	61.864.479.406.000

Sedangkan apabila dilihat dari Sumber Dana Kementerian Kesehatan maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Perubahan Pagu Anggaran Menurut Sumber Dana Setelah Revisi
(dalam rupiah)

Sumber Dana	DIPA Awal	DIPA Revisi	Naik/Turun
Rupiah Murni	47.511.802.801.000	47.511.802.801.000	-
Pinjaman Luar Negeri	500.000.000	500.000.000	-
PNBP	461.171.334.000	471.803.633.000	10.632.299.000
Badan Layanan Umum	11.124.255.079.000	13.015.459.735.000	1.891.204.656.000
Hibah Langsung Luar Negeri	-	864.913.237.000	864.913.237.000
Total	59.097.729.214.000	61.864.479.406.000	2.766.750.192.000

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp12.013.839.152.925,00 atau mencapai 99,78 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp12.040.594.688.000,00. Rincian Perbandingan Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Estimasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan BLU	11.433.601.101.000	11.183.584.245.963	97,81
Pendapatan PNBP Lainnya	606.993.587.000	830.254.906.962	136,78
Jumlah	12.040.594.688.000	12.013.839.152.925	99,78

Perbandingan Estimasi Pendapatan PNBP Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 22
Rincian Estimasi Pendapatan PNBP TA 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	TA 2018	TA 2017	%
Akun 423 - PNBP Lainnya				
1	Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	151.094.344	(100,00)
2	Pendapatan Jasa	-	279.786.573.554	(100,00)
3	Pendapatan Pendidikan	-	307.919.652.000	(100,00)
4	Pendapatan Iuran dan Denda	-	6.000.000	(100,00)
5	Pendapatan Lain-lain	-	22.816.000	(100,00)
Sub total PNBP Lainnya		-	587.886.135.898	- 100,00
Akun 424 - Pendapatan BLU				
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	11.277.864.725.000	10.428.617.912.000	8,14
2	Pendapatan Hibah BLU	13.414.818.000	12.512.709.000	7,21
3	Pendapatan Hasil Kerja sama BLU	56.743.070.000	66.567.737.000	(14,76)
4	Pendapatan dari alokasi APBN	4.361.959.000	-	100,00
5	Pendapatan BLU Lainnya	81.216.529.000	75.565.133.000	7,48
Sub total Pendapatan BLU		11.433.601.101.000	10.583.263.491.000	8,03

No	Jenis Pendapatan	TA 2018	TA 2017	%
Akun 425 - Pendapatan PNBP Lainnya				
1	Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan iuran Badan	8.728.329.000	-	100,00
2	Pendapatan Administrasi dan penegakan hukum	58.533.623.000	-	100,00
3	Pendapatan Kesehatan, Sosial	227.166.876.000	-	100,00
4	Pendapatan Pendidikan Budaya Riset	312.560.018.000	-	100,00
5	Pendapatan Bunga	4.741.000	-	100,00
Sub total Pendapatan PNBP Lainnya		606.993.587.000	-	100,00
Total		12.040.594.688.000	11.171.149.626.898	10,56

Estimasi pendapatan PNBP TA 2018 sebesar Rp12.040.594.688.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp869.445.061.102,00 atau meningkat sebesar 10,56% dari estimasi pendapatan tahun yang lalu.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Pendapatan PNBP (*Netto*) TA 2018 dan TA 2017 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 23
Rincian Realisasi PNBP TA 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	TA 2018	TA 2017	%
Akun 423 - PNBP Lainnya				
1	Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	12.223.316.576	(100,00)
2	Pendapatan Jasa	-	474.383.572.374	(100,00)
3	Pendapatan Pendidikan	-	297.446.758.800	(100,00)
4	Pendapatan iuran dan Denda	-	14.676.757.783	(100,00)
5	Pendapatan Lain-lain	-	131.466.512.221	(100,00)
Sub total PNBP Lainnya		-	930.196.917.754	(100,00)
Akun 424 - Pendapatan BLU				
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	10.910.038.972.946	10.549.892.280.307	3,41
2	Pendapatan Hibah BLU	16.145.872.939	12.082.803.430	33,63
3	Pendapatan Hasil Kerja sama BLU	94.084.241.134	81.536.316.953	15,39
4	Pendapatan dari alokasi APBN	9.446.474.153	-	100,00
5	Pendapatan BLU Lainnya	153.868.684.791	132.101.067.232	16,48
Sub total Pendapatan BLU		11.183.584.245.963	10.775.612.467.922	3,79
Akun 425 - Pendapatan PNBP Lainnya				
1	Pendapatan Penjualan dan Sewa	18.595.512.429	-	100,00
2	Pendapatan Administrasi Hukum	87.685.754.374	-	100,00
3	Pendapatan Kesehatan, Sosial	363.512.781.629	-	100,00
4	Pendapatan Pendidikan Riset	294.043.393.976	-	100,00
5	Pendapatan Jasa Lainnya	294.423.000	-	100,00
6	Pendapatan Bunga Rekening	1.588.163.977	-	100,00
7	Pendapatan Denda	15.419.953.280	-	100,00

No	Jenis Pendapatan	31-Des-18	31-Des-17	%
8	Pendapatan Lain-lain	49.114.924.297	-	100,00
Sub Total Pendapatan PNBP Lainnya		830.254.906.962	-	100,00
Total		12.013.839.152.925	11.705.809.385.676	2,63

Realisasi Pendapatan PNBP TA 2018 sebesar Rp12.013.839.152.925,00 mengalami kenaikan sebesar Rp308.029.767.249,00 atau naik 2,63% dari realisasi pendapatan PNBP tahun lalu.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Kementerian Kesehatan pada TA 2018 adalah sebesar Rp57.348.657.406.677 atau 92,70% dari anggaran belanja sebesar Rp61.864.479.406.000. Anggaran dan Realisasi belanja TA 2018 tersaji sebagai berikut:

Tabel 24
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.948.221.629.000	5.016.492.763.916	84,34
Belanja Barang	26.904.090.926.000	23.989.406.062.646	89,17
Belanja Modal	3.509.766.851.000	2.850.715.434.115	81,22
Belanja Bantuan Sosial	25.502.400.000.000	25.492.043.146.000	99,96
Total Belanja	61.864.479.406.000	57.348.657.406.677	92,70

Terdapat Pagu Minus sebesar Rp627.399.400 terdiri dari:

- 02401.250003 Dinkes Prov Papua sebesar Rp9.838.000 terjadi karena adanya kelebihan pembayaran LS dan sudah disetorkan ke kas negara pada bulan Januari 2019; dan
- 02404.415602 BBLK Surabaya sebesar Rp617.561.400 terjadi karena tampilan E-Rekon eror sedangkan pada aplikasi SAIBA normal, atas kejadian ini sudah bersurat ke KPPN.

Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018 menurut Program tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 25
Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2018

(dalam rupiah)

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	28.138.096.577.000	27.435.612.133.630	97,50
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	119.983.200.000	113.594.977.605	94,68
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	930.898.816.000	828.488.248.709	89,00
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2.114.745.619.000	1.954.138.115.508	92,41

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	17.204.700.290.000	15.432.615.682.769	89,70
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.378.571.989.000	3.072.479.106.449	90,94
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	5.086.359.848.000	4.187.147.365.583	82,32
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.891.123.067.000	4.324.581.776.424	88,42
Total	61.864.479.406.000	57.348.657.406.677	92,70

Perbandingan Anggaran TA 2018 dan TA 2017 menurut Program masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 26
Anggaran menurut Program 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

No	Program	TA 2018	TA 2017	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	28.138.096.577.000	28.401.301.696.000	(0,93)
2	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	119.983.200.000	96.356.716.000	24,52
3	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	930.898.816.000	740.867.129.000	25,65
4	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2.114.745.619.000	1.683.826.592.000	25,59
5	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	17.204.700.290.000	17.086.570.699.000	0,69
6	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.378.571.989.000	3.115.503.948.000	8,44
7	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	5.086.359.848.000	3.367.598.652.000	51,04
8	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.891.123.067.000	4.622.078.405.000	5,82
Total		61.864.479.406.000	59.114.103.837.000	4,65

Perbandingan Realisasi Belanja (*Netto*) TA 2018 dan TA 2017 menurut program masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 27
Realisasi Belanja menurut Program TA 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

No	Program	TA 2018	TA 2017	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	27.435.612.133.630	27.101.093.635.064	1,23
2	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	113.594.977.605	91.260.793.981	24,47
3	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	828.488.248.709	637.518.138.839	29,96

No	Program	TA 2018	TA 2017	%
4	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1.954.138.115.508	1.583.592.382.628	23,40
5	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	15.432.615.682.769	15.233.039.402.922	1,31
6	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.072.479.106.449	2.897.361.307.742	6,04
7	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	4.187.147.365.583	3.337.118.449.598	25,47
8	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.324.581.776.424	4.031.297.395.133	7,28
Total		57.348.657.406.677	54.912.281.505.907	4,44

Menurut Jenis Belanja, rincian anggaran dan realisasi belanja masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini :

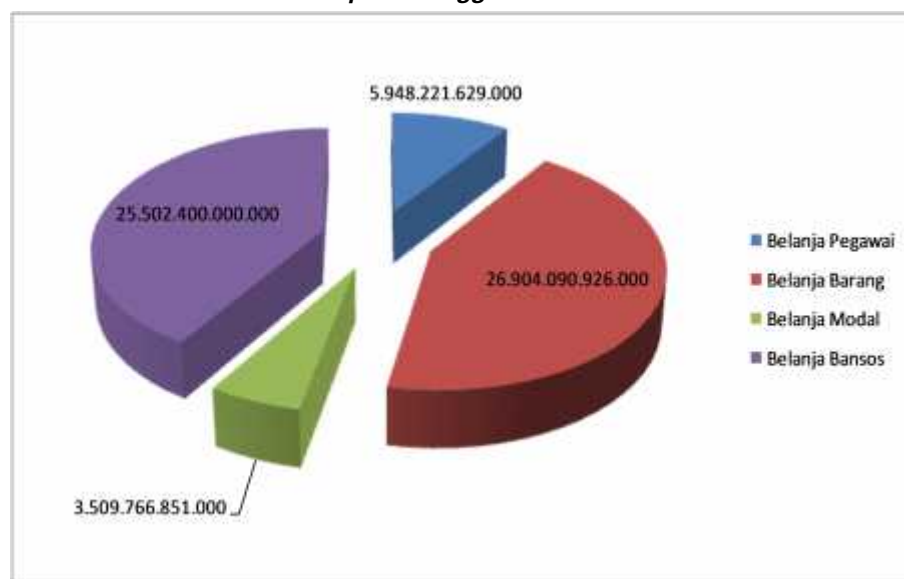
Tabel 28
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja TA 2018

(dalam rupiah)

Kode	Jenis Belanja	31 Desember 2018		%
		Alokasi	Realisasi	
51	Belanja Pegawai	5.948.221.629.000	5.016.492.763.916	84,34
52	Belanja Barang	26.904.090.926.000	23.989.406.062.646	89,17
53	Belanja Modal	3.509.766.851.000	2.850.715.434.115	81,22
57	Belanja Bantuan Sosial	25.502.400.000.000	25.492.043.146.000	99,96
Jumlah		61.864.479.406.000	57.348.657.406.677	92,70

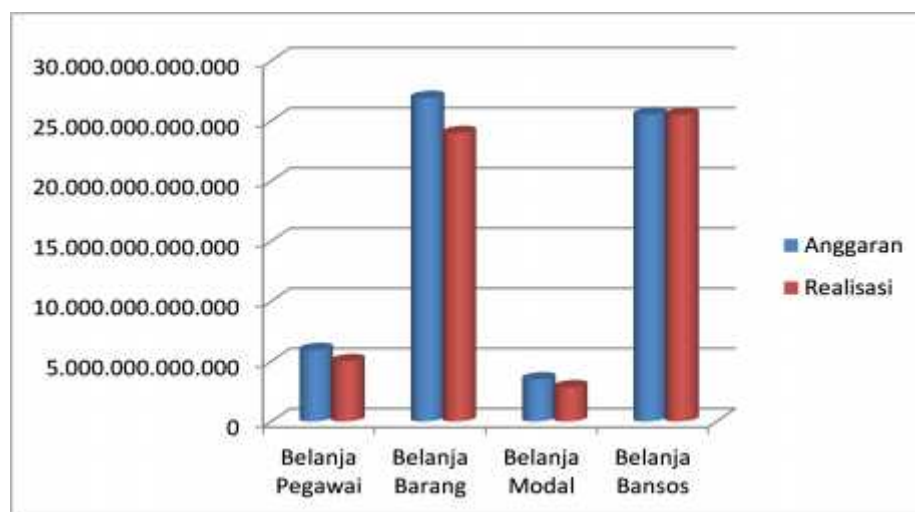
Komposisi anggaran menurut Jenis Belanja dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

Diagram 1
Komposisi Anggaran TA 2018



Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1
Anggaran dan Realisasi TA 2018



Perbandingan Anggaran TA 2018 dan TA 2017 menurut Jenis Belanja masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 29
Anggaran Menurut Jenis Belanja TA 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Alokasi		Kenaikan (Penurunan)
	TA 2018	TA 2017	
Belanja Pegawai	5.948.221.629.000	6.436.175.130.000	(487.953.501.000)
Belanja Barang	26.904.090.926.000	23.604.695.236.000	3.299.395.690.000
Belanja Modal	3.509.766.851.000	3.570.833.471.000	(61.066.620.000)
Belanja Bantuan Sosial	25.502.400.000.000	25.502.400.000.000	-
Jumlah	61.864.479.406.000	59.114.103.837.000	2.750.375.569.000

Perbandingan Realisasi Belanja (*Netto*) TA 2018 dan TA 2017 menurut Jenis Belanja masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30
Realisasi Belanja (Netto) TA 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	%
Belanja Pegawai	5.016.492.763.916	4.801.082.279.310	4,49
Belanja Barang	23.989.406.062.646	21.711.803.822.374	10,49
Belanja Modal	2.850.715.434.115	2.981.598.351.223	(4,39)
Belanja Bantuan Sosial	25.492.043.146.000	25.417.797.053.000	0,29
Jumlah	57.348.657.406.677	54.912.281.505.907	4,44

Rincian anggaran dan realisasi belanja masing-masing menurut Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 31
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018

(dalam rupiah)

BA - ES 1	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
02401 Setjen	Bel. Pegawai	1.612.448.852.000	1.011.728.033.084	62,74
	Bel. Barang	876.291.075.000	816.126.513.547	93,13
	Bel. Modal	146.956.650.000	115.714.440.999	78,74
	Ban.Sosial	25.502.400.000.000	25.492.043.146.000	99,96
02401 Total		28.138.096.577.000	27.435.612.133.630	97,50
02402 Itjen	Bel. Pegawai	41.445.124.000	39.259.502.723	94,73
	Bel. Barang	76.938.200.000	72.810.293.450	94,63
	Bel. Modal	1.599.876.000	1.525.181.432	95,33
02402 Total		119.983.200.000	113.594.977.605	94,68
02403 Ditjen Kesmas	Bel. Pegawai	72.214.923.000	66.126.394.544	91,57
	Bel. Barang	2.031.879.104.000	1.879.429.339.165	92,50
	Bel. Modal	10.651.592.000	8.582.381.799	80,57
02403 Total		2.114.745.619.000	1.954.138.115.508	92,41
02404 Ditjen Yankes	Bel. Pegawai	2.311.657.315.000	2.200.167.366.157	95,18
	Bel. Barang	12.676.622.213.000	11.503.900.857.430	90,75
	Bel. Modal	2.216.420.762.000	1.728.547.459.182	77,99
02404 Total		17.204.700.290.000	15.432.615.682.769	89,70
02405 Ditjen P2P	Bel. Pegawai	552.073.305.000	506.963.212.420	91,83
	Bel. Barang	2.478.459.110.000	2.252.798.615.719	90,90
	Bel. Modal	348.039.574.000	312.717.278.310	89,85
02405 Total		3.378.571.989.000	3.072.479.106.449	90,94
02407 Ditjen Farmalkes	Bel. Pegawai	36.958.796.000	33.097.503.555	89,55
	Bel. Barang	5.015.300.571.000	4.128.069.116.492	82,31
	Bel. Modal	34.100.481.000	25.980.745.536	76,19
02407 Total		5.086.359.848.000	4.187.147.365.583	82,32
02411 Balitbangkes	Bel. Pegawai	174.366.746.000	162.537.328.376	93,22
	Bel. Barang	688.203.054.000	603.080.533.195	87,63
	Bel. Modal	68.329.016.000	62.870.387.138	92,01
02411 Total		930.898.816.000	828.488.248.709	89,00
02412 BPPSDM Kes	Bel. Pegawai	1.147.056.568.000	996.613.423.057	86,88
	Bel. Barang	3.060.397.599.000	2.733.190.793.648	89,31
	Bel. Modal	683.668.900.000	594.777.559.719	87,00
02412 Total		4.891.123.067.000	4.324.581.776.424	88,42
Grand Total		61.864.479.406.000	57.348.657.406.677	92,70

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.016.492.763.916,00 dan Rp4.801.082.279.310,00 atau terjadi kenaikan sebesar 4,49% dari TA 2017.

Tabel 32
Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.430.394.138.298	3.421.198.630.724	0,27
Belanja Gaji Dokter PTT	143.441.868.160	349.048.423.545	(58,90)
Belanja Gaji Dan Tunjangan Non PNS	21.222.650	50.714.450	(58,15)
Belanja Honorarium	688.599.682.200	463.109.443.254	48,69
Belanja Lembur	40.780.068.693	38.234.231.590	6,66
Biaya Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	713.255.783.915	529.440.835.747	34,72
Jumlah Belanja	5.016.492.763.916	4.801.082.279.310	4,49

Penyebab kurang maksimalnya penyerapan belanja pegawai antara lain:

- a. Pengangkatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat yang tidak sesuai dengan target dan *timeline* rencana pengangkatan;
- b. Tidak terpenuhinya target pengangkatan CPNS Tahun 2018 sejumlah 1.000 orang tetapi terealisasi sejumlah 840 orang;
- c. Tidak terealiasinya alokasi Belanja Pegawai Transito yang diperuntukkan untuk Belanja Pegawai Kementerian;
- d. Tenaga Kesehatan PTT yang sudah tidak aktif/meninggal di daerah;
- e. Penerbitan dan pengiriman SK Penugasan Khusus Residen/Residen Senior melewati masa penugasan (terlambat) dan pengangkatan/penugasan tidak serentak/bertahap sehingga mengakibatkan pembayaran insentif Residen/Residen Senior yang tidak tepat waktu; dan
- f. Tidak terserapnya anggaran untuk tenaga kesehatan terdampak bencana sebesar Rp97.056.000.000,00 dikarenakan belum terbitnya izin prinsip pembayaran.

B.2.2 Belanja Barang

Belanja
Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp23.989.406.062.646,00 dan Rp21.711.803.822.374,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 10,49% dari Realisasi Belanja Barang TA 2017.

Tabel 33
Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	644.502.981.972	611.733.523.625	5,36
Belanja Barang Non Operasional	1.680.967.827.861	1.607.481.842.258	4,57
Belanja Barang Persediaan	620.654.191.372	978.510.845.224	(36,57)
Belanja Jasa	1.241.210.219.642	1.143.977.272.378	8,50
Belanja Pemeliharaan	411.088.906.721	300.453.229.328	36,82
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.666.178.462.242	2.362.971.031.287	12,83
Belanja Perjalanan Luar Negeri	196.786.328.215	191.170.270.346	2,94
Belanja Barang BLU	10.593.300.025.982	9.850.912.498.997	7,54
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	1.267.715.734.348	1.154.231.054.944	9,83
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	6.055.078.226	1.132.732.465	434,56
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	4.660.946.306.065	3.509.229.521.522	32,82
Jumlah Belanja	23.989.406.062.646	21.711.803.822.374	10,49

B.2.3 Belanja Modal

Belanja
Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.850.715.434.115,00 dan Rp2.981.598.351.223,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar 4,39% dibandingkan TA 2017.

Tabel 34
Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	5.869.552.020	22.285.300.251	(73,66)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	923.120.631.000	1.213.849.194.394	(23,95)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	959.823.952.416	759.036.241.813	26,45
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.306.506.782	13.492.425.970	(38,44)
Belanja Modal Lainnya	47.649.042.966	30.043.968.734	58,60
Belanja Modal BLU	905.945.748.931	942.891.220.061	(3,92)
Jumlah Belanja	2.850.715.434.115	2.981.598.351.223	(4,39)

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.869.552.020,00 dan Rp22.285.300.251,00. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Realisasi Belanja Modal Tanah (Netto) TA 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	4.314.969.680	17.627.805.981	(75,52)
Belanja Modal pembebasan Tanah	-	27.975.500	(100,00)
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	68.150.000	(100,00)
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	54.770.640	69.483.000	(21,17)
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	1.204.224.200	4.135.544.000	(70,88)
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	128.000.000	114.745.100	11,55
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	167.587.500	241.596.670	(30,63)
Jumlah Belanja Netto	5.869.552.020	22.285.300.251	(73,66)

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp923.120.631.000,00 dan Rp1.213.849.194.394,00.

Tabel 36
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	922.171.535.549	1.213.194.898.696	(23,99)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	203.974.895	153.378.445	32,99
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	130.907.500	(100,00)
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	18.293.000	109.268.253	(83,26)
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	146.252.066	260.741.500	(43,91)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan Mesin	580.575.490	0	100,00
Jumlah Belanja Netto	923.120.631.000	1.213.849.194.394	(23,95)

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp959.823.952.416,00 dan Rp759.036.241.813,00

Tabel 37
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2018	31 Des 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	846.836.830.884	650.487.831.546	30,18
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	2.127.707.347	2.042.878.167	4,15
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	18.305.273.645	22.651.644.305	(19,19)
Belanja Modal Perijinan Gedung dan Bangunan	0	195.000.000	(100,00)
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	980.083.381	891.841.460	9,89
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	91.574.057.159	82.767.046.335	10,64
Jumlah Belanja Netto	959.823.952.416	759.036.241.813	26,45

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jembatan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp8.306.506.782,00 dan Rp13.492.425.970,00.

Tabel 38
Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan TA 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.432.072.300	1.061.299.000	129,16
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan jembatan	42.024.450	-	100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	78.385.000	19.388.000	304,30
Belanja Modal Irigasi	3.551.649.995	74.016.470	4.698,46
Belanja Modal Jaringan	1.707.430.479	12.165.559.600	(85,97)
Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik

			(Turun) %
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	73.807.400	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	-	98.355.500	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	198.823.058	-	100,00
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	296.121.500	-	100,00
Jumlah Belanja	8.306.506.782	13.492.425.970	(38,44)

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp47.649.042.966,00 dan Rp30.043.968.734,00.

Tabel 39
Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	45.866.319.967	29.043.638.206	57,92
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	1.782.722.999	1.000.330.528	78,21
Jumlah Belanja Netto	47.649.042.966	30.043.968.734	58,60

B.2.3.6 Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU untuk TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp905.945.748.931,00 dan Rp942.891.220.061,00.

Tabel 40
Realisasi Belanja Modal BLU TA 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah BLU	3.584.130.946	555.407.050	545,32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	524.464.681.356	489.367.027.239	7,17
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	363.404.920.945	420.875.951.522	(13,66)
Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan BLU	8.535.965.167	9.383.307.839	(9,03)
Belanja Modal Lainnya BLU	5.956.050.517	22.709.526.411	(73,77)
Jumlah Belanja Netto	905.945.748.931	942.891.220.061	(3,92)

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

*Belanja
Bantuan
Sosial*

Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp25.492.043.146.000,00 dan Rp25.417.797.053.000,00. Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Kesehatan diperuntukkan untuk PBI (Program Bantuan Iuran).

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**ASET LANCAR**

Saldo aset lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp13.853.224.036.153,00 dan Rp8.746.078.521.705,00. Rincian aset lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, sebagai berikut:

Tabel 41
Daftar Aset Lancar
per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (penurunan)
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.659.565.736	1.320.666.799	338.898.937
Kas di Bendahara Penerimaan	849.108.715	218.677.700	630.431.015
Kas Lainnya dan Setara Kas	173.145.297.853	574.442.183.969	(401.296.886.116)
Kas pada Badan Layanan Umum	1.849.005.553.191	2.243.446.441.759	(394.440.888.568)
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	450.246.567.822	371.467.208.204	78.779.359.618
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	57.881.942.877	90.593.929.623	(32.711.986.746)
Uang Muka Belanja (prepayment)	-	9.566.508.000	(9.566.508.000)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	514.275.732	627.111.298	(112.835.566)
Piutang Bukan Pajak	30.317.031.629	41.694.452.251	(11.377.420.622)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(3.417.159.202)	(5.475.319.552)	2.058.160.350
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	542.781.764	1.394.732.983	(851.951.219)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(3.055.728)	(18.834.387)	15.778.659
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	2.871.565.020.544	2.366.739.177.023	504.825.843.521
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(433.986.407.112)	(400.120.822.790)	(33.865.584.322)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	12.766.764.474	13.165.815.819	(399.051.345)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(6.338.041.274)	(6.107.309.748)	(230.731.526)
Persediaan	8.848.474.789.132	3.443.123.902.754	5.405.350.886.378

Jumlah Aset Lancar	13.853.224.036.153	8.746.078.521.705	5.107.145.514.448
---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp5.107.145.514.448,00 atau sebesar 58,39% dengan kenaikan terbesar pada akun:

- Kas di Bendahara Penerimaan yang mengalami kenaikan sebesar Rp630.431.015,00; dan
- Persediaan yang mengalami kenaikan sebesar Rp5.405.350.886.378,00.

Secara rinci saldo masing-masing akun Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran*

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.659.565.736,00 dan Rp1.320.666.799,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.557.526.836	363.057.600	1.194.469.236
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	102.038.900	957.609.199	(855.570.299)
Jumlah	1.659.565.736	1.320.666.799	338.898.937

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Eselon I disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 43
Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Sekjen	29.189.079	82.894.000	(53.704.921)
Ditjen Kesmas	545.439.469	136.000	545.303.469
Ditjen Yankes	577.724.000	878.827.600	(301.103.600)
Ditjen P2P	322.505.088	102.742.199	219.762.889
Ditjen Farmalkes	64.629.250	-	64.629.250
BPPSDM Kes	120.078.850	256.067.000	(135.988.150)
Jumlah	1.659.565.736	1.320.666.799	338.898.937

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satker pada lampiran 1, dan

seluruhnya telah disetorkan ke kas negara pada bulan Januari 2019.

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan*

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar masing-masing Rp849.108.715,00 dan Rp218.677.700,00 yang meliputi saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada masing-masing Eselon 1, sebagai berikut:

Tabel 44
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

<i>Eselon I</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Kenaikan (Penurunan)</i>
Ditjen Yankes	849.108.715	177.717.700	671.391.015
Balitbangkes	-	140.000	(140.000)
BPPSDM Kes	-	40.820.000	(40.820.000)
Jumlah	849.108.715	218.677.700	630.431.015

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Satker pada lampiran 2, dan seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara pada bulan Januari 2019.

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Lainnya per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp173.145.297.853,00 dan Rp574.442.183.969,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP dan kas lainnya dapat berupa pengembalian belanja dan pendapatan bunga jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara, kas di BLU, dan kas dari hibah langsung. Sedangkan setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Kenaikan (Penurunan)</i>
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	11.519.246	-	11.519.246
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.895.998.154	120.806.011	1.775.192.143
Kas Lainnya di BLU	11.415.804.765	18.465.982.706	(7.050.177.941)
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	159.767.809.904	555.855.395.252	(396.087.585.348)

Setara Kas lainnya	54.165.784	-	54.165.784
Jumlah	173.145.297.853	574.442.183.969	(401.296.886.116)

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas pada masing-masing Eselon I, sebagai berikut:

Tabel 46
Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

<i>Eselon I</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Kenaikan (Penurunan)</i>
Setjen	1.792.591.845	33.456.183.398	(31.663.591.553)
Ditjen Kesmas	-	4.785.759.066	(4.785.759.066)
Ditjen Yankes	11.567.073.516	18.573.219.371	(7.006.145.855)
Ditjen P2P	141.825.890.160	467.487.340.729	(325.661.450.569)
Ditjen Farmalkes	15.549.988.777	44.543.100.673	(28.993.111.896)
Balitbangkes	2.401.379.309	5.595.476.427	(3.194.097.118)
BPPSDM Kes	8.374.246	1.104.305	7.269.941
Jumlah	173.145.297.853	574.442.183.969	(401.296.886.116)

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satker pada lampiran 3.

C.4 Kas pada BLU

*Kas pada
BLU*

Kas pada BLU per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.849.005.553.191,00 dan Rp2.243.446.441.759,00. Kas pada Badan Layanan Umum merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BLU. Kas pada BLU meliputi Kas dan Bank BLU, Kas dan Bank BLU belum disahkan, Surat Berharga BLU dan Setara Kas Lainnya BLU dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian Kas pada BLU
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Kenaikan (Penurunan)</i>
Kas dan Bank - BLU	1.522.556.929.004	1.645.339.317.533	(122.782.388.529)
Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	-	-	-
Setara kas Lainnya - BLU	326.448.624.187	598.107.124.226	(271.658.500.039)
Jumlah	1.849.005.553.191	2.243.446.441.759	(394.440.888.568)

Rincian Kas pada BLU pada Eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 48
Rincian Kas pada BLU Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

<i>Eselon I</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Kenaikan (Penurunan)</i>
Ditjen Yankes	1.552.733.858.432	1.980.633.333.436	(427.899.475.004)
BPPSDM Kes	296.271.694.759	262.813.108.323	33.458.586.436
Jumlah	1.849.005.553.191	2.243.446.441.759	(394.440.888.568)

Rincian Kas pada BLU per Satker pada lampiran 4.

C.5 Investasi Jangka Pendek pada BLU

*Investasi
Jangka
Pendek BLU*

Investasi Jangka Pendek pada BLU per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp450.246.567.822,00 dan Rp371.467.208.204,00. Investasi Jangka Pendek pada BLU merupakan Investasi Jangka Pendek yang dimaksudkan dalam rangka pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan Operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga maupun bagi hasil. Rincian Investasi Jangka Pendek pada BLU, disajikan sebagai berikut:

Tabel 49
Rincian Investasi Jangka Pendek BLU
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Deposito - BLU	297.746.567.822	323.552.208.204	(25.805.640.382)
Investasi Lainnya - BLU	152.500.000.000	47.915.000.000	104.585.000.000
Jumlah	450.246.567.822	371.467.208.204	78.779.359.618

Rincian Investasi Jangka Pendek pada BLU pada Eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 50
Investasi Jangka Pendek BLU per Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Ditjen Yankes	402.050.000.000	324.915.000.000	77.135.000.000
BPPSDM Kes	48.196.567.822	46.552.208.204	1.644.359.618
Jumlah	450.246.567.822	371.467.208.204	78.779.359.618

Rincian Investasi Jangka Pendek BLU per Satker pada lampiran 5.

C.6 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka*

Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp57.881.942.877,00 dan Rp90.593.929.623,00. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51
Rincian Belanja Dibayar di Muka
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Belanja Barang yang Dibayar di Muka (prepaid)	56.911.942.877	85.832.396.943	(28.920.454.066)
Belanja Modal Dibayar di	970.000.000	4.761.532.680	(3.791.532.680)

Muka (prepaid)			
Jumlah	57.881.942.877	90.593.929.623	(32.711.986.746)

Rincian Belanja Dibayar di Muka berdasarkan Eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 52
Belanja Dibayar di Muka Menurut Unit Eselon I
(dalam rupiah)

<i>Eselon I</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Kenaikan (Penurunan)</i>
Setjen	5.952.566.667	7.214.495.726	(1.261.929.059)
Ditjen Kesmas	-	2.726.723.950	(2.726.723.950)
Ditjen Yankes	1.142.535.942	4.976.890.245	(3.834.354.303)
Ditjen P2P	50.123.531.935	74.978.328.035	(24.854.796.100)
Balitbangkes	663.308.333	697.491.667	(34.183.334)
Jumlah	57.881.942.877	90.593.929.623	(32.711.986.746)

Rincian Belanja di Bayar di Muka per Satker pada lampiran 6.

C.7 Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp9.566.508.000,00. Uang Muka Belanja merupakan pengeluaran atas pembayaran sebagian nominal dari nilai transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga, dan merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat. Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2017 hanya terdapat pada unit Ditjen Yankes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53
Rincian Uang Muka Belanja Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Kenaikan (Penurunan)</i>
Uang Muka Belanja Modal (prepayment)	-	9.566.508.000	(9.566.508.000)
Jumlah	-	9.566.508.000	(9.566.508.000)

C.8 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp514.275.732,00 dan Rp627.111.298,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan Eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 54
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Menurut Unit Eselon 1
(dalam rupiah)

<i>Eselon I</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Kenaikan (Penurunan)</i>
Ditjen Yankes	295.503.815	349.462.622	(53.958.807)
Ditjen P2P	218.771.917	277.648.676	(58.876.759)
Jumlah	514.275.732	627.111.298	(112.835.566)

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Satker pada lampiran 7.

C.9 Piutang Bukan Pajak

Piutang

Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp30.317.031.629,00 dan Rp41.694.452.251,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Piutang PNBK pada Kementerian Kesehatan antara lain berasal dari piutang jasa layanan kesehatan, piutang jasa layanan pendidikan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55
Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	22.234.150.352	35.966.392.035	(13.732.241.683)
Piutang Lainnya	8.082.881.277	5.728.060.216	2.354.821.061
Jumlah	30.317.031.629	41.694.452.251	(11.377.420.622)

Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I disajikan, sebagai berikut:

Tabel 56
Piutang Bukan Pajak Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Setjen	13.977.309	12.467.608	1.509.701
Ditjen Kesmas	-	16.431.600	(16.431.600)
Ditjen Yankes	22.516.851.047	30.443.334.079	(7.926.483.032)
Ditjen P2P	2.056.369.084	5.077.729.242	(3.021.360.158)
Ditjen Farmalkes	1.593.130.596	2.582.627.183	(989.496.587)
Balitbangkes	-	91.056.839	(91.056.839)
BPPSDM Kes	4.136.703.593	3.470.805.700	665.897.893
Jumlah	30.317.031.629	41.694.452.251	(11.377.420.622)

Rincian Piutang Bukan Pajak per Satker pada lampiran 8.

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan

Piutang

Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar (Rp3.417.159.202,00) dan (Rp5.475.319.552,00). Penyisihan Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBK	(2.242.944.975)	(4.211.301.822)	1.968.356.847
Penyisihan Piutang Tidak	(1.174.214.227)	(1.264.017.730)	89.803.503

Tertagih - Piutang Lainnya			
Jumlah	(3.417.159.202)	(5.475.319.552)	2.058.160.350

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Piutang Bukan Pajak per Eselon I disajikan, sebagai berikut:

Tabel 58
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak per Eselon 1
(dalam rupiah)

<i>Eselon I</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Kenaikan (Penurunan)</i>
Setjen	(69.887)	(62.338)	(7.549)
Ditjen Kesmas	-	(82.158)	82.158
Ditjen Yankes	(2.255.431.891)	(1.871.073.771)	(384.358.120)
Ditjen P2P	(1.133.008.252)	(3.573.378.924)	2.440.370.672
Ditjen Farmalkes	(7.965.653)	(12.913.136)	4.947.483
Balitbangkes	-	(455.284)	455.284
BPPSDM Kes	(20.683.519)	(17.353.941)	(3.329.578)
Jumlah	(3.417.159.202)	(5.475.319.552)	2.058.160.350

C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp542.781.764,00 dan Rp1.394.732.983,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59
Rincian Bagian Lancar TP/TGR Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Kenaikan (Penurunan)</i>
Bagian Lancar Tagihan TP	358.606.423	565.572.959	(206.966.536)
Bagian Lancar Tagihan TGR	180.575.341	825.560.024	(644.984.683)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	3.600.000	3.600.000	-
Jumlah	542.781.764	1.394.732.983	(851.951.219)

Rincian TP/TGR untuk masing-masing Eselon I disajikan, sebagai berikut:

Tabel 60
Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon 1
(dalam rupiah)

<i>Eselon I</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Kenaikan (Penurunan)</i>
Setjen	301.712.203	486.767.860	(185.055.657)
Ditjen Kesmas	138.575.341	470.277.494	(331.702.153)
Ditjen Yankes	3.600.000	54.600.000	(51.000.000)
Ditjen P2P	-	206.816.029	(206.816.029)
Ditjen Farmalkes	-	28.728.000	(28.728.000)

BPPSDM	98.894.220	147.543.600	(48.649.380)
Jumlah	542.781.764	1.394.732.983	(851.951.219)

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan
Piutang -
Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar (Rp3.055.728,00) dan (Rp18.834.387,00). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR
per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP	(1.793.032)	(3.875.712)	2.082.680
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TGR	(902.696)	(14.598.675)	13.695.979
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	(360.000)	(360.000)	-
Jumlah	(3.055.728)	(18.834.387)	15.778.659

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR untuk masing-masing Eselon I disajikan, sebagai berikut:

Tabel 62
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR
Meurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Setjen	(1.508.561)	(2.433.840)	925.279
Ditjen Kesmas	(692.696)	(13.940.685)	13.247.989
Ditjen Yankes	(360.000)	(615.000)	255.000
Ditjen P2P	-	(963.504)	963.504
Ditjen Farmalkes	-	(143.640)	143.640
BPPSDM Kes	(494.471)	(737.718)	243.247
Jumlah	(3.055.728)	(18.834.387)	15.778.659

C.13 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Piutang dari
Kegiatan
Operasional
BLU

Piutang Kegiatan Operasional BLU merupakan hak tagih atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.871.565.020.544,00 dan Rp2.366.739.177.023,00. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU yang terdapat di Kementerian Kesehatan merupakan piutang

atas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Ditjen Yankes dan pelayanan pendidikan yang dikelola oleh BPPSDM Kesehatan.

Tabel 63
Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	2.870.985.022.544	2.365.865.825.804	505.119.196.740
Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	564.558.000	872.301.219	(307.743.219)
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	15.440.000	1.050.000	14.390.000
Jumlah	2.871.565.020.544	2.366.739.177.023	504.825.843.521

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing Eselon I disajikan, sebagai berikut:

Tabel 64
Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Ditjen Yankes	2.870.987.962.544	2.365.866.875.804	505.121.086.740
BPPSDM Kes	577.058.000	872.301.219	(295.243.219)
Jumlah	2.871.565.020.544	2.366.739.177.023	504.825.843.521

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Satker pada lampiran 9.

C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Penyisihan
Piutang tak
Tertagih –
Piutang dari
Kegiatan
Operasional
BLU

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Operasional BLU merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Operasional BLU per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar (Rp433.986.407.112,00) dan (Rp400.120.822.790,00).

Tabel 65
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Operasional BLU
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	(433.977.650.262)	(400.057.651.524)	(33.919.998.738)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(8.679.650)	(63.166.016)	54.486.366

Penyisihan Tidak Tertagih dari Operasional BLU	Piutang - Piutang dari Kegiatan Lainnya	(77.200)	(5.250)	(71.950)
Jumlah		(433.986.407.112)	(400.120.822.790)	(33.865.584.322)

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing Eselon I disajikan, sebagai berikut:

Tabel 66
Rincian Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Ditjen Yankes	(433.977.664.962)	(400.057.656.774)	(33.920.008.188)
BPPSDM Kes	(8.742.150)	(63.166.016)	54.423.866
Jumlah	(433.986.407.112)	(400.120.822.790)	(33.865.584.322)

C.15 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU merupakan hak tagih atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp12.766.764.474,00 dan Rp13.165.815.819,00 pada Ditjen Yankes dan BPPSDM Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67
Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Piutang Sewa Tanah - BLU	300.650.000	45.000.000	255.650.000
Piutang Sewa Gedung - BLU	72.513.705	962.681.860	(890.168.155)
Piutang Sewa Ruang - BLU	1.046.758.426	700.493.679	346.264.747
Piutang Sewa Lainnya - BLU	-	30.000.000	(30.000.000)
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	11.346.842.343	11.427.640.280	(80.797.937)
Jumlah	12.766.764.474	13.165.815.819	(399.051.345)

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU untuk masing-masing Eselon I disajikan, sebagai berikut:

Tabel 68
Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Ditjen Yankes	12.760.564.474	13.165.815.819	(405.251.345)
BPPSDM Kes	6.200.000	-	6.200.000
Jumlah	12.766.764.474	13.165.815.819	(399.051.345)

C.16 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Operasional BLU merupakan

Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU – estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Non Operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar (Rp6.338.041.274,00) dan (Rp6.107.309.748,00) pada Ditjen Yankes dan BPPSDM Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU	(278.172.950)	(225.000)	(277.947.950)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung BLU	(1.377.084)	(356.052.473)	354.675.389
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangannya BLU	(433.906.039)	(245.039.085)	(188.866.954)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Lainnya BLU	-	(510.000)	510.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	(5.624.585.201)	(5.505.483.190)	(119.102.011)
Jumlah	(6.338.041.274)	(6.107.309.748)	(230.731.526)

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU untuk masing-masing Eselon I disajikan, sebagai berikut:

Tabel 70
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Ditjen Yankes	(6.338.010.274)	(6.107.309.748)	(230.700.526)
BPPSDM Kes	(31.000)	-	(31.000)
Jumlah	(6.338.041.274)	(6.107.309.748)	(230.731.526)

C.17 Persediaan

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp8.848.474.789.132,00 dan Rp3.443.123.902.754,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71
Rincian Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Barang Konsumsi	156.903.621.647	136.028.281.908	20.875.339.739
Bahan untuk Pemeliharaan	24.563.546.309	25.988.358.395	(1.424.812.086)
Suku Cadang	67.126.075.044	103.980.715.161	(36.854.640.117)
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.414.174.264.279	1.264.491.345.324	149.682.918.955
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.202.010.450	1.148.232.000	53.778.450
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.340.822.020	471.129.122	1.869.692.898
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	5.945.775.035.601	525.783.880.509	5.419.991.155.092
Bahan Baku	71.855.288.557	100.253.652.472	(28.398.363.915)
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	5.591.441.863	9.281.879.393	(3.690.437.530)
Persediaan Lainnya	1.158.942.683.362	1.275.696.428.470	(116.753.745.108)
Jumlah	8.848.474.789.132	3.443.123.902.754	5.405.350.886.378

Rincian Persediaan berdasarkan Eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 72
Persediaan Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan (Penurunan)
Setjen	7.767.607.816	15.101.426.982	(7.333.819.166)
Itjen	497.920.865	179.714.380	318.206.485
Ditjen Kesmas	1.068.802.443.870	172.208.002.948	896.594.440.922
Ditjen Yankes	992.739.058.366	1.038.866.419.106	(46.127.360.740)
Ditjen P2P	3.554.632.978.571	2.071.455.909.433	1.483.177.069.138
Ditjen Farmalkes	3.265.663.802.850	111.825.812.943	3.153.837.989.907
Balitbangkes	5.138.358.506	5.321.136.316	(182.777.810)
BPPSDM Kes	29.222.990.184	28.165.480.646	1.057.509.538
Konsolidasi	(75.990.371.896)	-	(75.990.371.896)
Jumlah	8.848.474.789.132	3.443.123.902.754	5.405.350.886.378

Rincian Persediaan per Satker pada lampiran 10.

Terdapat barang Persediaan dalam kondisi rusak/usang dan tidak dikuasai serta tidak disajikan dalam neraca per tanggal 31 Desember 2018. Persediaan rusak sebesar Rp8.563.342.958,00 dan persediaan usang sebesar Rp20.608.450.004,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73
Persediaan dalam Kondisi Usang dan Rusak Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

No	Eselon I	Kondisi Rusak	Kondisi Usang
1	Setjen	1.784.649.300	313.485.600
2	Itjen	-	-
3	Ditjen Kesmas	2.156.000	-
4	Ditjen Yankes	1.483.435.319	4.769.709.162
5	Ditjen P2P	5.279.850.332	3.520.304.995
6	Ditjen Farmalkes	593.007	11.136.921.105
7	Balitbangkes	12.659.000	846.310.567
8	BPPSDM Kes	-	21.718.575
	TOTAL	8.563.342.958	20.608.450.004

ASET TETAP

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp34.966.810.803.340,00 dan Rp38.797.668.708.393,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, sebagai berikut:

Tabel 74
Rincian Aset Tetap (BMN) 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Tanah	15.404.565.123.149	15.781.343.836.355	(2,39)
Peralatan dan Mesin	19.931.915.819.977	30.298.593.008.907	(34,22)
Gedung dan Bangunan	13.574.335.256.508	14.264.231.925.068	(4,84)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	659.140.096.700	675.062.859.576	(2,36)
Aset Tetap Lainnya	180.330.322.376	253.351.060.234	(28,82)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.148.494.656.000	3.379.500.085.896	(6,84)
Akumulasi Penyusutan	(17.931.970.471.370)	(25.854.414.067.643)	(30,64)
Jumlah Aset Tetap	34.966.810.803.340	38.797.668.708.393	(9,87)

Saldo Aset Tetap 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.830.857.905.053,00 atau turun sebesar 9,87%.

Secara rinci saldo masing-masing akun Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

*Tanah***C.18 Tanah**

Tanah yang dimiliki Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp15.404.565.123.149,00 dan Rp15.781.343.836.355,00.

Mutasi total Aset Tetap Tanah Kementerian Kesehatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 75
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Nilai Tanah
(dalam rupiah)

Saldo Awal SAIBA		15.781.343.836.355
Penambahan		
100	Saldo Awal	12.630.000.000
101	Pembelian	3.348.900.000
102	Transfer Masuk	20.558.000.000
103	Hibah (Masuk)	955.714.498
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4.573.851.180
107	Reklasifikasi Masuk	2.086.494.983
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	45.435.720.100
202	Pengembangan Nilai Aset	31.372.640
208	Pengembangan Melalui KDP	2.483.094.546
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	46.171.000
225	Koreksi Kesalahan input IP	1.000

	TOTAL	92.149.319.947
Pengurangan		
120	Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	(15.539.225.000)
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(367.695.418.210)
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	(46.172.000)
301	Penghapusan	(17.333.834.000)
302	Transfer Keluar	(20.708.000.000)
303	Hibah (Keluar)	(4.500.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(2.145.094.983)
305	Koreksi Pencatatan	(20.068.860)
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(45.435.720.100)
	TOTAL	(468.928.033.153)
Saldo Akhir SAIBA		15.404.565.123.149
Saldo Akhir SIMAK		64.211.038.877.289
Selisih		(48.806.473.754.140)

Terdapat selisih antara SIMAK-BMN dengan SAIBA sebesar Rp48.806.473.754.140,00 karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, hasil revaluasi seharusnya disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2018. Namun sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-35/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN), maka hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP Tahun 2018. Hasil Penilaian Kembali BMN akan disajikan setelah dilakukan perbaikan.

Dari aset tetap tanah yang disajikan tersebut terdapat beberapa hal berikut:

- a. Terdapat 135 bidang tanah seluas 1.396.808 m² dengan nilai Rp3.079.999.443.912,00 belum bersertifikat a.n. Kementerian Kesehatan.
- b. Terdapat tanah seluas 334.022 m² yang disajikan sebagai aset tetap Kementerian Kesehatan yang juga dicatat oleh beberapa pihak, diantaranya:
 - 1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) seluas 7.680 m²
 - 2) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dhi. RSUD Dr. Soetomo seluas 183.631 m²
 - 3) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Ristek Dikti dhi. Universitas Hasanuddin seluas 134.246 m²
 - 4) Dinas Kesehatan Pemprov Jabar seluas 8.465 m²

Kementerian Kesehatan dengan pihak terkait sedang melakukan koordinasi untuk penyelesaian pencatatan atas obyek aset tetap tanah yang sama.

Selain hal tersebut, terdapat 150 bidang tanah seluas 1.023.223,30 m² yang sudah bersertifikat a.n Departemen Kesehatan masih dalam proses penelusuran oleh Kementerian Kesehatan dengan pihak-pihak terkait yaitu Pemerintah Daerah dan BPKP untuk melengkapi data-data pendukung dalam rangka penyajian.

C.19 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp19.931.915.819.977,00 dan Rp30.298.593.008.907,00.

Mutasi total Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kementerian Kesehatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 76
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Awal SAIBA		30.298.593.008.907
Penambahan		
100	Saldo Awal	59.160.609.827
101	Pembelian	1.335.537.934.607
102	Transfer Masuk	161.852.582.366
103	Hibah (Masuk)	91.054.613.827
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	109.037.958.895
107	Reklasifikasi Masuk	369.482.603.215
112	Perolehan Lainnya	11.187.000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	185.087.674.433
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	3.226.343.252
202	Pengembangan Nilai Aset	13.467.486.855
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	308.936.439
208	Pengembangan Melalui KDP	836.897.851
209	Transaksi Normalisasi BMN	3.159.473.850
	TOTAL	2.332.224.302.417
Pengurangan		
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(10.829.815.726.453)
301	Penghapusan	(12.332.256.898)
302	Transfer Keluar	(162.456.858.666)
303	Hibah (Keluar)	(1.448.326.521.481)
304	Reklasifikasi Keluar	(239.857.427.052)
305	Koreksi Pencatatan	(5.495.976.297)
306	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(604.274.500)
308	Usulan Barang Hilang ke Pengelola	(12.450.000)
	TOTAL	(12.698.901.491.347)
Saldo Akhir SAIBA		19.931.915.819.977
Saldo Akhir SIMAK		19.931.915.819.977
Selisih		-

C.20 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp13.574.335.256.508,00 dan Rp14.264.231.925.068,00.

Mutasi total Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kementerian Kesehatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 77
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Saldo Awal SAIBA		14.264.231.925.068
Penambahan		
100	Saldo Awal	1.423.024.000
101	Pembelian	2.283.939.478
102	Transfer Masuk	112.667.733.247
103	Hibah (Masuk)	4.181.134.560
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.028.436.474.110
107	Reklasifikasi Masuk	832.681.823.540
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	2.903.322.538
120	Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	44.477.511.000
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	2.377.156.303
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	153.910.096.771
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	10.844.956.000
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	78.127.507.190
202	Pengembangan Nilai Aset	54.811.238.767
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	282.256.142.605
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	17.832.227.359
208	Pengembangan Melalui KDP	311.362.930.622
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	59.105.434
225	Koreksi Kesalahan input IP	110.856.402
	TOTAL	2.940.747.179.926
Pengurangan		
158	Perolehan Aset Kemitraan dari Reklasifikasi Aset Tetap	(305.364.000)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(1.955.510.418.533)
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(51.614.283.275)
209	Transaksi Normalisasi BMN	(18.064.000)
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	(281.841.273.805)
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	(584.830.636)
301	Penghapusan	(4.123.629.000)
302	Transfer Keluar	(112.819.393.247)
303	Hibah (Keluar)	(96.910.523.400)
304	Reklasifikasi Keluar	(904.121.455.008)
305	Koreksi Pencatatan	(111.304.589.912)
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(6.091.881.103)
333	Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	2.012.556.172
399	Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya	(107.410.698.739)
	TOTAL	(3.630.643.848.486)
Saldo Akhir SAIBA		13.574.335.256.508
Saldo Akhir SIMAK		14.513.297.021.169
Selisih		(938.961.764.661)

Terdapat selisih antara SIMAK-BMN dengan SAIBA sebesar Rp938.961.764.661,00 karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, hasil revaluasi seharusnya disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2018. Namun

sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-35/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN), maka hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP Tahun 2018. Hasil Penilaian Kembali BMN akan disajikan setelah dilakukan perbaikan.

C.21 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp659.140.096.700,00 dan Rp675.062.859.576,00.

Mutasi total Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Kementerian Kesehatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 78
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Awal SAIBA		675.062.859.576
Penambahan		
100	Saldo Awal	1.299.308.000
101	Pembelian	7.867.685.660
102	Transfer Masuk	671.107.500
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	16.918.160.103
107	Reklasifikasi Masuk	12.554.807.037
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	247.520.200
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	3.953.926.967
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2.084.067.543
202	Pengembangan Nilai Aset	2.721.281.894
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	2.098.367.249
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	18.029.556.923
208	Pengembangan Melalui KDP	8.150.170.800
225	Koreksi Kesalahan input IP	3.855.000
	TOTAL	76.599.814.876
Pengurangan		
120	Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	(10.265.216.000)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(51.897.589.447)
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	(18.029.556.923)
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	(3.855.000)
302	Transfer Keluar	(744.167.720)
303	Hibah (Keluar)	(5.419.220.200)
304	Reklasifikasi Keluar	(2.200.629.160)
305	Koreksi Pencatatan	(3.104.029.135)
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(326.078.000)
333	Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	(532.236.167)
	TOTAL	(92.522.577.752)
Saldo Akhir		659.140.096.700
Saldo Akhir SIMAK		575.175.485.574
Selisih		83.964.611.126

Terdapat selisih antara SIMAK-BMN dengan SAIBA sebesar Rp83.964.611.126,00 karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, hasil

revaluasi seharusnya disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2018. Namun sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-35/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN), maka hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP Tahun 2018. Hasil Penilaian Kembali BMN akan disajikan setelah dilakukan perbaikan.

C.22 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp180.330.322.376,00 dan Rp253.351.060.234,00.

Tabel 79
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Awal SAIBA		253.351.060.234
Pengurangan		
100	Saldo Awal	336.371.000
101	Pembelian	18.134.952.407
102	Transfer Masuk	1.801.465.074
103	Hibah (Masuk)	305.664.726
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	27.437.325.765
107	Reklasifikasi Masuk	3.233.489.000
209	Transaksi Normalisasi BMN	1.387.500
	TOTAL	51.250.655.472
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(87.636.244.587)
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(930.308)
302	Transfer Keluar	(17.878.467.433)
303	Hibah (Keluar)	(2.566.936.334)
304	Reklasifikasi Keluar	(15.294.988.628)
305	Koreksi Pencatatan	(893.826.040)
	TOTAL	(124.271.393.330)
Saldo Akhir SAIBA		180.330.322.376
Saldo Akhir SIMAK		172.501.223.804
Selisih		7.829.098.572

Selisih tersebut merupakan hasil pengadaan satker pusat yang sudah diserahkan kepada SKPD sehingga dikeluarkan dari Neraca SAIBA tetapi masih dicatat dalam SIMAK-BMN.

C.23 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.148.494.656.000,00 dan Rp3.379.500.085.896,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.24 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp17.931.970.471.370,00) dan (Rp25.854.414.067.643,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan

KDP.

Tabel 80
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	19.931.915.819.977	(14.702.932.779.488)	5.228.983.040.489
Gedung dan Bangunan	13.574.335.256.508	(2.903.594.715.702)	10.670.740.540.806
Jalan, Irigasi dan Jaringan	659.140.096.700	(322.164.666.134)	336.975.430.566
Aset Tetap Lainnya	180.330.322.376	(3.278.310.046)	177.052.012.330
Akm. Penyusutan	34.345.721.495.561	(17.931.970.471.370)	16.413.751.024.191

PIUTANG JANGKA PANJANG

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp7.353.632.283,00 dan Rp7.390.847.640,00. Rincian Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, sebagai berikut :

Tabel 81
Daftar Piutang Jangka Panjang Tahun 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	7.253.197.678	7.228.460.378	0,34
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(285.215.364)	(172.208.207)	65,62
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (<i>Netto</i>)	6.967.982.314	7.056.252.171	(1,25)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	1.589.959.220	1.677.890.220	(5,24)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	(1.387.737.418)	(1.444.347.918)	(3,92)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU (<i>Netto</i>)	202.221.802	233.542.302	(13,41)
Piutang Jangka Panjang lainnya	276.560.972	101.560.972	172,31
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Jangka Panjang Lainnya	(93.132.805)	(507.805)	18.240,27
Piutang Jangka Panjang lainnya (<i>Netto</i>)	183.428.167	101.053.167	81,52
Jumlah Piutang Jangka Panjang	7.353.632.283	7.390.847.640	(0,50)

Saldo Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp37.215.357,00 atau menurun sebesar 0,50%.

Secara rinci saldo masing-masing akun Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

C.25 Piutang Tagihan TP/TGR

Piutang
Tagihan
TP/TGR

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp7.253.197.678,00 dan Rp7.228.460.378,00. Tagihan TP adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan TGR adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian lebih lanjut terkait Piutang Tagihan TP/TGR sebagai berikut :

Tabel 82
Tagihan TP/TGR Tahun 2018 dan 2017 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

<i>Eselon I</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Naik/ (Turun) %</i>
Setjen	400.933.061	361.646.781	10,86
Ditjen Kesmas	787.847.889	583.467.133	35,03
Ditjen Yankes	143.420.000	102.570.000	39,83
Ditjen P2P	909.871.592	1.037.087.108	(12,27)
Ditjen Farmalkes	-	45.521.000	(100,00)
BPPSDM Kes	5.011.125.136	5.098.168.356	(1,71)
Jumlah	7.253.197.678	7.228.460.378	0,34

C.26 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP /TGR

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih-
Tagihan
TP/TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah (Rp285.215.364,00) dan (Rp172.208.207,00). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel 83
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan TP/TGR Tahun 2018 dan 2017 Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

<i>Eselon I</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Naik/ (Turun) %</i>
Setjen	(66.310.701)	(66.174.269)	0,21
Ditjen kesmas	(65.715.642)	(54.629.294)	20,29
Ditjen Yankes	(22.721.500)	(5.002.250)	354,23
Ditjen P2P	(105.411.896)	(20.683.947)	409,63
Ditjen Farmalkes	-	(227.605)	(100,00)
BPPSDM Kes	(25.055.625)	(25.490.842)	(1,71)
Jumlah	(285.215.364)	(172.208.207)	65,62

Nilai Tagihan TP/TGR (Netto) Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp6.967.982.314,00 dan Rp7.056.252.171,00.

Rincian lebih lanjut terkait TP/TGR (Nettto) :

Tabel 84
Tagihan TP/TGR (Netto) Tahun 2018 dan 2017 Menurut Unit Eselon 1
(dalam rupiah)

<i>Eselon I</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Naik/ (Turun) %</i>
Setjen	334.622.360	295.472.512	13,25
Ditjen Kesmas	722.132.247	528.837.839	36,55
Ditjen Yankes	120.698.500	97.567.750	23,71
Ditjen P2P	804.459.696	1.016.403.161	(20,85)
Ditjen Farmalkes	-	45.293.395	(100,00)
PPSDM Kes	4.986.069.511	5.072.677.514	(1,71)
Jumlah	6.967.982.314	7.056.252.171	(1,25)

C.27 Piutang Tagihan TP/TGR BLU

Piutang Tagihan TP/TGR BLU Nilai Piutang Tagihan TP/TGR BLU Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp 1.589.959.220,00 dan Rp1.677.890.220,00 terdapat pada satker Ditjen Yankes.

C.28 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR BLU

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR BLU Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR BLU Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah (Rp1.387.737.418,00) dan (Rp1.444.347.918,00) pada satker Ditjen Yankes. Nilai Tagihan TP/TGR BLU (Netto) Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp202.221.802,00 dan Rp233.542.302,00 terdapat pada satker Ditjen Yankes.

C.29 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp276.560.972,00 dan Rp101.560.972,00 terdapat pada satker Ditjen Yankes.

C.30 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah (Rp93.132.805,00) dan (Rp507.805,00) terdapat pada satker Ditjen Yankes. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto) Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp183.428.167,00 dan Rp101.053.167,00 terdapat pada satker Ditjen Yankes.

ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.172.378.887.875,00 dan Rp370.593.431.132,00. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, sebagai berikut :

Tabel 85
Daftar Aset Lainnya Tahun 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	305.364.000	-	-
Aset Tak Berwujud	271.946.991.563	230.678.798.039	17,89
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	6.609.639.586	6.680.396.861	(1,06)
Aset Lain-lain	5.896.652.429.657	1.861.374.860.857	216,79
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(4.822.173.640.062)	(1.572.540.013.150)	206,65
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(180.961.896.869)	(155.600.611.475)	16,30
Jumlah Aset Lainnya	1.172.378.887.875	370.593.431.132	216,35

Saldo Aset Lainnya 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp801.785.456.743,00 atau naik sebesar 216,35%. Secara rinci saldo masing-masing akun Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

*Kemitraan
Dengan Pihak
Ketiga*

Nilai perolehan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp305.364.000,00 dan Rp0,00. Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga terjadi pada Eselon 1 Ditjen Yankes dan Konsolidasi dengan nilai masing-masing yaitu Rp2.121.420.000,00 dan (Rp1.816.056.000,00).

C.32 Aset Tak Berwujud (ATB)

ATB

Nilai perolehan ATB per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp271.946.991.563,00 dan Rp230.678.798.039,00.

Tabel 86
Rincian Aset Tak Berwujud Tahun 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Aset Tak Berwujud Lainnya	2.487.842.250	3.706.764.192	(32,88)
Hak Cipta	30.397.285.788	30.087.995.788	1,03
Hasil Kajian/Penelitian	2.188.909.299	2.091.959.299	4,63
Lisensi	6.436.463.038	8.078.499.038	(20,33)
Paten	5.205.150.000	5.650.250.000	-
Software	225.231.341.188	181.063.329.722	24,39
Jumlah	271.946.991.563	230.678.798.039	17,89

Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 87
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Awal SAIBA		230.678.798.039
Penambahan		
100	Saldo Awal	1.371.231.149
101	Pembelian	32.607.188.929
102	Transfer Masuk	320.695.000
103	Hibah (Masuk)	4.125.000
107	Reklasifikasi Masuk	9.773.947.659
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	4.430.000
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	52.000.000
202	Pengembangan Nilai Aset	5.162.503.681
208	Pengembangan Melalui KDP	555.523.376
	TOTAL	49.851.644.794
Pengurangan		
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(2.973.229.628)
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(30.000.000)
209	Transaksi Normalisasi BMN	(52.000.000)
302	Transfer Keluar	(320.695.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(5.207.526.642)
	TOTAL	(8.583.451.270)
Saldo Akhir SAIBA		271.946.991.563
Saldo Akhir SIMAK		271.946.991.563
Selisih		-

Terdapat beberapa hasil karya berupa kajian dari penelitian yang belum disajikan dalam Aset Tak Berwujud, dengan rincian sebagai berikut:

a. BPPSDM Kesehatan

Hasil penelitian dari beberapa Politeknik Kesehatan yang sudah mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum dan HAM belum disajikan sebagai Aset Tak Berwujud, dengan rincian dalam tabel berikut.

Tabel 88
Hasil Penelitian yang Mendapat HKI pada BPPSDM Kesehatan

No	Nama Satker	Jumlah Penelitian yang Mendapat HKI	
		Tahun 2017	Tahun 2018
1	Politeknik Kesehatan Medan	7	5
2	Politeknik Kesehatan Bandung	1	13
3	Politeknik Kesehatan Jakarta I	-	17
4	Politeknik Kesehatan Jakarta II	3	26
5	Politeknik Kesehatan Jakarta III	14	12

b. Balitbangkes

Terdapat empat hasil penelitian/*invensi* yang sudah mendapat Sertifikat Paten dan 17 (tujuh belas) hasil penelitian yang sudah mendapatkan Surat Pendaftaran Ciptaan yang belum disajikan dalam Aset Tak Berwujud karena Balitbangkes belum dapat menaksir nilai perolehan Aset Tak Berwujud berupa Hak Paten dan Hak Cipta. Rincian hasil penelitian yang sudah mendapat HKI disajikan dalam lampiran 11.

Selain hasil penelitian yang sudah mendapat HKI tersebut, Balitbangkes masih memiliki 28 hasil penelitian/*invensi* yang masih dalam proses persetujuan Hak Paten dan 6 (enam) hasil penelitian/*invensi* yang masih dalam proses persetujuan Hak Cipta.

C.33 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp6.609.639.586,00 dan Rp6.680.396.861,00. Saldo Dana yang dibatasi Penggunaannya seluruhnya berasal dari sisa saldo Dana Jamkesmas. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Tabel 89
Rincian Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Des 2017	Setor s.d Des 2018	Saldo 31 Des 2018
Jamkesmas Rujukan	6.656.455.053	70.757.275	6.585.697.778
Jamkesmas Dasar	23.941.808	0	23.941.808
Total	6.680.396.861	70.757.275	6.609.639.586

Rincian Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per satker pada lampiran 12 dan 13.

C.34 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.896.652.429.657,00 dan Rp1.861.374.860.857,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Kesehatan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lain-Lain

Tabel 90
Daftar Aset Lain-lain TA 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Aset Lain-lain	909.888.676	889.911.051	2,24
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	12.840.745.408	11.031.106.108	16,40
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	5.882.901.795.573	1.849.453.843.698	218,09
Jumlah	5.896.652.429.657	1.861.374.860.857	216,79

Adapun mutasi Aset Lain-lain pada Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 91
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Lain-Lain

(dalam rupiah)

Saldo Awal SAIBA		1.861.374.860.857
Penambahan		
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	12.927.833.208.648
	TOTAL	12.927.833.208.648
Pengurangan		
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(341.086.268.747)
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(7.250.998.611)
305	Koreksi Pencatatan	(7.122.744.177.115)
390	Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang dihentikan)	(17.003.536.653)
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(77.723.826.762)
393	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	(1.295.656.664.004)
394	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	(3.063.614.120)
395	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	(1.733.225.700)
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(26.281.378.136)
398	Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(11.950.000)
	TOTAL	(8.892.555.639.848)
Saldo Akhir SAIBA		5.896.652.429.657
Saldo Akhir SIMAK		21.709.197.717.674
Selisih		(15.812.545.288.017)

Terdapat selisih antara SIMAK-BMN dengan SAIBA sebesar Rp15.812.545.288.017,00 yang merupakan Aset Lain-lain DK/TP yang sudah tidak dikuasai dan tidak dipergunakan dalam operasional Satker. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan Notulensi Rapat Tripartit pada tanggal 28 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Aset tersebut dikeluarkan dari Laporan Keuangan melalui jurnal pada Satker Konsolidasi.

*Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi
Aset Lainnya*

C.35 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp5.003.135.536.931,00) dan (Rp1.728.140.624.625,00).

KEWAJIBAN

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.364.709.364.608,00 dan Rp1.627.731.242.426,00. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dengan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, sebagai berikut :

Tabel 92
Rincian Kewajiban Jangka Pendek TA 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Utang kepada Pihak Ketiga	2.247.499.237.957	1.492.156.224.516	50,62
Hibah Yang Belum Disahkan	26.807.000	17.982.585.660	(99,85)
Pendapatan Diterima Dimuka	115.414.379.017	116.097.544.526	(0,59)
Uang Muka dari KPPN	1.659.565.736	1.320.666.799	25,66
Utang Jangka Pendek Lainnya	109.374.898	174.220.925	(37,22)
Jumlah Kewajiban	2.364.709.364.608	1.627.731.242.426	45,28

Saldo Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp736.978.122.182,00 atau meningkat sebesar 45,28%. Secara rinci saldo masing-masing akun Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

C.36 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.247.499.237.957,00 dan Rp1.492.156.224.516,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Pada Kementerian Kesehatan, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar, belanja barang yang tagihannya belum dilunasi, dan belanja modal yang masih harus dibayar.

Tabel 93
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	30.218.480.654	57.720.700.906	(47,65)
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	18.291.555.063	14.399.704.406	27,03
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	53.862.553.091	25.989.696.123	107,25
Dana Pihak Ketiga	1.275.703.243	3.873.136.711	(67,06)
Dana Pihak Ketiga BLU	8.972.899.423	13.480.613.328	(33,44)
Utang kepada Pihak Ketiga BLU	2.132.639.408.364	1.368.725.205.092	55,81
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	1.757.110.159	7.967.167.950	(77,95)
Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar	481.527.960	-	100,00
Jumlah	2.247.499.237.957	1.492.156.224.516	50,62

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada masing-masing Eselon 1 disajikan, sebagai berikut:

Tabel 94
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2018 dan 2017 Per Eselon 1
 (dalam rupiah)

<i>Eselon I</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Naik/ (Turun) %</i>
Setjen	1.299.108.528	42.239.254	2.975,60
Ditjen Kesmas	16.774.249	26.719.559	(37,22)
Ditjen Yankes	2.235.509.718.652	1.476.612.614.142	51,39
Ditjen P2P	1.247.237.756	1.240.408.817	0,55
Ditjen Farmalkes	92.309.415	12.594.347	632,94
Balinbangkes	1.729.752.213	711.994.562	142,94
BPPSDM Kes	7.604.337.144	13.509.653.835	(43,71)
Jumlah	2.247.499.237.957	1.492.156.224.516	50,62

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per satker disajikan dalam lampiran 14.

C.37 Hibah Yang Belum Disahkan

*Hibah Yang
Belum
Disahkan*

Hibah Yang Belum Disahkan Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp26.807.000,00 dan Rp17.982.585.660,00. Saldo Hibah Yang Belum Disahkan sebesar Rp26.807.000,00 terdapat di Badan Litbangkes.

C.38 Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan
Diterima
Dimuka*

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp115.414.379.017,00 dan Rp116.097.544.526,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBK yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Tabel 95
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2018 dan 2017
 (dalam rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Naik/ (Turun) %</i>
Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima di Muka	40.912.840.619	53.648.122.586	(23,74)
Pendapatan Diterima di Muka BLU	63.017.126.145	54.867.963.436	14,85
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	11.484.412.253	7.581.458.504	51,48
Jumlah	115.414.379.017	116.097.544.526	(0,59)

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per Eselon 1 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 96
Rincian Pendapatan Diterima Di muka TA 2018 dan 2017 Per Eselon 1
 (dalam rupiah)

<i>Eselon I</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Naik/ (Turun) %</i>
Setjen	3.546.166.784	4.580.427.418	(22,58)
Ditjen Kesmas	6.538.000	4.779.333	36,80
Ditjen Yankes	17.841.603.426	10.109.780.757	76,48
Ditjen P2P	5.851.352	11.893.344	(50,80)
Ditjen Farmalkes	938.000.000	1.992.500.000	(52,92)
Balitbangkes	7.749.500	20.561.500	(62,31)
BPPSDM Kes	93.068.469.955	99.377.602.174	(6,35)
Jumlah	115.414.379.017	116.097.544.526	(0,59)

C.39 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.659.565.736,00 dan Rp1.320.666.799,00, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Tabel 97
Uang Muka dari KPPN TA 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

<i>Eselon I</i>	<i>31 Desember 2018</i>	<i>31 Desember 2017</i>	<i>Naik/ (Turun) %</i>
Setjen	29.189.079	82.894.000	(64,79)
Ditjen Kesmas	545.439.469	136.000	400.958,43
Ditjen Yankes	577.724.000	878.827.600	(34,26)
Ditjen P2P	322.505.088	102.742.199	213,90
Ditjen Farmalkes	64.629.250	-	100,00
BPPSDM Kes	120.078.850	256.067.000	(53,11)
Jumlah	1.659.565.736	1.320.666.799	25,66

C.40 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka
Pendek
Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp109.374.898,00 dan Rp174.220.925,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp109.374.898,00 terdapat di Ditjen Pelayanan Kesehatan.

C.41 Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp47.635.057.995.043,00 dan Rp46.294.000.266.444,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam LPE.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 PENDAPATAN***Pendapatan*

Jumlah Pendapatan pada Kementerian Kesehatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp12.350.280.276.372,00 dan Rp 11.855.069.212.514,00 atau mengalami kenaikan sebesar 4,18%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 98
Pendapatan 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	14.438.440.472	13.987.526.283	3,22
Ditjen Kesmas	1.716.906.014	1.500.226.725	14,44
Ditjen Yankes	11.136.827.577.850	10.692.346.214.196	4,16
Ditjen P2P	322.186.594.852	332.136.078.691	(3,00)
Ditjen Farmalkes	51.457.944.684	48.767.424.297	5,52
Balitbang	3.333.669.105	3.342.953.466	(0,28)
PPSDM Kes	841.620.230.231	780.747.074.657	7,80
Konsolidasi	(21.301.086.836)	(17.758.285.801)	19,95
Jumlah	12.350.280.276.372	11.855.069.212.514	4,18

D.2 BEBAN

Jumlah beban pada Kementerian Kesehatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp54.689.905.888.742,00 dan Rp56.554.133.616.171,00 dengan rincian jenis beban masing-masing yaitu:

D.2.1 Beban Pegawai*Beban**Pegawai*

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp9.769.769.913.501,00 dan Rp9.106.857.216.579,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 99
Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	1.012.016.226.817	966.130.510.250	4,75
Itjen	39.259.502.723	34.281.666.412	14,52
Ditjen Kesmas	66.126.394.544	59.787.217.553	10,60
Ditjen Yankes	6.736.000.269.661	6.316.447.380.998	6,64
Ditjen P2P	506.915.769.253	441.297.869.075	14,87
Ditjen Farmalkes	33.177.218.623	29.158.072.628	13,78
Balitbangkes	163.448.752.837	144.328.641.483	13,25
BPPSDM Kes	1.212.872.689.043	1.116.276.730.680	8,65
Konsolidasi	(46.910.000)	(850.872.500)	(94,49)
Jumlah	9.769.769.913.501	9.106.857.216.579	7,28

D.2.2 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan*

Beban Persediaan pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.409.064.403.292,00 dan Rp 4.149.399.232.164,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang persediaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perkantoran. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 100
Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Beban Persediaan amunisi	-	5.000	(100,00)
Beban Persediaan bahan baku	284.484.389.779	188.075.933.934	51,26
Beban Persediaan konsumsi	523.761.001.013	504.121.020.963	3,90
Beban Persediaan Lainnya	3.598.915.275.020	3.447.374.375.291	4,40
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	1.492.000	32.974.100	(95,48)
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	1.902.245.480	9.794.922.876	(80,58)
Jumlah	4.409.064.403.292	4.149.399.232.164	6,26

Tabel 101
Beban Persediaan Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	12.992.475.885	23.543.925.009	(44,82)
Itjen	1.300.066.249	623.232.263	108,60
Ditjen Kesmas	79.194.004.467	12.762.257.923	520,53
Ditjen Yankes	3.912.053.961.395	3.732.907.386.722	4,80
Ditjen P2P	292.511.884.716	258.256.030.800	13,26
Ditjen Farmalkes	5.484.525.307	3.929.194.653	39,58
Balitbangkes	49.719.104.038	58.924.541.976	(15,62)
BPPSDM Kes	55.808.381.235	58.452.662.818	(4,52)
Jumlah	4.409.064.403.292	4.149.399.232.164	6,26

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa*

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.663.450.485.948,00 dan Rp5.533.431.492.495,00. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 102
Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	10.737.524.277	2.492.158.919	330,85
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	2.800.000	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	148.324.672	-	100,00
Beban Bahan	412.077.262.935	380.003.021.381	8,44
Beban Barang	922.296.310.928	919.407.999.432	0,31
Beban Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian	4.850.000	-	100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.011.676.714.944	954.334.281.719	6,01
Beban Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	3.700.000	-	100,00
Beban Barang Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain	1.350.000	-	100,00
Beban Barang Operasional Lainnya	72.669.357.329	75.047.393.613	(3,17)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	173.950.736.180	175.904.663.973	(1,11)
Beban Honor Output Kegiatan	235.986.532.353	240.480.844.262	(1,87)
Beban Jasa	562.686.245.401	360.221.207.800	56,21
Beban Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	971.500.613	-	100,00
Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	25.800.000	-	100,00
Beban Jasa Konsultan	46.629.707.117	49.192.112.864	(5,21)
Beban Jasa Lainnya	1.482.151.948.743	762.138.001.363	94,47
Beban Jasa Pos dan Giro	2.219.012.947	1.968.855.841	12,71
Beban Jasa Profesi	215.627.458.170	187.008.672.837	15,30
Beban Keperluan Perkantoran	329.907.203.495	265.305.940.991	24,35
Beban Langganan Air	21.060.609.692	16.421.949.784	28,25
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.282.122.515	18.294.502.131	27,26
Beban Langganan Listrik	245.143.048.270	225.692.895.344	8,62
Beban Langganan Telepon	12.992.850.639	12.127.076.205	7,14
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	13.078.510.660	13.593.247.347	(3,79)
Beban Pengadaan Bahan Makanan	6.114.600.564	15.838.212.292	(61,39)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.308.132.862	7.404.575.073	25,71
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	733.275.135.633	732.866.822.133	0,06
Beban Sewa	119.423.935.009	117.684.257.191	1,48
Jumlah	6.663.450.485.948	5.533.431.492.495	20,42

Tabel 103
Beban Barang dan Jasa Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	301.938.328.574	272.108.485.968	10,96
Itjen	8.885.232.302	8.431.256.892	5,38
Ditjen Kesmas	455.211.782.602	516.477.833.403	(11,86)
Ditjen Yankes	2.594.868.818.866	2.337.703.598.489	11,00
Ditjen P2P	1.272.962.695.408	678.126.187.130	87,72
Ditjen Farmalkes	67.447.804.729	67.804.720.896	(0,53)
Balitbangkes	143.675.960.320	106.908.865.557	34,39
BPPSDM Kes	1.839.295.564.983	1.562.776.067.461	17,69
Konsolidasi	(20.835.701.836)	(16.905.523.301)	23,25
Jumlah	6.663.450.485.948	5.533.431.492.495	20,42

D.2.4 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan*

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.162.567.451.992,00 dan Rp 1.304.455.423.423,00. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 104
Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	373.222.899	0	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	3.015.800	580.338.710	(99,48)
Beban Pemeliharaan	437.333.561.056	458.504.273.206	(4,62)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	204.784.184.842	123.824.892.607	65,38
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.143.333.674	3.276.891.346	(34,59)
Beban Pemeliharaan Irigasi	194.956.306	163.128.200	19,51
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		19.382.440	100,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	6.627.314.135	4.766.872.018	39,03
Beban Pemeliharaan Lainnya	1.364.449.715	1.444.778.223	(5,56)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	174.458.101.352	147.063.417.733	18,63
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.392.106.428	8.017.664.150	17,14
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	86.221.758.854	52.318.122.713	64,80
Beban Persediaan suku cadang	239.671.446.931	504.475.662.077	(52,49)
Jumlah	1.162.567.451.992	1.304.455.423.423	(10,88)

Tabel 105
Beban Pemeliharaan Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	27.302.421.766	20.846.285.665	30,97
Itjen	1.032.170.962	1.004.804.294	2,72
Ditjen Kesmas	6.159.281.580	6.187.623.470	(0,46)
Ditjen Yankes	904.488.117.951	1.079.932.545.251	(16,25)
Ditjen P2P	57.126.430.253	58.187.435.717	(1,83)
Ditjen Farmalkes	2.411.542.853	2.586.910.870	(6,78)
Balitbangkes	19.756.151.037	18.318.803.763	7,85
BPPSDM Kes	144.618.788.590	117.391.014.393	2,40
Konsolidasi	(327.453.000)	-	100,00
Jumlah	1.162.567.451.992	1.304.455.423.423	(10,88)

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas*

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.951.492.342.177,00 dan Rp2.631.640.957.184,00 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan 31 September 2017 dan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 106
Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Beban Perjalanan	89.374.220.993	77.930.630.804	14,68
Beban Perjalanan Biasa	1.016.053.508.396	913.799.943.027	11,19
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	182.428.037.105	177.270.224.103	2,91
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	304.656.194.833	176.575.026.647	72,54
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	581.068.132.866	618.785.857.994	(6,10)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	763.554.462.229	652.733.902.889	16,98
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	14.357.785.755	13.695.303.243	4,80
Beban Perjalanan Tetap		645.325.477	(100,00)
Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri		204.743.000	(100,00)
Jumlah	2.951.492.342.177	2.631.640.957.184	12,15

Tabel 107
Beban Perjalanan Dinas Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	440.554.726.134	377.057.772.482	16,84
Itjen	61.280.380.577	44.627.056.873	37,32
Ditjen Kesmas	325.989.101.292	318.033.582.739	2,50
Ditjen Yankes	279.429.347.430	244.510.883.106	14,28
Ditjen P2P	718.298.387.568	751.355.843.112	(4,40)
Ditjen Farmalkes	120.294.367.110	100.275.569.560	19,96
Balitbangkes	383.262.114.000	256.630.908.473	49,34
BPPSDM Kes	622.474.940.066	539.151.230.839	15,45

Konsolidasi	(91.022.000)	(1.890.000)	4.715,98
Jumlah	2.951.492.342.177	2.631.640.957.184	12,15

D.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 541.115.253.881,00 dan Rp4.377.754.001.316,00 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 108
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	428.912.011.413	442.973.629	96,725,63
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	35.570.911.000	4.366.696.708.962	(99,19)
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	75.686.697.948	10.614.318.725	613,06
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	945.633.520	-	100
Jumlah	541.115.253.881	4.377.754.001.316	(87,64)

Tabel 109
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	42.220.916.438	4.403.022.914	858,91
Ditjen Kesmas	313.761.156.536	770.326.937.451	(59,27)
Ditjen Yankes	2.170.926.990	20.053.785.369	(89,17)
Ditjen P2P	47.097.663.755	1.143.467.194.966	(95,88)
Ditjen Farmalkes	126.859.352.927	2.439.305.031.116	(94,80)
Balitbangkes	8.995.771.821	8.970.500	100,181,72
BPPSDM Kes	9.465.414	189.059.000	(94,99)
Jumlah	541.115.253.881	4.377.754.001.316	(87,64)

D.2.7 Beban Bantuan Sosial

*Beban
Bantuan
Sosial*

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp25.492.043.146.000,00 dan Rp25.418.433.302.000,00 yang terdapat pada unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal.

D.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan*

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.646.208.349.116,00 dan

dan
Amortisasi

Rp3.979.505.775.907,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 110
Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	295.869.018	129.154.269	129,08
Beban Amortisasi Hak Cipta	200.906.320	184.905.606	8,65
Beban Amortisasi Lisensi	719.540.800	751.000.101	(4,19)
Beban Amortisasi Paten	273.969.167	570.788.453	(52,00)
Beban Amortisasi Software	23.855.363.960	24.769.600.327	(3,69)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	208.534.252	273.271.444	(23,69)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	331.190.346.578	492.772.341.941	(32,79)
Beban Penyusutan Irigasi	2.743.196.471	3.160.718.973	(13,21)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	6.763.521.400	15.879.848.493	(57,41)
Beban Penyusutan Jaringan	17.628.763.740	20.890.927.703	(15,62)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	790.762.048.883	68.436.262.618	1.055,47
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.471.481.431.727	3.351.686.955.979	(26,26)
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	84.856.800	-	100
Jumlah	3.646.208.349.116	3.979.505.775.907	(8,38)

Tabel 111
Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	77.088.946.464	64.021.636.354	20,41
Itjen	3.197.903.570	3.172.017.102	0,82
Ditjen Kesmas	16.917.984.643	22.782.190.031	(25,74)
Ditjen Yankes	3.002.023.160.626	3.389.298.753.266	(11,43)
Ditjen P2P	207.411.175.838	181.582.701.735	14,22
Ditjen Farmalkes	9.307.173.194	7.090.921.648	31,25
Balitbangkes	84.162.067.150	56.323.716.610	49,43
BPPSDM Kes	396.336.721.861	370.631.205.477	6,94
Konsolidasi	(150.236.784.230)	(115.397.366.316)	30,19

Jumlah	3.646.208.349.116	3.979.505.775.907	(8,38)
---------------	--------------------------	--------------------------	---------------

D.2.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp54.194.542.835,00 dan Rp52.656.215.103,00. Beban penyisihan piutang tak tertagih adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi piutang yang tidak tertagih atas nilai suatu piutang yang dalam periode TA 2018. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 112
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	54.796.340.500	41.942.854.884	30,65
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(54.486.366)	60.951.249	(189,39)
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	376.682.820	5.230.124.379	(92,80)
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	15.756.690	28.798.878	(45,29)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(1.145.814.567)	1.148.281.693	(199,79)
Beban Penyisihan Piutang PNBPNBP	(893.568.267)	2.616.963.350	(134,15)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Gedung BLU	(19.614.451)	56.424.813	(134,76)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Lainnya BLU	(150.000)	150.000	(200,00)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Ruangan BLU	188.667.001	6.978.174	2.603,67
Beban Penyisihan Piutang Sewa Tanah BLU	(225.000)	225.000	(200,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	(30.000)	-	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	84.561.323	14.796.624	471,49
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	890.368.635	(800.000)	(111.396,08)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	12.890.017	110.769.839	(88,36)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	(56.835.500)	1.439.696.220	(103,95)

Jumlah	54.194.542.835	52.656.215.103	2,92
--------	----------------	----------------	------

Tabel 113
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	(781.298)	63.999.090	(101,22)
Ditjen Kesmas	(2.243.799)	25.550.837	(108,78)
Ditjen Yankes	55.813.736.558	49.115.005.013	13,64
Ditjen P2P	(1.558.862.592)	3.372.261.052	(146,23)
Ditjen Farmalkes	(5.318.728)	(11.017.589)	(51,73)
Balitbangkes	(455.284)	(609.279)	(25,28)
BPPSDM Kes	(51.532.022)	91.025.979	(156,61)
Jumlah	54.194.542.835	52.656.215.103	2,92

D.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

*Surplus/
Defisit Dari
Kegiatan
Operasional*

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. merupakan selisih lebih/kurang dari hasil pendapatan operasional dan beban operasional. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar (Rp42.339.625.612.370,00) dan (Rp44.699.064.403.657,00) adalah sebagai berikut:

Tabel 114
Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Pendapatan Operasional	12.350.280.276.372	11.855.069.212.514	4,18
Beban Operasional	54.689.905.888.742	56.554.133.616.171	(3,30)
Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional	(42.339.625.612.370)	(44.699.064.403.657)	(5,28)

Tabel 115
Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	(27.391.717.966.308)	(27.132.621.413.449)	0,95
Itjen	(114.955.256.383)	(92.140.033.836)	24,76
Ditjen Kesmas	(1.261.640.555.851)	(1.704.882.966.682)	(26,00)
Ditjen Yankes	(6.350.020.761.627)	(6.477.623.124.018)	(1,97)
Ditjen P2P	(2.778.578.549.347)	(3.183.509.444.896)	(12,72)
Ditjen Farmalkes	(313.518.721.331)	(2.601.371.979.485)	(87,95)
Balitbangkes	(849.685.796.814)	(638.100.885.617)	33,16

BPPSDM Kes	(3.429.744.788.939)	(2.984.211.921.990)	14,93
Konsolidasi	150.236.784.230	115.397.366.316	30,19
Jumlah	(42.339.625.612.370)	(44.699.064.403.657)	(5,28)

KEGIATAN NON OPERASIONAL**D.4 SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR**

*Surplus/
Defisit
Pelepasan
Aset Non
Lancar*

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp542.865.495.271,00) dan (Rp225.530.045.285,00). diperoleh dari hasil perhitungan yaitu pendapatan pelepasan aset non lancar dikurangi beban atas pelepasan aset non lancar. yaitu:

D.4.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

*Pendapatan
Pelepasan
Aset Non
Lancar*

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan aset non lancar karena hasil penjualan lebih besar daripada nilai bukunya. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp12.163.772.889,00 dan Rp5.920.820.287,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 116
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	1.133.111.754	379.413.131	198,65
Itjen	369.621.842	155.679.089	137,43
Ditjen Kesmas	-	149.326.000	(100,00)
Ditjen Yankes	3.891.720.374	2.341.571.323	66,20
Ditjen P2P	2.647.448.124	1.096.745.999	141,39
Ditjen Farmalkes	30.150.000	16.500.000	82,73
Balitbangkes	418.339.764	157.920.000	164,91
BPPSDM Kes	3.673.381.031	1.623.664.745	55,80
Jumlah	12.163.772.889	5.920.820.287	105,44

D.4.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

*Beban
Pelepasan
Aset Non
Lancar*

Beban Pelepasan Aset Non Lancar adalah kerugian yang dihasilkan dari penjualan aset non lancar karena hasil penjualan lebih kecil daripada nilai bukunya. yang pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp555.029.268.160,00 dan Rp231.450.865.572,00. Beban Pelepasan Aset Non Lancar menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 117
Beban Pelepasan Aset Non Lancar Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	720.851.119	3.617.828.058	(80,08)
Itjen	-	17.516.675	100,00
Ditjen Kesmas	5.671.485.200	38.501.402.833	(85,27)
Ditjen Yankes	500.353.154.795	143.734.552.136	248,11
Ditjen P2P	31.922.964.896	38.706.106.213	(17,52)
Ditjen Farmalkes	1.338.797.713	31.721.250	4.120,51

Balitbangkes	357.968.570	3.678.572	9.631,18
BPPSDM Kes	20.478.184.853	6.151.659.835	232,89
Konsolidasi	(5.814.138.986)	686.400.000	(947,05)
Jumlah	555.029.268.160	231.450.865.572	139,80

D.5 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

*Surplus/
Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya*

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp276.452.436.287,00 dan Rp261.425.548.065,00. diperoleh dari perhitungan yaitu pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya dikurangi beban dari kegiatan non operasional lainnya. yaitu:

D.5.1. Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Pendapatan
Dari Kegiatan
Non
Operasional
Lainnya*

Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah penerimaan-penerimaan dari kegiatan non operasional Kementerian Kesehatan, seperti penerimaan kembali belanja-belanja dari Tahun Anggaran Yang Lalu dimana pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp18.339.871.152,00 dan Rp992.527.143.000,00. Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 118
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Menurut Unit Eselon 1
(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	3.884.312.809	62.489.166.594	(93,78)
Itjen	46.418.497	218.810.625	(78,79)
Ditjen Kesmas	1.167.484.900	2.453.671.467	(52,42)
Ditjen Yankes	464.442.655.707	831.431.793.370	(44,14)
Ditjen P2P	78.605.067.051	26.177.793.137	200,27
Ditjen Farmalkes	56.340.576.533	40.457.232.029	39,26
Balitbangkes	1.574.662.286	1.029.992.624	52,88
BPPSDM Kes	12.278.693.369	28.268.683.154	(56,56)
Jumlah	618.339.871.152	992.527.143.000	(37,70)

D.5.2 Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Beban Dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya*

Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah kerugian dari kegiatan non operasional Kementerian Kesehatan. yang dalam hal ini adalah beban penyesuaian nilai persediaan dan kerugian persediaan rusak/usang. yang pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp341.887.434.865,00 dan Rp731.101.594.935,00.

Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut.

Tabel 119
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Menurut Unit Eselon 1
(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	2.319.372.722	1.467.486.785	58,05
Itjen	44.480.872	208.434.314	(78,66)
Ditjen Kesmas	258.749.626	121.242.788	113,41
Ditjen Yankes	294.516.924.051	673.587.093.953	(56,28)
Ditjen P2P	35.908.292.751	39.169.791.972	(8,33)

Ditjen Farmalkes	6.780.757.820	13.924.243.467	(51,30)
Balitbangkes	418.812.726	1.183.976.924	(64,63)
BPPSDM Kes	1.640.044.297	1.439.324.732	13,95
Jumlah	341.887.434.865	731.101.594.935	(53,24)

D.6 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Surplus/
Defisit Dari
Kegiatan Non
Operasional*

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. yang dalam hal ini adalah selisih lebih dari hasil pelepasan aset non lancar dan kegiatan non operasional lainnya. Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar (Rp266.413.058.984,00) dan Rp35.895.502.780,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 120
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(542.865.495.271)	(225.530.045.285)	140,71
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	276.452.436.287	261.425.548.065	5,75
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(266.413.058.984)	35.895.502.780	(842,19)

Tabel 121
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	1.977.200.722	57.783.264.882	(96,58)
Itjen	371.559.467	148.538.725	150,14
Ditjen Kesmas	(4.762.749.926)	(36.019.648.154)	(86,78)
Ditjen Yankes	(326.535.702.765)	16.451.718.604	(2.084,81)
Ditjen P2P	13.421.257.528	(50.601.359.049)	(126,52)
Ditjen Farmalkes	48.251.171.000	26.517.767.312	81,96
Balitbangkes	1.216.220.754	257.128	472.902,07
BPPSDM Kes	(6.166.154.750)	22.301.363.332	(127,65)
Konsolidasi	5.814.138.986	(686.400.000)	(947,05)
Jumlah	(266.413.058.984)	35.895.502.780	(842,19)

D.7 SURPLUS/DEFISIT LO

*Surplus/
Defisit LO*

Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan dari surplus/defisit kegiatan operasional dan surplus/defisit kegiatan non operasional. Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar (Rp42.606.038.671.354,00) dan (Rp44.663.168.900.877,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 122
Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(42.339.625.612.370)	(44.699.064.403.657)	(5,28)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(266.413.058.984)	35.895.502.780	(842,19)
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(42.606.038.671.354)	(44.663.168.900.877)	(4,61)

Tabel 123
Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Setjen	(27.389.740.765.586)	(27.074.838.148.567)	1,16
Itjen	(114.583.696.916)	(91.991.495.111)	24,56
Ditjen Kesmas	(1.266.403.305.777)	(1.740.902.614.836)	(27,26)
Ditjen Yankes	(6.676.556.464.392)	(6.461.171.405.414)	3,33
Ditjen P2P	(2.765.157.291.819)	(3.234.110.803.945)	(14,50)
Ditjen Farmalkes	(265.267.550.331)	(2.574.854.212.173)	(89,70)
Balitbangkes	(848.469.576.060)	(638.100.628.489)	32,97
BPPSDM Kes	(3.435.910.943.689)	(2.961.910.558.658)	16,00
Konsolidasi	156.050.923.216	114.710.966.316	36,04
Jumlah	(42.606.038.671.354)	(44.663.168.900.877)	(4,61)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 EKUITAS AWAL**

Ekuitas Awal Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 1 Januari 2017 adalah masing-masing sebesar Rp46.294.000.266.444,00 dan Rp46.710.647.659.719,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit LO Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp42.606.038.671.354,00) dan (Rp44.663.168.900.877,00). Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan dari defisit kegiatan operasional dan surplus kegiatan non operasional.

Tabel 124
Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2018 dan 2017
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	(27.389.740.765.586)	(27.074.838.148.567)	1,16
Itjen	(114.583.696.916)	(91.991.495.111)	24,56
Ditjen Kesmas	(1.266.403.305.777)	(1.740.902.614.836)	(27,26)
Ditjen Yankes	(6.676.556.464.392)	(6.461.171.405.414)	3,33
Ditjen P2P	(2.765.157.291.819)	(3.234.110.803.945)	(14,50)
Ditjen Farmalkes	(265.267.550.331)	(2.574.854.212.173)	(89,70)
Balitbangkes	(848.469.576.060)	(638.100.628.489)	32,97
BPPSDM Kes	(3.435.910.943.689)	(2.961.910.558.658)	16,00
Konsolidasi	156.050.923.216	114.710.966.316	36,04
Jumlah	(42.606.038.671.354)	(44.663.168.900.877)	(4,61)

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp1.900.619.597.374,00) dan Rp307.676.167.991,00. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas merupakan penjumlahan dari koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset, koreksi nilai aset non revaluasi dan koreksi lain-lain.

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.737.779.235,00 dan Rp112.869.821.788,00.

Koreksi Nilai Persediaan menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 125
Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	-	189.904.011	(100,00)
Ditjen Kesmas	75.990.371.896	-	100,00
Ditjen Yankes	940.390.573	19.453.550.566	(95,17)
Ditjen P2P	785.773.247	92.569.021.074	(99,15)
Ditjen Farmalkes	11.615.415	-	100,00
BPPSDM Kes	-	657.346.137	(100,00)
Konsolidasi	(75.990.371.896)	-	(100,00)
Jumlah	1.737.779.235	112.869.821.788	(98,46)

Rincian koreksi nilai persediaan per Satker pada lampiran 15.

Penyebab Koreksi Nilai Persediaan pada tahun 2018 antara lain:

- Penyesuaian nilai persediaan yang terjadi tahun sebelumnya yang dilakukan koreksi pada tahun berjalan;
- Penginputan kembali saldo awal pada aplikasi persediaan (dari yang sebelumnya gelondongan menjadi rinci per item); dan
- Koreksi pencatatan persediaan karena masih terdapat persediaan yang belum diinput pada Aplikasi Persediaan.

E.3.2 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi
Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi*

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar (Rp446.473.904.884,00) dan Rp111.403.406.640,00. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi berasal dari transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 126
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2018 dan 2017
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	(351.886.830.275)	(4.109.004.543)	8.463,80
Itjen	-	(76.987.500)	(100,00)
Ditjen Kesmas	21.257.149	(119.557.675)	(117,78)
Ditjen Yankes	(66.974.293.788)	(21.189.539.361)	216,07
Ditjen P2P	15.375.992.555	19.066.650.315	(19,36)
Ditjen Farmalkes	2.414.310.890	(1.026.094.561)	(335,29)
Balitbangkes	13.944.469.613	809.820.875	1.621,92
BPPSDM Kes	26.018.320.374	118.048.117.090	(77,96)
Konsolidasi	(85.387.131.402)	-	100,00
Jumlah	(446.473.904.884)	111.403.404.640	500,77

Rincian koreksi nilai aset tetap non revaluasi per Satker pada lampiran 16.

Penyebab terjadinya Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi antara lain disebabkan oleh adanya:

- Reklasifikasi masuk dan keluar atas Aset Tetap/ATB;
- Koreksi atas pencatatan nilai Aset Tetap dan Penyusutannya;
- Reklasifikasi masuk dan keluar atas Aset Tetap Revaluasi;
- Perubahan saldo awal pada SIMAK BMN, koreksi nilai atas SIMAK BMN dan aktivitas transaksional; dan
- Koreksi atas pencatatan hasil Penilaian Kembali (*revaluasi*) BMN Tahun 2017-2018 berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan dengan merujuk pada kebijakan yang diatur dalam Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-35/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN).

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

*Koreksi
Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi*

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar (Rp1.398.127.874.925,00) dan (Rp15.791.754.043,00). Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi berasal dari transaksi Koreksi Nilai Aset Lainnya yang bukan kerana revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 127
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2018 dan 2017
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	32.997.894.515	(427.773.389)	(7.813,87)
Ditjen Kesmas	159.619.911.161	-	(100,00)
Ditjen Yankes	1.567.740.231.191	(5.585.780.649)	(28.166,63)
Ditjen P2P	47.653.696.136	111.750.000	42.543,13
Ditjen Farmalkes	4.652.941.891	(207.933.668)	(2.337,70)
Balitbangkes	(29.587.500)	(17.424.598)	69,80
BPPSDM Kes	25.301.257.786	(9.664.591.739)	(361,79)
Konsolidasi	(3.236.064.220.105)	-	100,00
Jumlah	(1.398.127.874.925,00)	(15.791.754.043,00)	(8.753,53)

Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada lampiran 17.

Penyebab terjadinya Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi antara lain disebabkan oleh adanya reklasifikasi masuk dan keluar atas Aset Tak Berwujud/Aset Lainnya serta koreksi atas pencatatan hasil Penilaian Kembali (*revaluasi*) BMN Tahun 2017-2018 berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan.

E.3.4 Koreksi Lain-lain

*Koreksi
Lain-lain*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar (Rp57.755.596.800,00) dan Rp 99.194.695.606,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas kas, pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tabel 128
Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2018 dan 2017
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	(4.657.500)	(1.746.493.900)	(99,73)
Ditjen Kesmas	661.701.233	(25.293)	(2.616.243,73)
Ditjen Yankes	(61.584.949.416)	203.688.962.093	(130,23)
Ditjen P2P	3.235.549.269	(102.538.158.466)	(103,16)
Balitbangkes	(27.725.972)	(9.392.278)	195,20
BPPSDM Kes	(35.514.414)	(200.196.550)	(82,26)
JUMLAH	(57.755.596.800)	99.194.695.606	(158,22)

Rincian Koreksi Lain-Lain pada lampiran 18.

Penyebab terjadinya koreksi lain lain antara lain:

- Koreksi pencatatan piutang dan penyisihan piutang yang berasal dari Jamkesda Pemda Banyuasin atas pelayanan tahun 2015 dan 2017 pada RSK Rivai Abdullah Palembang;
- Koreksi pencatatan penyisihan piutang tahun lalu di RSUP Dr. Sardjito; dan
- Koreksi beban gaji dan pegawai dari pengeluaran remunerasi yang sudah dibayar tahun lalu pada RSUP Sanglah Denpasar.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

*Transaksi
Antar
Entitas*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp45.847.715.997.327,00 dan Rp43.938.845.339.611,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN yang mencakup ditagihkan kepada dan diterima dari entitas lain, transfer masuk dan keluar, serta pengesahan dan pengembalian hibah langsung. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 129
Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Ditagihkan ke Entitas Lain	45.005.838.184.368	42.971.525.630.081	4,73
Diterima dari Entitas Lain	(830.254.906.962)	(930.196.917.754)	(10,74)
Sub Jumlah	44.175.583.277.406	42.041.328.712.327	5,08
Transfer Masuk	1.006.637.949.688	1.035.429.902.087	(2,78)
Transfer Keluar	(1.023.072.029.762)	(1.028.785.742.093)	(0,56)
Sub Jumlah	(16.434.080.074)	6.644.159.994	(347,35)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Pengesahan Hibah Langsung	1.692.209.137.321	1.898.746.755.075	(10,88)
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(28.477.615.986)	(7.874.287.785)	261,65
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	24.835.278.660	-	100,00
Sub Jumlah	1.688.566.799.995	1.890.872.467.290	(10,70)
Jumlah Total	45.847.715.997.327	43.938.845.339.611	4,344

Rincian Transaksi Antar Entitas Menurut Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 130
Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018 dan 2017
Menurut Unit Eselon 1

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik/ (Turun) %
Setjen	27.393.071.710.769	27.030.624.089.696	1,34
Itjen	113.224.434.763	91.747.615.121	23,41
Ditjen Kesmas	2.064.556.466.551	1.733.180.300.307	19,12
Ditjen Yankes	4.420.807.622.573	4.842.342.174.087	(8,71)
Ditjen P2P	3.987.998.837.381	3.818.991.212.475	4,43
Ditjen Farmalkes	3.399.201.270.072	2.541.635.743.806	33,74
Balitbangkes	822.433.490.464	642.942.054.068	27,92
BPPSDM Kes	3.646.090.136.364	3.237.382.150.051	12,62
Konsolidasi	332.028.390	-	100,00
Jumlah	45.847.715.997.327	43.938.845.339.611	4,344

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar (Rp830.254.906.962,00) sedangkan DKEL sebesar Rp45.005.838.184.368,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.006.637.949.688,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar (Rp1.023.072.029.762,00).

Transfer Keluar lebih besar dibandingkan Transfer Masuk (TM/TK) sebesar Rp16.434.080.074,00 dengan rincian selisih sebagai berikut :

Tabel 131
Penjelasan Perbedaan Saldo Transfer Masuk dan Transfer Keluar

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	Nilai Buku
1	Transfer Masuk dari K/L Lain	(1.755.225.000)
2	Transfer Keluar ke K/L Lain	18.551.884.112
3	Perbedaan Transfer Keluar dan Transfer Masuk antar Satker di Kementerian Kesehatan dengan Diskes AU	(27.078.572)

No.	Keterangan	Nilai Buku
4	Perbedaan Transfer Keluar dan Transfer Masuk antar Satker di Kementerian Kesehatan (Penyesuaian nilai persediaan karena HPT)	(3.472.075)
5	Selisih yang disebabkan penjumlahan pada Satker Konsolidasi	(332.028.390)
6	Selisih yang disebabkan perbedaan akun antara Satker Pemberi dengan Satker Penerima	(1)
	Total	16.434.080.074

Penjelasan selisih sebagai berikut:

- Transfer Masuk yang berasal dari Kementerian Lain dengan nilai buku senilai (Rp1.755.255.000,00) berasal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa buku;
- Aset yang diserahkan ke Kementerian/Lembaga lain dengan nilai buku sebesar Rp18.551.884.112,00;
- Terdapat perbedaan pencatatan nilai aset yang diserahkan ke Kementerian/Lembaga sebesar (Rp27.078.572,00) pada Diskes AU. Rincian Kementerian Negara/Lembaga yang menerima aset sebagai berikut:

Tabel 132

Rincian Kementerian Negara/Lembaga Penerima Aset dari Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Kementerian Negara/Lembaga	Nilai Buku
1	Badan Pemeriksa Keuangan RI	42.600.000
2	Kementerian Pertahanan RI	108.314.286
3	Kementerian Agama RI	66.219.300
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	671.886.810
5	Kemenko Bidang Perekonomian	56.720.230
6	BP POM	17.536.484.914
7	Arsip Nasional	42.600.000
	Total	18.524.825.540

- Terdapat selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar yang disebabkan kurang catat transfer aset pada satker di lingkup Kementerian kesehatan sebesar (Rp3.472.075,00) perbedaan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian nilai aset akibat dari metode harga pembelian terakhir;
- Perbedaan saldo Transfer Masuk dan Transfer Keluar yang disebabkan adanya penjumlahan akibat kebijakan "take out" nilai revaluasi Aset Tetap di Tahun 2019 sebesar (Rp332.028.390); dan
- Adanya perbedaan akun antara Satker pemberi dengan Satker penerima sebesar (1).

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung

sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.692.209.137.321,00 dengan rincian dalam lampiran 19.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp(28.477.615.986,00). Pengesahan hibah langsung TAYL sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp24.835.278.660,00 dengan rincian dalam lampiran 20 dan 21.

E.5 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp47.635.057.995.043,00 dan Rp46.294.000.266.444,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Revaluasi)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, hasil revaluasi seharusnya disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2018. Namun sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Noor S-35/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017–2018 tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP Tahun 2018. Hasil Penilaian Kembali BMN akan disajikan setelah dilakukan perbaikan.

Atas kebijakan tersebut, terdapat perbedaan penyajian nilai aset tetap objek revaluasi pada Laporan BMN dan Laporan Keuangan dengan rincian dalam Tabel 133 berikut:

Tabel 133
Perbedaan Penyajian Aset Tetap pada LK dan LBMN

(dalam rupiah)

No	Jenis Aset	Saldo Menurut LK	Saldo Menurut LBMN	Selisih
1	Tanah	15.404.565.123.149	64.211.038.877.289	(48.806.473.754.140)
2	Gedung dan Bangunan	13.574.335.256.508	14.513.297.021.169	(938.961.764.661)
3	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.903.594.715.702)	(1.074.467.028.854)	1.829.127.686.848
4	Jalan, Irigasi Jembatan	659.140.096.700	575.175.485.574	83.964.611.126
5	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi Jembatan	(164.355.508.072)	(67.081.968.498)	(97.273.539.574)

2. Pengelolaan Aset Flu Burung Ditjen Pengendalian Penyakit Dan PenyehatanLingkungan

a. BMN berupa fasilitas produksi vaksin flu burung dicatat pada satuan kerja Sekretariat Ditjen PP dan PL. BMN tersebut diperoleh melalui 2 (dua) tahap pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Tahap Pertama

Pekerjaan Pembangunan Fasilitas, Riset dan Alih Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung dengan nilai aset sebesar Rp718.800.551.000,00. Aset ini diperoleh melalui paket pekerjaan *multi years* dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dianggarkan melalui dua Bagian Anggaran (BA), yaitu :

- a) Pada tahun 2008 dan 2009 dianggarkan melalui BA 999 Kementerian Keuangan senilai Rp442.781.139.416,00. Nilai tersebut mulai dicatat dan dilaporkan dalam SIMAK-BMN Sekretariat Ditjen PP dan PL pada Tahun 2011 dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kesehatan Nomor BAST-4/AG/2011 tanggal 4 Februari 2011 dan Nomor BAST-30/AG/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- b) Pada tahun 2010 penyelesaian pekerjaan tersebut dilanjutkan melalui BA 024 Kementerian Kesehatan melalui DIPA Sekretariat Ditjen PP dan PL senilai Rp276.019.411.584,00.

c) Pencatatan aset yang diperoleh dari Pembangunan Fasilitas, Riset dan Alih Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung senilai Rp718.800.551.000,00 mengalami perubahan pada Tahun 2012 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Aset Pembangunan Fasilitas, Riset dan Alih Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung yang berada di Universitas Airlangga Surabaya senilai Rp122.502.235.460,00 direklasifikasi dari akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menjadi aset definitif peralatan dan mesin karena telah dimanfaatkan Universitas Airlangga untuk keperluan riset. Aset tersebut diserahkan dari Kementerian Kesehatan kepada Universitas Airlangga Surabaya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor PL.03.01/III/1330/2012 tanggal 31 Juli 2012 antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Aset yang berasal dari Pembangunan Fasilitas, Riset dan Alih Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung senilai Rp596.298.315.540,00 yang berada di Biofarma Bandung tetap dicatat dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) karena belum dapat dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaannya.

2) Tahap Kedua

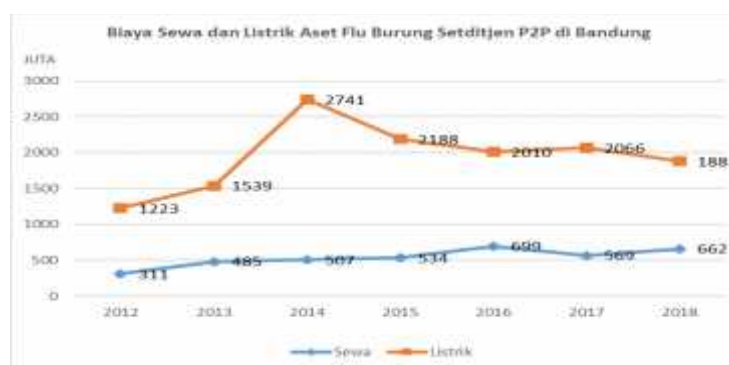
Pembangunan Sarana Prasarana *System Connecting* Fasilitas Produksi dan *Chicken Breeding* Riset dan Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung senilai Rp196.541.029.300,00 sesuai SP2D yang dibayarkan pada Tahun 2010 dengan sumber dana berasal dari BA 024 Kementerian Kesehatan DIPA Sekretariat Ditjen P2P. Aset tersebut dicatat dalam SIMAK-BMN Sekretariat Ditjen PP dan PL dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Pencatatan aset tersebut masih dalam akun KDP karena belum dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya.

- b. Pada Tahun 2012, seluruh aset flu burung Setditjen P2P baik yang berada di Biofarma Bandung maupun Universitas Airlangga Surabaya disita (*police line*) oleh Bareskrim POLRI untuk keperluan penyidikan.
- c. Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Ditjen PP dan PL terkait Hasil Pemeriksaan BPK RI adalah sebagai berikut :
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen Flu Burung TA 2012 atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat P2ML telah mengirimkan surat Nomor PL.00.01/III.6/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Perintah Tindak Lanjut LHP BPK RI Nomor 10/HP/XIX/06/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang ditujukan kepada Direktur PT Anugrah Nusantara berisi undangan kepada Direktur PT Anugrah Nusantara untuk hadir dalam rapat tindak lanjut LHP BPK RI tentang pengkajian pemutusan kontrak dan pencairan Bank Garansi ke Kas Negara.
 - 2) Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung (PPML) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat PPML telah mengirimkan surat Nomor PS.04.01/III.6/1857/2012 tanggal 14 September 2012 perihal Perintah Tindak Lanjut LHP BPK RI Nomor 34/S/VIII/06/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang ditujukan kepada Direktur PT Anugrah Nusantara berisi permintaan kepada PT Anugrah Nusantara untuk segera mencairkan Bank Garansi dan disetorkan ke Kas Negara.

- 3) Sekretaris Ditjen PP dan PL atas nama Direktur Jenderal PP dan PL telah mengirimkan surat Nomor PS.03.02/I.3/66/2013 tanggal 4 Januari 2013 perihal Permohonan Informasi Bank Garansi yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Khusus berisi permohonan informasi atas keberadaan Bank Garansi PT.Anugrah Nusantara.
- 4) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah membalas surat tersebut melalui surat Nomor B.87-KCK/ADK/02/2013 tanggal 4 Februari 2013 perihal Bank Garansi atas nama PT.Anugrah Nusantara berisi penjelasan bahwa Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Pembangunan Fasilitas Produksi Riset dan Alih Teknologi Vaksin Flu Burung atas nama PT.Anugrah Nusantara telah berakhir pada 31 Desember 2010 dan batas tanggal berakhirnya masa klaim telah terlampaui tanpa adanya klaim dari Penerima Jaminan/Tanggungans (Kementerian Kesehatan), sehingga atas Bank Garansi tersebut telah dilakukan cancellation dan dana yang digunakan untuk menjamin Bank Garansi tersebut secara otomatis telah kembali kepada Pihak yang Dijamin (PT.Anugrah Nusantara).
- 5) Sekretaris Ditjen PP dan PL atas nama Direktur Jenderal PP dan PL telah mengirimkan surat Nomor PS.04.02/I.3/D.1/1073/2013 tanggal 27 Maret 2013 perihal Undangan Rapat LHP BPK RI No. 34/S/VIII/06/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Anugrah Nusantara dengan agenda penyelesaian rekomendasi LHP BPK Nomor 34/S/VIII/06/2012 tanggal 6 Juni 2012.
- 6) Sekretaris Ditjen PP dan PL telah mengirimkan surat Nomor PS.03.02/I.3/855/2014 tanggal 26 Februari 2014 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara atas LHP BPK RI Nomor 34/S/VIII/06/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan berisi Penyerahan Pengurusan Piutang Negara untuk diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
- 7) Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan telah membalas surat tersebut melalui surat Nomor KU.01.03/I/954/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Penyerahan Piutang Negara atas LHP BPK RI Nomor 34/S/VIII/06/2012 tanggal 5 Juni 2012 berisi jawaban bahwa penyerahan pengurusan piutang Negara belum dapat diteruskan ke Panitia Urusan Piutang Negara Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan karena:
 - a) Kasus ini masih dalam proses hukum/penyidikan oleh Bareskrim POLRI, sehingga harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - b) Besaran piutang tercantum dalam LHP BPK RI masih disebutkan sebagai indikasi kerugian negara sehingga belum jelas nilai piutangnya.
- d. Pada Tahun 2014, terjadi perpindahan urusan pendidikan tinggi (Dikti) yang membawahi Universitas Airlangga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Kementerian Riset dan Teknologi. Aset flu burung di Universitas Airlangga Surabaya yang telah diajukan pengalihan status BMN kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dikembalikan dokumen pengajuan alih statusnya oleh Kementerian Keuangan karena perubahan organisasi tersebut.
- e. Sekretariat Ditjen P2P telah menganggarkan biaya listrik dan sewa gudang

penyimpanan aset flu burung melalui DIPA Sekretariat Ditjen P2P. Besarnya biaya listrik yang harus ditanggung menjadi pertimbangan Setditjen P2P untuk meminta pemutusan listrik di lokasi penyimpanan aset flu burung melalui surat Sesditjen P2P Nomor KR.04.02/4/4912/2018 dan KR.03.02/4/4896/2018 tanggal 29 Oktober 2018 hal Permohonan Bongkar Rampung Listrik. Dengan demikian maka terhitung mulai bulan Desember Tahun 2018, aliran listrik di lokasi penyimpanan aset flu burung di Bandung telah diputus. Biaya pembayaran listrik dan sewa gudang penyimpanan aset flu burung dari Tahun 2015 s.d. bulan November Tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

Gambar 4
Biaya Pembayaran Listrik dan Sewa Gudang Penyimpanan



- f. Tahun 2017 proses hukum atas kasus flu burung telah selesai dan berkekuatan hukum tetap. Aset flu burung di Bandung dan Universitas Airlangga Surabaya telah diserahkan kembali ke Kementerian Kesehatan melalui Berita Acara Penyerahan Kembali Barang Bukti dari Bareskrim POLRI. Atas dasar tersebut maka Ditjen P2P melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Aset Flu Burung di Universitas Airlangga Surabaya

- a) Aset yang berada di Universitas Airlangga Surabaya senilai Rp122.502.235.460,00 telah menjadi aset definitif dan tercatat dalam SIMAK BMN Satuan Kerja Sekretariat Ditjen P2P.
- b) Setelah penyerahan kembali aset flu burung oleh POLRI, sebagai tindak lanjut penyelesaian aset tersebut maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengundang Kementerian Kesehatan dalam rapat tanggal 29 November 2017 dengan hasil penyelesaian aset flu burung Universitas Airlangga akan ditempuh melalui mekanisme alih status ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). BPK akan mengkoordinasikan proses alih status tersebut dengan pihak Kemenristek Dikti.
- c) Ditjen P2P mengajukan kembali alih status BMN kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Proses alih status saat ini baru sampai pada tahap pengajuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas aset Flu Burung di Universitas Airlangga secara berjenjang kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
- d) Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menyampaikan surat Nomor KN.02.03/4/3304/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Permohonan Tindak Lanjut Alih Status Rumah Sakit Penyakit Tropik Infeksi (RSPTI) dan

Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset dan Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung untuk Manusia *Bio Safety Level 3* (BSL 3) Surabaya.

- e) Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menjawab surat tersebut dengan surat Nomor S-3787/KN/2018 tanggal 27 Juli 2018 hal Permohonan Tindak Lanjut Alih Status Rumah Sakit Penyakit Tropik Infeksi (RSPTI) dan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset dan Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung untuk Manusia *Bio Safety Level 3* (BSL 3) Surabaya yang menyatakan bahwa :
- (i) Sejak Tahun 2014 Universitas Airlangga telah menjadi PTN Badan Hukum (PTNBH) sehingga statusnya bukan lagi sebagai satuan kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - (ii) Mekanisme alih status menjadi kurang efektif karena Universitas Airlangga bukan merupakan satuan kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - (iii) Penyerahan ke PTNBH dapat dipertimbangkan menggunakan mekanisme hibah; dan
 - (iv) Mengingat BPK telah meminta Kementerian Kesehatan untuk menempuh mekanisme alih status, maka alternatif mekanisme hibah agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada BPK oleh Kementerian Kesehatan.

2) Aset Flu Burung di Bandung

- a) Aset flu burung yang berada di Bandung senilai Rp792.839.344.840,00. Aset flu burung tersebut berada di tiga lokasi Biofarma Jalan Pasteur, Biofarma Cisarua, dan Gudang Buah batu;
- b) Berdasarkan rekomendasi BPK pada Tahun 2012 aset flu burung di Bandung dicatat pada SIMAK BMN Satuan Kerja Sekretariat Ditjen P2P sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Pencatatan tersebut tidak mengalami perubahan sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018;
- c) Dalam upaya penyelesaian KDP tersebut, Ditjen P2P telah bersurat ke DJKN melalui surat Direktur Jenderal P2P Nomor KN.02.07/I/3204/2017 tanggal 18 Desember 2017 hal Penyelesaian terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Flu Burung;
- d) Sebagai tindak lanjut atas surat Direktur Jenderal P2P tersebut, DJKN menyelenggarakan rapat yang dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan (Sekretariat Ditjen P2P, Inspektorat Jenderal serta Biro Keuangan dan BMN), Kementerian BUMN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan PT. Biofarma. Hasil rapat tersebut menyatakan bahwa untuk penyelesaian KDP aset flu burung di PT. Biofarma Bandung, perlu diketahui kondisi aset tersebut pada saat ini;
- e) DJKN melalui surat Nomor S-738/KN/2018 tanggal 26 Februari 2018 meminta agar Kementerian Kesehatan dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan BPPT dan PT. Biofarma untuk melakukan audit uji fungsi secara menyeluruh atas aset flu burung guna mengetahui kategorisasi aset yang masih berfungsi dan tidak berfungsi. Hasil audit uji fungsi diperlukan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penyelesaian KDP tersebut;

- f) Menindaklanjuti surat DJKN, Direktur Jenderal P2P telah mengirimkan surat kepada Direktur Pusat Sistem Audit Teknologi BPPT Nomor KN.02.05/I/978/2018 tanggal 20 April 2018 hal Permohonan Audit Uji Fungsi;
- g) Permohonan tersebut telah dijawab oleh Direktur Pusat Sistem Audit Teknologi BPPT melalui surat Nomor KN.02.05/I/978/2018 tanggal 31 Mei 2018 hal Permohonan Audit Uji Fungsi yang menyatakan bahwa BPPT mendukung upaya pelaksanaan audit uji fungsi peralatan KDP aset flu burung;
- h) BPPT kemudian mengundang Kementerian Kesehatan dalam Rapat Pendahuluan Audit Uji Fungsi melalui undangan dari Direktur Sistem Audit Teknologi – BPPT Nomor 19/PSAT-BPPT/05/2018 tanggal 31 Mei 2018;
- i) Kontrak Pekerjaan Audit Teknologi Aset Flu Burung nomor KN.01.03/2/1364/2018 dan nomor 171/PKS/PB/ BPPT/X/2018 ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2018 antara Pusat Pelayanan Teknologi (Pusyantek) BPPT dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan. Masa berlakunya kontrak adalah daritanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, mencakup 5 (lima) substansi pekerjaan, yaitu (1) pemetaan aset, (2) pengkondisian aset dan lokasi audit, (3) observasi visual, (4) uji fungsi aset, dan (5) penilaian status kondisi aset serta prospek pemanfaatannya. Aset yang dimaksud mencakup peralatan permesinan dan barang habis pakai yang terdapat pada lokasi Biofarma Pasteur, Biofarma Cisarua, dan Gudang Buah Batu;
- j) BPPT telah menyelesaikan pekerjaan audit tersebut dan menyerahkan Laporan Akhir Audit Teknologi Aset Flu Burung kepada Ditjen P2P Nomor 2018-FARM.BIOFARMA-01. 1 tanggal 31 Desember 2018;
- k) Hasil Laporan Akhir tersebut melampirkan semua barang yang berada di 3 lokasi (Pasteur, Buah Batu dan Cisarua) sejumlah 23.253 unit dengan deskripsi kondisi fisik dari masing-masing barang. Selain barang-barang tersebut, juga ditemukan konstruksi bangunan yaitu:
- (1) Lokasi Pasteur (3 bangunan) : Bangunan AI, *Bangunan Sheet Modular*, dan Bangunan *Power House*;
 - (2) Lokasi Cisarua (13 Bangunan) : Bangunan *Primary Setter*, Bangunan *Production House I*, Bangunan *Production House II*, Bangunan *Production House III*, Bangunan *Rearing House*, Bangunan Genset dan Trafo, Bangunan Pompa, Bangunan *Warehouse*, Bangunan *Feeding Storage*, Bangunan *Manure Storage*, Bangunan Disinfektan, Bangunan Gardu, dan Bangunan Locker.
- l) Sesuai arahan Dirjen P2P maka KDP flu burung akan disajikan sebagai penjelasan dalam CaLK dan CaLBMN Tahun 2018;
- m) Rencana tindak lanjut upaya penyelesaian KDP flu burung selanjutnya adalah :
- (1) Menunggu telaah hukum atas hasil putusan pengadilan inkraht yang melibatkan aset flu burung.
 - (2) Meminta opini pembanding dari Biofarma tentang aset flu burung yang berada di Bandung.

- (3) Melaporkan hasil telaah hukum dan opini pembanding dari Biofarma kepada Menteri Kesehatan untuk menerbitkan pernyataan penghentian KDP secara permanen.
 - (4) Dalam upaya penyelesaian KDP tetap berpedoman padaketentuan yang berlaku dan surat DJKN nomor S-738/KN/2018 tanggal 26 -Februari 2018 hal Penyelesaian terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Aset Flu Burung.
 - (5) Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait termasuk di dalamnya Biro Keuangan dan BMN Kemenkes, Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes, Inspektorat Jenderal Kemenkes, Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu serta Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian KDP flu burung.
- n) Tindak lanjut upaya penyelesaian KDP Aset Flu Burung Tahun 2019

Di tahun 2019 Ditjen P2P telah melakukan upaya-upaya penyelesaian KDP flu burung sebagai berikut:

- (1) Rapat Terbatas dipimpin Ibu Menteri Kesehatan pada tanggal 31 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan nomor UM.01.05/1/448/2019 tanggal 1 Februari 2019 hal Rencana Tindak Lanjut Arahan Menteri Kesehatan Ratas dan Audiensi Tanggal 31 Januari 2019 membahas langkahlangkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, sebagai berikut:
 - (i) Setditjen P2P pada tanggal 4 Februari 2019 telah mengundang DJKN, BPPT, Itjen, Biro Keuangan dan BMN, Biro Hukum dan Organisasi serta pihak-pihak yang terkait dalam rapat pembahasan tindak lanjut penyelesaian KDP.
 - (ii) Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan telah bersurat kepada PT. Biofarma (Persero) nomor KN.02.01/C.I/510/2019 tanggal 15 Februari 2019 hal Pendapat PT. Biofarma (Persero) tentang Aset Flu Burung Kementerian Kesehatan.
 - (iii) Hasil konsultasi dengan DJKN pada tanggal 15 Februari 2019 bahwa DJKN menganggap pengungkapan KDP flu burung dalam CaLK dan CALBMN serta proses yang sudah dilakukan oleh Ditjen P2P (selesai uji fungsi akhir 2018 oleh BPPT) sudah cukup memadai untuk penyajian Laporan Keuangan. Sesuai dengan hasil konsultasi tersebut dan arahan Dirjen P2P, maka KDP flu burung akan disajikan sebagai penjelasan dalam CaLK dan CaLBMN Tahun 2018.
- (2) Pada tanggal 4 s.d 6 Maret 2019, tim BPK dan Sekretariat Ditjen P2P melakukan pengecekan fisik aset flu burung di 3 (tiga) lokasi Bandung (Pasteur, Buahbatu dan Cisarua) untuk menindaklanjuti hasil uji fungsi oleh BPPT.
- (3) Sekretariat Ditjen P2P pada tanggal 8 Maret 2019 mengundang BPK dan BPPT dalam rapat penjelasan BPPT kepada BPK. Dalam rapat tersebut, BPK memberikan poin-poin arahan sebagai berikut:

- (i) Sekretariat Ditjen P2P agar memberikan label BMN pada semua alat hasil audit teknologi BPPT. Pelabelan tersebut diharapkan dapat dilakukan sebelum tripartit BPK pada 29 Maret 2019.
 - (ii) Sekretariat Ditjen P2P untuk segera mengambil langkah-langkah kemungkinan pemanfaatan aset flu burung.
- (4) Menindaklanjuti hasil tersebut, Sekretariat Ditjen P2P bersama dengan BPPT telah melakukan pelabelan BMN di 2 (dua) lokasi:

- (i) Pemberian label tahap I dilakukan tanggal 13 – 16 Maret 2019 di Gudang Buahbatu. Terdapat 122 jenis barang dengan volume 10.215 unit yang telah diberi label di Gudang Buahbatu dengan perincian sebagai berikut:

- Gudang 1 terdapat 58 jenis barang dengan volume 58 unit;
- b) Gudang 2 terdapat 62 jenis barang dengan volume 10.155 unit; dan
- c) Gudang 1 dan 2 terdapat 2 jenis barang dengan volume 2 unit.

Di lokasi Gudang Buahbatu juga ditemukan aset yang tidak terdapat dalam laporan akhir BPPT, yaitu Storage 4.000 L Negatif Area yang terletak di Gudang 1.

- (ii) Pemberian label tahap II dilakukan tanggal 10 – 13 April 2019 di Biofarma Cisarua. Terdapat 176 jenis barang dengan volume 12.193 unit yang telah diberi label di Biofarma Cisarua dengan perincian sebagai berikut:

- Rearing House terdapat 25 jenis barang dengan volume 46 unit;
- Production House 1 terdapat 22 jenis barang dengan volume 22 unit;
- Production House 2 terdapat 22 jenis barang dengan volume 22 unit;
- Production House 3 terdapat 23 jenis barang dengan volume 23 unit;
- Primary Setter terdapat 43 jenis barang dengan volume 6.994 unit;
- Ruang Genset dan Trafo terdapat 6 jenis barang dengan volume 6 unit;
- Ruang Pompa terdapat 2 jenis barang dengan volume 2 unit;
- Warehouse terdapat 30 jenis barang dengan volume 2.369 unit;
- Incinerator terdapat 7 jenis barang dengan volume 7 unit;
- Kontainer terdapat 77 jenis barang dengan volume 2.700 unit;
- Locker Room terdapat 2 jenis barang dengan volume 2 unit.

Dalam pelaksanaan labeling di Biofarma Cisarua, terdapat beberapa jenis alat berupa rangkaian sistem yang diberikan indeks BMN baik pada komponen sistem maupun sub komponen, sementara label BPPT

hanya ditempel pada sub komponen. Peralatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Indeks 11074 Manure Handling System terdiri dari:
 - Indeks 11075 Central Manure Conveyor;
 - Indeks 11076 Manure Removal System terdiri dari Indeks 11077 Horizontal Cross Conveyor dan Indeks 11078 Elevator Conveyor.
- Indeks 11079 Climate Control System terdiri dari:
 - Indeks 11080 s.d 11081 Air Heater (Brooder) terdiri dari Indeks 11086 s.d 11086 Air Heater dan Indeks 11087-11088 Circulation Fans
 - Indeks 11082 Ventilation System
 - Indeks 11083 Cooling System (Evaporation Cooler) terdiri dari Indeks 11110 Cooling Pad, Indeks 11111 Galvanized Steel Gutter, dan Indeks 11112 Water Re-Circulation
 - Indeks 11089 s.s 11095 Fan System terdiri dari Indeks 11096 s.d 11102 Fans dan Indeks 11103 s.d 11109 Light Trap

Di lokasi Biofarma Cisarua juga ditemukan aset yang belum diberi label oleh BPPT sebanyak 10 unit barang yaitu:

- Spitwater sebanyak 2 unit di lokasi Primary Setter;
- Washer (Speed Queen) sebanyak 1 unit di lokasi Primary Setter;
- Washer (Speed Queen) sebanyak 1 unit di lokasi Production House 1;
- Washer (Speed Queen) sebanyak 1 unit di lokasi Rearing House;
- Washer (Speed Queen) sebanyak 1 unit di lokasi Production House 3;
- Washer (Speed Queen) sebanyak 1 unit di lokasi Production House 2;
- Washer (Speed Queen) sebanyak 2 unit di lokasi Locker Room; dan
- Washer (Speed Queen) sebanyak 1 unit di lokasi Kontainer.

(iii) Bersamaan dengan kegiatan pelabelan tahap II tanggal 10 – 13 April 2019, dilakukan pemindahan KDP aset flu burung yang berada di lokasi Gudang Buahbatu ke lokasi Biofarma Cisarua Bandung, karena kontrak sewa Gudang Buahbatu berakhir pada April 2019.

(iv) Untuk pemberian label tahap III di Biofarma Pasteur direncanakan dilakukan dalam waktu dekat.

(5) Menjawab surat Sekjen Kemenkes di atas, PT Biofarma telah mengirimkan surat nomor SD-01815/DIR/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 hal Pendapat PT Biofarma (Persero) tentang Aset Flu Burung Kementerian Kesehatan RI yang menyatakan bahwa fasilitas dan peralatan proyek

pembangunan fasilitas produksi vaksin flu burung dengan kondisi saat ini tidak dapat digunakan oleh PT Biofarma (Persero).

3. Pinjaman Luar Negeri I-SPHERE

Terdapat pinjaman luar negeri Indonesia-Supporting Primary and Referral Health Care Reform (I-SPHERE) in Indonesia yang akan digunakan untuk kegiatan sektor kesehatan termasuk diantaranya untuk pembangunan 3 (tiga) rumah sakit vertikal di wilayah timur Indonesia yang telah tercantum pada Green Book 2018 dan Daftar Kegiatan. Kegiatan tersebut akan didanai dari pinjaman Bank Dunia dengan Perjanjian Pinjaman IBRD 8873: I-SPHERE Program total pinjaman sebesar USD 150 juta telah ditandatangani oleh Menkeu dan Country Director Bank Dunia Jakarta pada tanggal 17 Juli 2018. Pencairan dana pinjaman berdasarkan pada capaian indikator program kesehatan yang sudah disepakati antara pemerintah RI dan Bank Dunia (mekanisme Program for Results/P4R). Sampai dengan 31 Desember 2018 belum ada realisasi pencairan dana pinjaman. Indikator program tersebut meliputi 10 pencapaian Program secara bertahap atas yang meliputi :

Tabel 134
Indikator Program

No.	Program	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
1	Kabupaten/Kota yang tercakup di <i>dashboard</i> data dan informasi kesehatan;	Dasbord Kinerja dirancang dan Pedoman dikeluarkan	5%	30%	60%	90%
2	Puskesmas yang menggunakan Aplikasi <i>m-Health</i> yang menunjang Pelaksanaan PIS-PK yang disempurnakan	<i>Rencana mHealth</i> untuk PIS-PK diselesaikan	mHealth untuk PIS-PK dirancang dan Uji Lapangan dilakukan	25	250	1,500
3	Puskesmas mendapatkan tingkat akreditasi yang lebih tinggi;	600	900	1,200	1,500	1,996
4	Puskesmas yang terakreditasi (untuk tingkat Dasar dan Madya) di Kawasan Indonesia Timur	100	175	250	350	466
5	Komisi akreditasi pelayanan kesehatan tingkat pertama (KAFKTP) berfungsi sebagai komisi independen	Peta jalan untuk Komisi yang independen dihasilkan	Rencana Bisnis, anggaran dan AD/ART di sampaikan.	SK Menkes di keluarkan untuk penetapan KAFKTP yang independen	75 % staf KAFKTP di tunjuk	KAFKTP beroperasi sesuai dengan penetapan peraturannya.
6	Kabupaten/Kota bermasalah yang menghasilkan rencana tahunan	Modul Pelatihan yang ditingkatkan sudah dirancang	10	25	50	120
7	Penugasan khusus tenaga kesehatan	539	639	739	839	1,039
8	Fasilitas pelayanan primer dapat mengimplementasikan Kapitasi JKN berdasarkan indikator kinerja	-	-	Kesepakatan bersama Kemenkes dan BPJS Kesehatan (pada JKN: Kapitasi berdasarkan kinerja ditandatangani)	40.0%	60.0%
9	Kabupaten/Kota yang	Ditingkatkannya DAK-	Ditingkatkannya	DAK non-fisik	25.0%	60.0%

No.	Program	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	menunjukkan peningkatan minimal setengah dari indikator kinerja dalam penetapan DAK-Non Fisik	Non Fisik Berbasis Kinerja yang sudah dirancang	a Data Baseline DAK Non-Fisik dikumpulkan	sudah dialokasikan berdasarkan kinerja		
10	Jumlah provinsi yang menerapkan sistem rujukan terpadu dan terintegrasi.	Sistem Informasi Rujukan terintegrasi yang tersusun	Aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi sudah selesai	1	3	5

Pencairan pinjaman secara bertahap berdasarkan hasil capaian Indikator Disbursement Linked Indicators (DLI) yang sudah diverifikasi oleh Independent Verification Agent (IVA) yang oleh Kemenkeu ditunjuk BPKP sebagai IVA. Setiap capaian DLI telah ditetapkan besaran nilai, baseline, target tahunan, syarat pencairan termasuk definisi operasional indikator DLI dan tenggat waktu untuk pencapaian sudah disepakati bersama dengan Bank Dunia.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Program tersebut, Kementerian Kesehatan akan melakukan serangkaian kegiatan yang didanai dari APBN. Realisasi anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dalam rangka pencapaian indikator Program I-Sphere adalah Rp6.785.591.103.318,00 atau 91,11 % dari pagu senilai Rp7.447.466.548.000,00 yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 135
Pencapaian Indikator Program

Unit Eselon I	Program	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	
02401 Sekretariat Jenderal	01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkes	2036	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	104.797.680.000	89.891.328.708	85,78
		2038	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	125.860.540.000	120.151.147.041	95,46
		5831	Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan	19.387.692.000	15.179.293.306	78,29
02401 Total			250.045.912.000	225.221.769.055	90,07	
02402 Inspektorat Jenderal	03 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes	2052	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat I	10.534.141.000	10.148.324.194	96,34
		2053	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II	12.918.764.000	12.287.361.705	95,11
		2054	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat III	11.786.388.000	11.044.540.311	93,71
		2055	Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV	10.637.349.000	10.091.063.641	94,86
		2056	Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan	7.750.009.000	6.946.949.559	89,64
		2057	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	66.356.549.000	63.076.738.195	95,06
02402 Total			119.983.200.000	113.594.977.605	94,68	
02403 Ditjen Kesmas	06 Program Pembinaan Kesehatan	5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	201.970.071.000	188.673.555.217	93,42
		5833	Promosi Kesehatan dan	375.434.850.000	318.369.830.805	84,80

Unit Eselon I	Program	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
	Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat			
		5834 Penyehatan Lingkungan	241.429.445.000	224.518.697.623	93,00
02403 Total			818.834.366.000	731.562.083.645	89,34
02404 Ditjen Yankes	07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	2087 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	36.269.862.000	33.474.119.490	92,29
		2090 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	98.135.575.000	88.758.859.008	90,45
		5836 Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	49.277.588.000	45.237.501.888	91,80
02404 Total			183.683.025.000	167.470.480.386	91,17
02405 Ditjen P2P	08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2060 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1.159.119.912.000	1.130.679.721.347	97,55
		2061 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	133.534.272.000	124.888.640.275	93,53
		2063 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.170.882.977.000	1.070.918.203.123	91,46
02405 Total			2.463.537.161.000	2.326.486.564.745	94,44
02412 Badan PPSDM Kes	10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2075 Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	349.687.574.000	315.865.169.631	90,33
		2076 Pelatihan SDM Kesehatan	325.154.399.000	288.138.515.936	88,62
		2077 Pendidikan SDM Kesehatan	136.483.833.000	111.427.370.136	81,64
		2078 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	156.455.595.000	124.249.073.773	79,41
		2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.027.304.355.000	1.791.990.919.442	88,39
		5234 Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	616.297.128.000	589.584.178.964	95,67
02412 Total			3.611.382.884.000	3.221.255.227.882	89,20

Total realisasi Belanja Kementerian Kesehatan yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator program kesehatan sebagaimana tercantum pada pengungkapan I-SPHERE TA 2018 Rp6.785.591.103.318,00 atau 91,11 % dari pagu senilai Rp7.447.466.548.000,00.

Sesuai dengan surat Ketua BPKP Nomor S-40/0201/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Penyampaian Laporan Pencapaian Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Indonesia – Supporting Primary Health Care Reform (I-SPHERE) Biro Perencanaan telah mengirimkan Laporan Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Indonesia – Supporting Primary Health Care Reform (I-SPHERE) Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Indonesia – Supporting Primary Health Care Reform (I-SPHERE) dengan surat Nomor PR.05.01/4.3/1549/2019 tanggal 12 April 2019.

Pada Tahun 2018 terdapat anggaran Pinjaman Luar Negeri Indonesia-Supporting Primary and Referral Health Care Reform (I-SPHERE) in Indonesia pada Satuan Kerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp500.000.000,00. Anggaran tersebut masih dibintang dan tidak direalisasikan.

4. Progres Hibah BMN dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) sebagai implementasi PMK No.111/PMK.06/2016.

Progres hibah BMN dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) sebagai implementasi PMK Nomor 111/PMK.06/2016. pada 31 Desember 2018 terdapat progres penyelesaian hibah BMN sebesar Rp8.765.215.817.813,00 dan BMN yang belum usul hibah sebesar Rp11.547.589.881.147,00 tersebut dengan rincian per Eselon 1 sebagai berikut :

Tabel 136
Progres Hibah BMN Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

(dalam rupiah)

Unit Eselon I	Usulan Satker	Proses Eselon I	Persetujuan Kemenkes	Persetujuan Kemenkeu	Belum Usul Hibah
Setjen	135.383.888.243	-	47.008.573.310	88.375.314.933	135.660.981.343
Dijen Kesmas	91.292.719.169	40.849.957.248	50.442.761.921	-	626.697.753.710
Ditjen Yankes	9.102.484.715.212	595.415.061.908	7.291.002.996.355	1.216.066.656.949	10.612.015.794.215
Ditjen P2P	80.800.348.845	12.686.905.800	68.113.443.045	-	160.057.891.955
Ditjen Farmalkes	3.961.053.800	334.800.000	3.391.010.800	235.243.000	-
BPPSDM Kes	2.998.735.286	2.418.917.786	-	579.817.500	13.157.459.924
Jumlah	9.416.921.460.555	651.705.642.742	7.459.958.785.431	1.305.257.032.382	11.547.589.881.147

5. Data Tuntutan Hukum pada Kementerian Kesehatan

Data Tuntutan Hukum kepada Kementerian Kesehatan diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2018 Kementerian Kesehatan menghadapi Tuntutan Hukum sebanyak 18 buah kasus. Adapun posisi tuntutan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tuntutan Hukum kepada pemerintah yang dapat menimbulkan piutang sebanyak 3 kasus dengan status perkara belum inkraht karena masih berproses di Pengadilan Negeri. (rincian pada lampiran 22)
- b. Tuntutan Hukum kepada pemerintah yang dapat menimbulkan kewajiban sebanyak 15 kasus (rincian pada lampiran 23) dengan status sebagai berikut:
 - 1) Inkraht atas putusan PK sebanyak 4 kasus;
 - 2) Menunggu putusan kasasi sebanyak 3 kasus;
 - 3) Inkraht atas putusan kasasi sebanyak 1 kasus;
 - 4) Menunggu putusan PK sebanyak 1 kasus;
 - 5) Inkraht pada tingkat kasasi sebanyak 1 kasus;
 - 6) Menunggu putusan banding sebanyak 4 kasus; dan
 - 7) Masih berproses di Pengadilan Negeri sebanyak 1 kasus.